

EKONOMI ISLAM
(Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr
Dalam *Iqtiṣādunā*)



Oleh :

U B A Y
NIM. : 2021006

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004

EKONOMI ISLAM
(Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr
Dalam *Iqtisādunā*)



Oleh :

U B A Y
NIM.: 2021006

Pembimbing:
Prof. Drs. H. Akh.Minhaji, MA, Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2 0 0 4



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **EKONOMI ISLAM** (Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Şadr
dalam *Iqtişādunā*)

Nama : Ubay

N. I. M. : 2021006

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 21 September 2004

Ketua Program



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ubay
Tempat/tgl.lahir : Palu, 20 Juli 1970
N. I. M. : 2021006
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **EKONOMI ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Bâqir Şadr dalam *Iqtisâdunâ*)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag. 

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA 

Pembimbing : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, PhD 

Penguji : Dr. H. Amir Mu'allim, M.S. 

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, M.S. 

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2004

Pukul 09.00 s/d 10..00 WIB

Hasil / Nilai : 3,46 / A/B

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH, M.S.





MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 100/PS-MSI/ND/VIII/2004

TESIS berjudul : **EKONOMI ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā*)**

Ditulis oleh : Ubay

NIM : 2021006

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 6 Agustus 2004

Ketua Program

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : EKONOMI ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr
Dalam *Iqtisādunā*)

Ditulis oleh : U b a y

NIM : 2021006

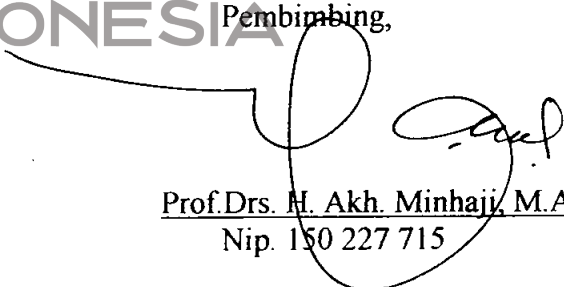
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Yogyakarta, rabu, 30 Juni 2004

Pembimbing,


Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
Nip. 150 227 715

EKONOMI ISLAM
(Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr Dalam *Iqtisādunā*)

Oleh : Ubay

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif* terhadap pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā*. Adapun yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā* mengenai aspek elemen dasar ekonomi, prinsip ekonomi, masalah ekonomi, distribusi, kepemilikan, sirkulasi, teori distribusi pra dan pasca produksi, teori produksi, dan peran Negara dalam perekonomian. Hal ini perlu diketahui paling tidak karena dua hal, yakni secara teoritis dapat dijadikan sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam dan secara praktis diharapkan dapat diimplementasikan dalam praktek ekonomi kekinian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan historis. Pendekatan normatif bertujuan untuk melihat apa yang menjadi keyakinan, nilai, kaidah atau norma yang dianut Muhammad Bāqir Ṣadr yang kemudian mempengaruhi pemikirannya. Adapun Pendekatan historis bertujuan untuk melihat dan mempelajari sejarah hidup Muhammad Bāqir Ṣadr. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi-politik pada masa hidupnya.

Data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, yakni dengan membaca pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā* sebagai data primer, dan pemikiran-pemikiran ekonominya dalam karya-karyanya yang lain atau komentar terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi Islamnya sebagai data sekunder.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini bertujuan untuk memaknai pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr. Selain itu juga digunakan analisis semantik, karena dalam mengemukakan konsep pemikiran ekonomi Islamnya, Muhammad Bāqir Ṣadr sering menggunakan istilah-istilah kunci yang memiliki makna tertentu.

Secara garis besarnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr adalah sebuah produk yang memadukan aspek normatif dan empirik. Aspek normatif nampak dalam landasan doktrin-teologis yang dikemukakannya. Sedangkan aspek empirik nampak dalam argumen-argumennya tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menganut sistem kapitalis dan sosialis. Dari perpaduan tersebut menghasilkan sebuah produk pemikiran ekonomi yang religius-humanistik.

THE ISLAMIC ECONOMY
(Study on Muhammad Bāqir Ṣadr's Thought in *Iqtisādunā*)

by. Ubay

ABSTRACT

*This research is library research which describes the concept of Islamic economy that Muhammad Bāqir Ṣadr's puts forward. The main question of this research concerns with the characteristics of Islamic economy in the view of Muhammad Bāqir Ṣadr's concerning basic elements of economy and its principles, economic issues, its distribution, ownership, and circulation, distribution theory before and after production, theory of production, and government's role in the economy in his book, *Iqtisaduna*. It is necessary to deeply understand this concept for two reasons; theoretically, Muhammad Bāqir Ṣadr's ideas on economy can be characterized as part of Islamic concept of economy. In addition, in practice it is expected that his notions can be implemented in contemporary muslim world particularly in the field of economy.*

In this research, the author used two approaches, normative and historical. Normative approach was employed to see through some factors which motivate a figure to produce his works, such as belief, values and norms. In addition, the use of historical approach was intended to study the history of Muhammad Bāqir Ṣadr's. This is also to examine social conditions in which Muhammad Bāqir Ṣadr's lived. This is due to the fact that the emergence of people's ideas can not be separated from social conditions which surround them.

*The data were collected by searching for relevant literatures (library research). Muhammad Bāqir Ṣadr's book, *Iqtisādunā*, was used as a primary source. This book was analysed to reveal and discuss his thought on Islamic economy. In addition, other literatures written by Muhammad Bāqir Ṣadr's and the commentaries to his ideas, were used as secondary data. In analysing data, the author employed content analysis. This is intended to reveal and analyse meanings behind Muhammad Bāqir Ṣadr's ideas in his book. Semantic approach was also employed in analysing his keywords which have particular meanings.*

*The result of this research shows that Muhammad Bāqir Ṣadr's thought on Islamic economy in his book, *Iqtisaduna* is a combination between normative and empirical aspects. Normative aspects can be seen from the theological basis which Muhammad Bāqir Ṣadr's often comes up with in supporting his notions on Islamic economy. Meanwhile, empirical aspects appear from his arguments on socio-economic condition of the society which embrace capitalist system of economy and socialist as well. From this combination emerge the kind of economic thought which is based on a theological-doctrinaire (*shari'a*) and humanist basis.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد.

Segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan *isti'ānah* dan pengampunan serta perlindungan dari kebodohan dan kejahatan diri, dan mendapat petunjuk bagi orang yang tidak disesati serta akan disesati bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan hanya kepada Allah hamba bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain-Nya serta Muhammad utusan-Nya, yang terkirim kepadanya shalawat dan salam beserta kepada para sahabatnya.

Pemikiran yang jernih, hati yang tenang, merupakan modal utama dalam penyelesaian studi Penulis yang ditandai dengan selesainya tesis yang berjudul: **"EKONOMI ISLAM (Studi Pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr Dalam *Iqtisādunā*)"**, dengan melalui jalan hidayah yang disampaikan oleh-Nya melalui Keluarga, Sahabat, para Guru Besar dan Dosen hingga kepada Pengelola Program Studi, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa waktu, pikiran dan tenaga serta berbagai bantuan moril maupun materil lainnya, maka sepatutnyalah Penulis memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof Dr. H. Dahlan Thaib, M.Si., Selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
2. Ayahanda Harun (almarhum) dan Ibunda Sadida yang telah menghadirkan dan memberikan sumbangsih terbesar bagi kehidupan Penulis di dunia fana ini dan telah mendidik serta membesarkan Penulis dengan segala tetesan peluh tanpa adanya keluh. Demikian pula terucapkan terima kasih kepada isteri saya yang tercinta Surtin SH beserta kedua anak saya Ananda Mumtahanah dan Faqih Al-

Munawwar tersayang yang selama ini menjadi sumber motivasi bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) dan kepada para Guru Besar beserta para dosen lainnya.
4. Bapak Prof.Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan metodologi dan teori dari penulisan tesis ini.
5. Bapak Ketua STAIN Datokarama Palu beserta pembantu ketua.
6. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan dan para Ketua Jurusan dan Staf Administrasi Fakultas Agama Islam.
7. Bapak Drs. H. Asmuni M. Thahir, MA selaku Kepala Bidang Akademik, Drs. Nanang Nuryanta, selaku Kepala Bidang Keuangan beserta seluruh Staf Administrasi Ibu Siti Aisyah, Mas Anwan Santoso, S.Ag, Mba' Aniek Sulistiyo, SS., Mba' Herni Lestari, Mas Lukman, S.Ag, Irma SP dan Pak Tri Wargono.
8. Kakak saya Luthfi Harun SE dan Abd Kahar Harun beserta semua saudara dan keluarga yang ada di Palu.
9. Bapak Dr. Lukman S. Thahir, MA beserta Istri dan anak-anaknya, Bapak Drs. Syahbuddin, M.Ag beserta Istri, Bapak Rusli, S.Ag MSi.Es beserta Istri dan Fatum, S.Ag, M.Ag, (dari Palu), Mawardi, S.Ag, MSI (dari Riau), Ibrahim, S.Ag, MSI, Saifullah, S.Ag, MSI serta teman kost di Jogja Mas Orbandaru, Mas Dar, Budi Sulistiyo, Lathif ST,Muhtadir, Arifuddin, Iswadi MSI, Dalmeri, Ali Mustafa, Akhiruddin, , Hani Syakir, Yon, Manan, Manar, Budi dan Ari, serta teman-teman yang tergabung dalam Remaja Islam Masjid Ukhuwah Islamiyyah dan Nur Hidayah Demangan Jogja, begitupun tidak terlupakan teman-teman yang tergabung dalam bulletin Al-Madani Jogja.
10. Ibu Rita Pranawati, SS., Winaldi (Riau), Abd Gafur (Lampung),Yusuf, Sri Purnomo, Rudi Hartono, Sumianto, Sulistianoro Pangarso (Yogyakarta), Sahlan (Purworejo), Rudi Hartono (Solo), Hidayatullah Muttaqin (Banjarmasin), Arsinah, S.Ag., MSI, Hj. Dewi Sri Suryanti, S.Ag, MSI, A. Fadil, S.Ag., MSI (Banten), dan

Haris Faulidi, Lc., MSI (Banjarmasin) serta rekan-rekan seperjuangan lainnya dalam menempuh cita-cita di kota Yogyakarta.

11. Seluruh orang-orang yang mempunyai andil dalam hidup Penyusun selama ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan, baik materil maupun non materil menjadi amal jariyah di sisi Allah swt.

Wa Allahul Musta'an Wa as-Salamu 'Alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 4 Juli 2004 M

Hormat Saya,



Ubay

Nim. 2021006

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā		-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm		-
ح	Hā'		h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'		-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *w*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>



VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawi al-furūd.</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة (٢) : ١٨٨)

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

(QS. Al-Baqarah [2]:188)

"Jual beli tu bukanlah sekedar transaksi antara uang dan barang, tetapi juga adalah transaksi antara kerelaan dua belah pihak."

"Banyak orang menginginkan kebahagiaan, namun seringkali justru sebaliknya yang didapatkan, sebab dia salah dalam memahami arti kebahagiaan itu sendiri"

PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis persembahkan kepada Keluarga Ku:

*Ibuku Hj. Saḍīḍa dan ayahku Harun(almarhum)
Istriku Surtin A. Tauroḍ SH dan anakku Ananda Mumtahanah
dan Faqih Al-Munawwar*

Karena

*Tidak ada suatu keberhasilan tanpa kerja kolektif dari orang yang menyayangi
dan tidak ada kehidupan tanpa kasih sayang, serta
tiada karya yang tidak dipersembahkan*

Sehingga

*Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan yang lebih nyata,
tidak hanya berapologi dengan kejayaan masa silam,
dan tidak dimanipulasi oleh kepentingan duniawiyah semata
hingga terlupakan kehidupan yang hakiki,*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	iii
Tim Penguji.....	iv
Nota Dinas.....	v
Persetujuan Pembimbing.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Pedoman Transliterasi.....	xii
Motto.....	xvi
Persembahan.....	xvii
Daftar Isi.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang Masalah.....	1
II. Rumusan Masalah.....	3
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
IV. Telaah Pustaka.....	4
V. Kerangka Teori.....	7
VI. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	8
VII. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II	BIOGRAFI MUHAMMAD BĀQIR ŞADR DAN PERJALANAN PEMIKIRANNYA.....	11
I.	Sketsa Biografi Muhammad Bāqir Şadr.....	11
II.	Pengembaraan Intelektual dan Politiknya.....	14
III.	Karya-karya Pemikirannya.....	20
BAB III	TINJAUAN UMUM ATAS EKONOMI KAPITALISME, SOSIALISME, DAN ISLAM.....	25
I.	Ekonomi Kapitalisme.....	25
II.	Ekonomi Sosialisme.....	50
III.	Ekonomi Islam.....	59
BAB IV	KRITIK MUHAMMAD BĀQIR ŞADR TERHADAP EKONOMI KAPITALISME DAN SOSIALISME.....	75
I.	Kritik terhadap Ekonomi Kapitalisme.....	75
II.	Kritik terhadap Ekonomi Sosialisme.....	85
BAB V	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD BĀQIR ŞADR DALAM <i>IQTISĀDUNĀ</i>	96
I.	Elemen Dasar Ekonomi.....	96
II.	Prinsip Ekonomi Islam.....	98
III.	Masalah Ekonomi.....	102
IV.	Distribusi.....	104

V.	Teori Distribusi Praproduksi.....	109
VI.	Teori Distribusi Pascaproduksi.....	132
VII.	Teori Produksi dan Peranan Negara dalam Perekonomian.....	134
BAB VI PENUTUP.....		136
I.	Kesimpulan.....	136
II.	Saran-saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Salah seorang pemikir besar di dunia Islam yang sangat terkenal, khususnya dalam persoalan ekonomi adalah Muhammad Bāqir Ṣadr (1935-1980).¹ Dia juga adalah seorang pemimpin politik dan pemikir Islam Irak yang sangat inovatif dan berpengaruh.² Dia adalah "tokoh penting yang tidak hanya di Irak, tetapi juga dalam kehidupan dunia *Sy'ah*, dan bahkan di dunia muslim secara keseluruhan" (Albert Hourani).³

Pada umumnya, pengkajian mengenai pemikiran seorang tokoh, dilatarbelakangi oleh karena pemikiran-pemikirannya yang bersifat monumental dan juga karena petualangan panjangnya ketika mengkaji, menilai dan merumuskan suatu ilmu pengetahuan.

Karya Muhammad Baqir Ṣadr mungkin merupakan karya yang paling beragam untuk seorang penulis muslim pada abad ke 20.⁴ Salah satu karyanya yang sangat monumental dalam bidang ekonomi adalah kitab yang berjudul *Iqtisādunā* (ekonomi kita).⁵ Dalam kitab tersebut beliau menguraikan ekonomi

¹ Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid 5, cet. I, (Bandung : Penerbit Mizan, 2001), h. 151

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Termuat pada prakata dalam Muhammad Bāqir Ṣadr, *Keunggulan Ekonomi Islam-Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam* (Edisi Terjemahan), cet. I, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 8

Islam, tanpa dipengaruhi oleh para pemikir dan sarjana Barat. *Iqtisādunā* merupakan sebuah sumbangan nyata terhadap dunia Islam.⁶

Di samping *Iqtisādunā*, masih banyak kitab lain yang disusun oleh Muhammad Bāqir Ṣadr.⁷ Khususnya dalam hal ekonomi dalam *Iqtisādunā*, beliau sangat banyak melontarkan ide-ide pembaharuan ekonomi yang bertolak dari landasan Islam, apakah itu menyangkut elemen dasar ekonomi, prinsip ekonomi, masalah ekonomi, distribusi, kepemilikan, sirkulasi, teori distribusi praproduksi, teori distribusi pascaproduksi, teori produksi maupun peran Negara dalam perekonomian.

Dalam pemikiran ekonominya ini, Muhammad Bāqir Ṣadr banyak melakukan kritikan terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme kemudian memberikan solusi alternatif dalam bentuk sistem ekonomi Islam.

Pemikiran-pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Ṣadr di atas masih sangat jarang dibahas dalam buku-buku yang berbahasa Indonesia, sehingga pemikiran-pemikiran cemerlang seorang tokoh ekonomi Islam yang seharusnya dapat kita baca, pahami dan aplikasikan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari tidak sampai kepada kita. Inilah yang memotivasi penulis untuk mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr dalam tesis ini, khususnya dalam pemikiran-pemikirannya dalam kitab *Iqtisādunā*.

⁶ *Ibid*

⁷ Karya Muhammad Bāqir Ṣadr tersebut dapat dilihat pada Bab II dalam sub bab: Karya-karya Pemikirannya

Bagaimanakah deskripsi dari pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Ṣadr dalam kitab *iqtiṣādunā* tersebut?, Hal tersebut akan penulis bahas dalam bab-bab selanjutnya dalam tesis ini.

II. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah penelitian adalah :

"Bagaimana pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtiṣādunā* mengenai aspek-aspek ekonomi di bawah ini :

- A. Elemen dasar ekonomi
- B. Prinsip ekonomi
- C. Masalah ekonomi
- D. Distribusi
- E. Kepemilikan (property)
- F. Sirkulasi
- G. Teori distribusi pra produksi dan pasca produksi
- H. Teori Produksi
- I. Peran Negara dalam perekonomian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

"Untuk mengetahui pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtiṣādunā* mengenai aspek-aspek ekonomi sebagaimana tersebut di atas.

Capaian akhir dari tujuan penelitian di atas, secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Dari temuan-temuan ilmiah diharapkan pula dapat dibangun suatu generalisasi ilmiah menuju terbentuknya teori-teori baru dalam bidang ekonomi. Sedangkan secara pragmatis, penelitian dapat pula memiliki *practical necessity*, sehingga dapat berguna bagi kepentingan pembangunan masyarakat.

IV. Telaah Pustaka

Fox (1969) sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Imam Suprayogo dan Drs. Tobroni, M.Si, mengatakan bahwa telaah atau tinjauan kepustakaan terdiri dari dua hal, yakni kepustakaan konseptual dan kepustakaan penelitian.⁸

Telaah kepustakaan konseptual, yaitu telaah terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan yang buruk, hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan berkaitan dengan masalah.⁹ Sedangkan telaah kepustakaan penelitian adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian, baik yang tidak diterbitkan maupun yang diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah.¹⁰

⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 131

⁹ *Ibid*

1. Telaah kepustakaan konseptual

Ada beberapa buku yang mengemukakan pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Ṣadr, namun buku-buku tersebut di samping berbahasa asing, sehingga tidak semua orang dapat memahaminya, juga buku-buku tersebut tidak mendeskripsikan secara rinci pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Ṣadr sebagaimana dalam *Iqtisādunā. Falsafatunā*, hanya terbatas pada pembahasan tentang pandangan filsafat Muhammad Bāqir Ṣadr terhadap kapitalisme dan sosialisme. *Al-Bank Al-Lā Ribawī fī Al-Islām*, masih terbatas pada pembahasan tentang riba yang tidak akan pernah ada dalam praktek lembaga ekonomi Islam (bank). *Al-Madrasah Al-Islāmiyyah*, buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Keunggulan Ekonomi Islam*, Namun masih sangat umum, yakni membahas pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Ṣadr secara umum tanpa perincian-perincian yang sistematis. Buku *Menyegarkan Islam* (edisi terjemahan) oleh Chibli Mallat. Buku ini antara lain mengemukakan tentang masalah pokok dalam ekonomi kapitalisme, sosialisme dan Islam, tetapi tidak membahas secara rinci substansi perbedaannya secara akademis. Buku *Contemporary Islamic Economic Thought-A Selected Comparative Analysis* oleh Mohammed Aslam Haneef antara lain mengemukakan pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr, tetapi terbatas pada pembicaraan tentang karakteristik sistem ekonomi Islam secara umum. Artikel dalam *Al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Islam*, mengemukakan tentang *Ekonomi Islam : Khayalan atau Kenyataan ?* oleh Muhammad Bāqir Ṣadr. Dalam jurnal ini dikemukakan bentuk ekonomi murni dan proses perumusan

¹⁰ *Ibid*, h. 132

kebijaksanaan sosio ekonomi. Artikel ini secara global berbicara tentang perlunya peningkatan produksi dalam ekonomi disertai pemerataannya dalam hal distribusi.

2. Telaah kepustakaan penelitian

Setelah penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap kepustakaan-kepustakaan sebagai hasil dari penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi, telah diterbitkan atau belum diterbitkan, maka hingga saat ini, penulis belum menemukan satupun tulisan dalam bentuk kajian akademis tersebut yang mengetengahkan pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Sadr secara rinci

Dengan demikian, maka banyak pustaka yang mengemukakan tentang pemikiran-pemikiran Muhammad Bāqir Sadr, baik dalam bentuk buku, seperti *Menyegarkan Islam* oleh Chibli Mallat yang diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul *The Renewal of Islamic Law dan Contemporary Islamic Economic Thought* oleh Mohammed Aslam Haneef, maupun dalam bentuk artikel, seperti *Ekonomi Islam: Khayalan atau Kenyataan* (Jurnal Al-Hikmah, nofember 1991-Februari 1992), *Aspek Filosofis Ritual Islam* (Jurnal Al-Huda, vol.2 No. 4, 2001 dan *Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Al-Qur'an* (Jurnal Ulumul Qur'an, vol 1, 1990/1410 H), akan tetapi semua pustaka tersebut belum satupun terfokus pada pembahasan secara akademis terhadap pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Sadr secara rinci dan komprehensif.

V. Kerangka Teori

Penelitian tentang seorang tokoh dapat dijelaskan dengan berbagai kerangka teori yang mengacu pada fokus penelitian dan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam penelitian ini digunakan suatu kerangka teori yang bersifat makro(*kulliy*) yang secara sederhana dapat dirumuskan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut : ¹¹

1. Pemikiran merupakan suatu pergulatan kreatif di kalangan manusia, dalam hal ini pemikir, dengan mengarahkan daya berpikir dan menggunakan cara berpikir tertentu. Hal ini merupakan refleksi kepedulian terhadap sesuatu yang dipandang penting dalam dan bagi kehidupan manusia.
2. Produk pemikiran mengacu pada aspek normativ dan aspek empirik yang dibingkai oleh kerangka acuan (*frame of reference*) yang digunakan oleh pemikir. Aspek normativ mengacu pada keyakinan, nilai, norma, dan kaidah yang dianutnya. Sedangkan aspek empirik mengacu pada pengalaman, baik pengalaman dirinya, maupun pengalaman orang lain dan komunitasnya.
3. Corak pemikiran mencerminkan produk zamannya yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu, serta hal-hal yang berpengaruh pada kehidupan dalam ruang dan waktu tersebut. Dia merupakan sintesis antara tuntutan kesinambungan dan tuntutan perubahan.

¹¹ Rangkaian proposisi ini dikutip dari Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 48-49

4. Substansi pemikiran mencakup dimensi historis, dimensi situasi dan dimensi idealisme. Ia bersifat abstrak, olehnya itu menuntut penjabaran dan operasionalisasi.

VI. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan Pendekatan historis. Pendekatan normatif, dimaksudkan untuk melihat apa yang menjadi keyakinan, nilai, kaidah atau norma yang dianut seorang tokoh yang kemudian melahirkan karya-karya sebagai produk pemikirannya. Adapun pendekatan historis yang dimaksud disini adalah bagaimana melihat dan mempelajari sejarah hidup Muhammad Bāqir Ṣadr. Pendekatan ini ditujukan untuk meneliti kondisi sosial pada masa hidupnya. Pemikiran seorang tokoh tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial di sekitarnya.

Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk meneliti bagaimana kondisi kehidupan Muhammad Bāqir Ṣadr dalam kapasitasnya sebagai seorang pemikir yang tentunya mengalami tahap-tahap perkembangan pemikiran, apalagi beliau adalah seorang tokoh yang sangat dikenal di dunia Islam.

Metode yang digunakan dalam mencari data adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā* sebagai data primer, dan buku-buku sebagai karyanya yang lain atau komentar terhadapnya sebagai data sekunder.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam

pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr. Isi yang terkandung dalam pemikiran tersebut, kemudian dikelompokkan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi. Selain itu juga digunakan analisis semantik, karena dalam mengemukakan konsep pemikirannya, Muhammad Bāqir Ṣadr sering menggunakan istilah-istilah kunci yang memiliki makna tertentu.

VII. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan landasan metodologi yang tertuang dalam bab satu pendahuluan yang diawali dengan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, berisi pembahasan tentang biografi Muhammad Bāqir Ṣadr dan perjalanan pemikirannya yang terdiri dari tiga sub bab, yakni sketsa biografi Muhammad Bāqir Ṣadr, pengembaraan intelektual dan politiknya serta diakhiri dengan karya-karya pemikirannya.

Pada bab tiga, berisi pembahasan tentang tinjauan umum sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Islam yang terdiri dari tiga sub bab, yakni sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme, dan sistem ekonomi Islam.

Pada bab empat, berisi pembahasan tentang kritik Muhammad Bāqir Ṣadr terhadap ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang terdiri dari dua sub bab, yakni kritik terhadap ekonomi kapitalisme dan kritik terhadap ekonomi sosialisme.

Pada bab lima, berisi pembahasan tentang pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā* yang terdiri dari tujuh sub bab, yakni elemen dasar ekonomi, prinsip ekonomi, masalah ekonomi, distribusi, teori

distribusi pra produksi, teori distribusi pasca produksi, dan teori produksi dan peranan Negara dalam perekonomian.

Pada bab enam, berisi pembahasan tentang penutup dari seluruh rangkaian penelitian ini yang terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran/implikasi penelitian.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD BĀQIR ṢADR DAN PERJALANAN PEMIKIRANNYA

I. Sketsa Biografi Muhammad Bāqir Ṣadr

Muhammad Bāqir Ṣadr dilahirkan pada tanggal 25 *Zulqa'idah* 1353 H/1 Maret 1935 M di Kazimiyyah, Irak, keturunan dari sebuah keluarga terkemuka di dunia Syi'ah karena pendidikan mereka. Pada usia 4 tahun, Muhammad Bāqir Ṣadr kehilangan ayahnya, dan kemudian diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak laki-lakinya, Ismai'il yang juga seorang *mujtahid* kenamaan di Irak (*mujtahid* adalah seorang yang sangat alim yang telah mencapai tingkat tertinggi di kalangan teolog muslim).¹ Kakek buyutnya, Ṣadr al-Dīn al-Amili (w 1264/1847) dibesarkan di desa Ma'raka di Libanon Selatan, kemudian bermigrasi untuk belajar di Isfahan dan Najaf, tempat dia kelak dimakamkan. Kakek Muhammad Bāqir Ṣadr, Isma'il dilahirkan di Isfahan tahun 1258 H/1842, 22 tahun kemudian, tepatnya tahun 1280 H/1863 pindah ke Najaf, lantas ke Samarra', tempat dia dikatakan telah menggantikan *al-Mujaddid* Assirazi dalam *Hauzah* (lingkaran cendekiawan Syi'ah) setempat. Isma'il meninggal di Kazimiyyah tahun 1338 H/1919). Putranya, Haidar, ayah Muhammad Bāqir Ṣadr, dilahirkan di Samarra pada tahun 1309 H/1891, dan belajar di bawah bimbingan ayahnya dan ayatollah al-Ha'iri al-Yazdi di Karbala. Dia meninggal dunia di Kazimiyyah tahun 1356 H/1937, meninggalkan seorang isteri, dua orang putra dan seorang putri. Kendati dia seorang *marjā'* terkemuka, tampaknya dia meninggal dunia dalam

¹ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Falsafatunā*, alih bahasa M Nur Mufid Bin Ali, cet.I, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 11

keadaan miskin. Keluarganya, hingga lebih dari sebulan setelah sang ayah meninggal dunia, masih terus mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.²

Latar belakang keilmuan yang bersifat "internasional" ditambah kemiskinan relatif yang melingkupi kelahiran Muhammad Bāqir Ṣadr, merupakan dua elemen penting yang menentukan konteks pendidikannya. Kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga tersebut setelah meninggalnya Haydar Ṣadr sudah menghampiri Muhammad Bāqir Ṣadr ketika dia masih bayi. Sanak saudaranya kemudian mengurus pendidikannya, dan dia tumbuh di bawah pengawasan paman dari garis ibunya, Murtada al-Yasin, serta kakak tertuanya, Isma'il (1340 H/1921-1388 H/1968).³

Di Kazimiyah, Muhammad Bāqir Ṣadr bersekolah di sebuah sekolah dasar bernama *Muntada al-Nasyir*. Menurut laporan-laporan rekan sekolahnya, jauh-jauh hari dia sudah mengukuhkan diri sebagai subyek minat dan keingintahuan guru-gurunya. Sebegitu jauh sikap yang diambilnya, hingga beberapa murid berusaha meniru cara berjalan, berbicara dan perilakunya selama duduk di dalam kelas.⁴

Muhammad Bāqir Ṣadr yang nama lengkapnya adalah Muhammad Bāqir al-Sayyid Haidar ibn Isma'il al-Ṣadr, seorang sarjana, ulama, guru dan tokoh

² Biografi Ṣadr yang paling komprehensif dan otoritatif baca dalam tulisan K. Ha'iri, *Tarjamah hayāh al-Sayyid al-Syahid*, dalam Muhammad Bāqir Ṣadr, *Mabāhiṣ al-Uṣūl*, edisi Ha'iri, (t.t, Qum 1407/1987), hal. 11-20

³ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam*, alih bahasa Santi Indra Astuti, cet. I, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 22

⁴ K. Ha'iri, *Tarjamah*, hal. 44

politik, dilahirkan dari keluarga religius termashur yang telah melahirkan sejumlah tokoh kenamaan.⁵

Beliau menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya sejak usia kanak-kanak. Ketika berusia sepuluh tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain budaya Islam. Beliau mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang gurupun.⁶

Pada usia sebelas tahun, beliau mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *usūl 'ilm al-fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri dari al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas).⁷

Pada usia enam belas tahun, beliau pergi ke Najaf untuk menuntut ilmu dan pendidikan yang lebih baik dalam berbagai ilmu ke-Islaman. Sekitar empat tahun kemudian, beliau menulis sebuah ensiklopedi tentang *usul*, berjudul *Gāyah al-Fikr fi al-Usūl*.⁸

Ketika berusia dua puluh lima tahun, beliau mengajar *Bahs al-Khārij*. Pada saat itu beliau lebih mudah daripada banyak muridnya. Di samping itu beliau juga mengajar *fiqh*. Mungkin wajar disebutkan bahwa pada usia tiga puluh tahun beliau sudah menjadi *mujtahid*.⁹

⁵ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Falsafatunā*, hal. 11

⁶ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 10

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Muhammad Bāqir Ṣadr telah memberikan banyak sumbangan pada surat-surat kabar, majalah-majalah, jurnal-jurnal. Beliau menulis sejumlah buku terutama berkaitan dengan filsafat, ekonomi, sosiologi, teologi dan *fiqh* yang insya Allah akan penulis bahas pada sub bab berikutnya.

II. Pengembaraan Intelektual dan Politiknya

Pada pembahasan ini, penulis sengaja memadukan antara pengembaraan intelektual dan politik Muhammad Bāqir Ṣadr disebabkan keduanya berjalan seiring dalam kehidupannya, khususnya di saat terjadinya konfrontasi antara Najaf sebagai zona pendidikan dengan Bagdad sebagai pusat pemerintahan.

Publikasi *falsafatunā* dan *Iqtisādunā* melambungkannya sebagai teorisi terdepan dalam renaissance Islam.¹⁰ Sistem alternatif filosofis dan ekonomis dilengkapi oleh suatu bagian sosial dan institusional. Dalam *Falsafatunā* dan *Iqtisādunā*, folume penting ketiga dijanjikan ada, dan pada pola yang sama disebut sebagai *Mujtama'unā* (masyarakat Islami kita).¹¹ Walaupun demikian buku tersebut tidak pernah dipublikasikan

Pembahasan ini berkisar pada sebuah penyelidikan terhadap komponen-komponen renaissance intelektual Najaf dengan Muhammad Bāqir Ṣadr sebagai salah seorang tokoh dalam lingkaran pemikir-pemikir terkemuka. Hal lain yang cukup mengejutkan dari pembaruan ini adalah dimensi intelektual dan politiknya.

Gerakan Islam yang berbasis di Irak dapat ditelusuri melalui tiga tahap perkembangan intelektual dan politiknya. Pada dekade akhir 50-an, lingkaran-

¹⁰ *Ibid*, hal. 33

lingkaran religius Najaf bersifat reaktif secara esensial. Ketika *Falsafatunā* diterbitkan pada tahun 1959, peristiwa tersebut berbarengan dengan seruan-seruan kecemasan para ulama Najaf, termasuk Muhsin al-hakim dan paman Ṣadr, Murtdha al-Yasin, untuk menolak daya tarik Komunis. Diamnya para ulama hingga hari itu merupakan warisan pusaka dalam sejarah Irak abad 20. Saat terakhir para ulama telah mengalami oposisi politik aktif pada tahun 1923-1924, beberapa tahun setelah revolusi besar Irak tahun 1920. Kemudian pemimpin terkemuka Najaf dan Karbala diasingkan setelah berkonfrontasi dengan raja Faisal dan wakil pemerintahan Inggris yang memerintah Irak.¹²

Muhammad Bāqir Ṣadr, tumbuh di kota suci Najaf selatan di Irak yang tempat perpaduan antara rasa tidak percaya pada sistem yang dianggap korup dan rusak serta cenderung pada pengaruh dan dominasi Barat di satu pihak, juga semangat menyala-nyala dalam doktrin-doktrin radikal, terutama paham *ba'as* dan komunisme di pihak lain.¹³

Arus komunisme inilah yang paling dicemaskan oleh para ulama Najaf, senior Muhammad Bāqir Ṣadr, saat monarki digulingkan pada 1958. Akan tetapi, ternyata partai *ba'as*-lah yang terbukti menjadi musuh terburuk mereka. Muhammad Bāqir Ṣadr melawan daya tarik komunis dengan mencoba menguraikan sistem Islam rasional secara terperinci, termasuk topik-topik sulit seperti filsafat, perbankan, dan ekonomi. Daya tarik politiknya yang lebih

¹¹ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 5

¹² Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 32

¹³ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y.N et al, cet. I, (Bandung: Mizan, 1421/2001), h. 153-154

langsung ini dapat ditelusuri hingga awal dan pertengahan 1960, dalam lingkaran kecil ulama militan yang ternyata sangat berpengaruh di seluruh dunia *syi'ah* pada 1980-an. Dengan mulai berkuasanya partai *ba'as* pimpinan Ahmad Hasan al-Bakr dan Saddam Hussein pada musim panas 1968, dunia pendidikan agama dan ulama yang relatif tertutup di Najaf itu diserang langsung oleh sistem raksasa yang meredam mutlak, yang terpadu dengan meningkatnya "pen-sunnian" dari rezim di Bagdad.¹⁴

Dalam konfrontasi yang kini terbuka, yang berakhir dengan kematian Muhammad Bāqir Ṣadr dan penghancuran seluruh bentuk aktifitas keduniawian di Najaf, sebuah rangkaian pukulan, demonstrasi, penangkapan dan tekanan meningkatkan ketegangan hingga titik akhir. Dalam ingatan kelompok *protagonist*, letupan pertama datang dalam bentuk sebuah konfrontasi antara Najaf dan Bagdad menyangkut pendirian sebuah universitas di Kufah. Proyek universitas tersebut kala itu menjadi bagian dari ekspansi besar di Irak dalam sistem pendidikan dan pekerjaan aktif untuk menghapuskan buta huruf serta pembangunan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Para pemimpin Najaf, yang memandang sebuah pendirian universitas di kawasan tetangga kota Kufah yang bersjarah sebagai sebuah kesempatan berharga. Akan tetapi pemerintah *ba'as* berpandangan sebaliknya. Penundaan/hambatan administrasi dalam proyek tersebut diiringi oleh peningkatan kendali aktifitas politik di seluruh negeri. Meninjau masa lalu, sangat jelas jika pemerintahan pusat, yakni Ahmad Hasan al-Bakr dan Sadam Hussein tidak dapat mentoleransi sebuah proyek yang

¹⁴ *Ibid*

memerlukan kontrol yang ketat oleh aparat-aparat. Inilah jalan dari sebuah pemerintah yang *represif*.¹⁵

Dari tahun 1970 di Najaf mulai timbul perlawanan menentang pemerintah Irak. Muhammad Bāqir Ṣadr ditangkap beberapa kali, dan dijadikan sasaran interogasi serta perlakuan brutal. Pada kejadian serupa, bulan Juni 1979, ketika ia bersiap-siap untuk mengunjungi kepala sebuah delegasi guna menyapa Ayatullah Khomeini di Teheran, ia ditahan dan diharuskan menjalani tahanan rumah. Ia tetap berada dalam status tahanan rumah hingga dipindahkan ke Bagdad pada 5 April 1980. Tanggal tersebut bersamaan dengan serangan kedua terhadap pejabat-pejabat tinggi pemerintah dalam satu minggu. Pada 1 April 1980, Tariq Aziz, yang kemudian dikenal sebagai anggota *ba'as* terkemuka (namun belum menjadi menteri luar negeri pada saat itu) menjadi target serangan granat dalam kesempatan berpidato di Universitas *Wazariyyah* Bagdad. Suatu malam Najaf dikepung, dan Muhammad Bāqir Ṣadr dipindahkan ke Bagdad. Keterangan dari Najaf menyebutkan bahwa Muhammad Bāqir Ṣadr berhasil meloloskan diri dari penculikan dan penahanan kembali di bulan Juni atas upaya pertemuan massa yang diorganisir oleh Bint al-Hudā di Sahn (lapangan besar di depan masjid dan kebun Imam Ali di Najaf) dengan seruan-seruan "imam anda telah diculik". Kali ini pemerintah membungkam saudara perempuan Muhammad Bāqir Ṣadr itu dengan membawanya ke Bagdad dan mengsekusinya bersama Muhammad Bāqir Ṣadr. Jenazahnya dilaporkan telah dimakamkan saat fajar menjelang tanggal 9 April 1980 di hadapan sejumlah sanak saudara dari Najaf, karena itu

¹⁵ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal 35

diduga kematiannya terjadi sehari sebelumnya. Namun demikian, banyak pertanyaan yang tetap belum terjawab atas kematian Muhammad Bāqir Ṣadr tersebut.¹⁶

Dengan demikian, maka berakhirlah konfrontasi dalam tubuh Irak antara Najaf dan Bagdad. Pembunuhan tersebut sekaligus juga merupakan titik penentu bagi perjuangan yang diperbarui yang kini telah meluas ke seluruh tahap Timur Tengah. Di Lebanon, Kuwait, Iran, Pakistan, India, Sudan pada dekade berikutnya berjatuh pula korban-korban perang antara teman-teman Muhammad Bāqir Ṣadr dengan pendukung-pendukung Saddam Hussein.¹⁷

Dalam level yang lebih global, konfrontasi itu berubah menjadi *armagedon*, sebagaimana pemerintah *ba'as* datang pada saat perang Irak-Iran yang dimulai dengan invasi Iran lima bulan kemudian., tanggal 22 September 1980. Kemudian disusul invasi Kuwait, dan dalam kebangkitan Irak, *intifadah* Irak bulan Maret 1991, foto-foto Muhammad Bāqir Ṣadr diarak di kota-kota Selatan selama beberapa waktu ketika mereka dibebaskan dari peraturan-peraturan keras.¹⁸

Apakah sejarah akan berulang kembali? Hanya waktu yang dapat mengatakannya. Namun kebangkitan gerakan Islam di Irak, Iran, dan Lebanon tidak dapat dipadamkan tanpa jaringan kerja yang ditumbuhkan dan dikembangkan dari kota Najaf. Sekilas pandangan terhadap tokoh-tokoh gerakan

¹⁶ *Ibid*, hal.36

¹⁷ *Ibid*, hal. 37

¹⁸ *Ibid*

paling terkemuka di akhir tahun 70-an dan 80-an akan memperlihatkan bahwa tanpa pengecualian, mereka belajar, bermukim atau mengunjungi kolega-kolega mereka di Najaf.¹⁹

Dengan sebuah jaring laba-laba hubungan institusional dan pribadi yang demikian kompleks yang telah dirajut di Kota Irak, berbagai perkembangan di Timur Tengah sejak seorang penduduk Najaf paling terkemuka, Ruhullah al-Khomeini, tampil berkuasa di Iran, secara langsung atau tidak, ia adalah cetakan Najaf. Perkembangan-perkembangan Irak, Lebanon dan Iran, seperti halnya kemajuan-kemajuan internasional yang datang menyertai kebangkitan penguatan Republik Islam, dipengaruhi oleh warisan jaringan kerja tersebut.²⁰

Ringkasnya, semua ini adalah latar belakang politis dari renaissans di Najaf. Sejak dari episode Universitas Kufah, rangkaian adegan konfrontasi telah berubah menjadi globalisme. Karakter universal dari tantangan politik Islam yang bermula dari Najaf bagaimanapun tidak akan pernah ada, tanpa dimensi budaya dan intelektual yang dibawanya. Di tengah-tengah peristiwa dramatis yang meningkatkan dugaan pencapaian global, sangat penting untuk diingat bahwa renaissans Najaf adalah fenomena intelektual yang melibatkan para *fuqahā*. Yang berada di tengah-tengah pembaruan kultural dan pembentukan sistem tersebut tidak lain adalah "Syi'ah Internasional" itu sendiri yang merupakan produk dari jaringan kerja-jaringan kerja Najaf. Dari Najaf inilah Muhammad Bāqir Ṣadr muncul sehingga Ruhullah Khomeini menyebutnya sebagai "*the prize of Islamic*

¹⁹ *Ibid*, hal. 38

²⁰ *Ibid*

university" (medali universitas-universitas Islam) pada saat wafatnya oleh eksekusi partai *ba'as* bulan April 1980.

III. Karya-Karya Pemikirannya

Karya Muhammad Bāqir Ṣadr mungkin merupakan karya paling beragam untuk seorang penulis muslim pada abad 20. Muhammad Bāqir Ṣadr menulis buku-buku tentang filsafat, tafsir al-Quran, logika, pendidikan, hukum undang-undang, ekonomi, perbankan tanpa bunga, serta karya tradisional lain tentang *usūl fiqh* (prinsip fiqh Islam), kumpulan ritual ibadah, komentar tentang shalat, dan penyelidikan historis tentang awal kontroversi *sunni-syi'ah*.²¹

Menjadi seorang pemikir inovatif dalam masalah struktur dan bentuk masyarakat muslim yang diinginkan, karyanya yang terpenting, yang membuatnya terkenal pada awal karirnya, adalah buku tentang ekonomi Islam, yang diterbitkan dua jilid pada 1959-1961. Buku tersebut adalah *Iqtisādunā* (ekonomi kita), mungkin adalah kajian abad 20 yang paling ilmiah tentang ekonomi Islam sebagai sistem ideologi alternatif bagi kapitalisme dan sosialisme/komunisme.²²

Dalam *Iqtisādunā*, secara metodis, Muhammad Bāqir Ṣadr mengakui bahwa tidak ada disiplin ilmiah dalam Islam yang dapat diidentifikasi sebagai ilmu ekonomi dan bahwa unsur-unsur utama dalam pendekatannya terhadap ekonomi Islam harus diturunkan dari "superstruktur hukum".²³ Proses dan

²¹ John L. Esposito, *Ensiklopedi*, hal. 151

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

hasilnya berujung pada penggunaan *ijtihad*, yang dipahami oleh Muhammad Bāqir Ṣadr dalam definisi lebih luas, yakni sebagai usaha intelektual dalam memasuki hukum dan *fiqh* Islam klasik, dan karena itu, diakui sebagai usaha yang dapat terkena kesalahan manusia. Bagi Muhammad Bāqir Ṣadr, "ekonomi Islam bukanlah ilmu"²⁴ dan hanya dapat berdiri sebagai disiplin yang orisinal serta serius jika telah mengalami proses penemuan hukum yang panjang. Hanya setelah penelitian inilah orang dapat berbicara tentang disiplin ekonomi Islam orisinal. Dalam ilmu ini, peraturan moral diturunkan dari hukum yang jelas. Akan tetapi dalam ilmu ini pula terdapat penyelidikan ilmiah panjang yang sulit ke dalam kekayaan tradisi *fiqh* klasik.²⁵

Dari sudut pandang substantif, Muhammad Bāqir Ṣadr memperkenalkan dalam *Iqtisādunā* kritik terperinci terhadap sosialisme marx dan kapitalisme Barat sebelum memulai presentasi sistem alternatifnya. Karena ideologi komunis sedang kuat di Irak pada saat *Iqtisādunā* disusun, maka buku ini lebih banyak berisi pembuktian kesalahan berbagai merek sosialisme Marx. Adapun terhadap kapitalisme, argumen Muhammad Bāqir Ṣadr bersandar pada kritik umum tentang kegagalan konsep kebebasan jika diterapkan pada pihak-pihak yang tidak setara dalam pertukaran ekonomi. Terhadap sosialisme, Muhammad Bāqir Ṣadr mengembangkan argumen panjang lebar yang informatif, menunjukkan kesalahan dalam periodisasi Marxis tentang sejarah, penekanannya yang terlalu besar pada perjuangan kelas, dan rumusannya yang tidak realistis terhadap naluri dasar umat

²⁴ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Islam and Schools of Economics*, (Karachi-Pakistan: Islamic Seminary Publications, 1985), hal. 15

²⁵ John L. Esposito, *Ensiklopedi*, hal, 152

manusia untuk kepentingan sendiri yang bersifat ekonomis. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah disiplin yang diperkenalkan oleh serangkaian prinsip yang sebagian besar bersifat metodologis yang dilanjutkan oleh penulisnya dengan pemahaman konsep kepemilikan yang menganjurkan sentralisasi pemerintahan (misalnya melibatkan intervensi Negara), dan pada umumnya *egalitarian* dalam konteks *agricultural*.²⁶

Tanpa membahas tentang kerumitan teori kepemilikannya, tesis Muhammad Bāqir Ṣadr dapat dihadirkan sebagai seruan bagi intervensi sistematis Negara untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah bergantung langsung pada pekerja yang bekerja pada tanah itu. Konsep sentral perburuhan dalam *Iqtisāduna* membutuhkan cara kerja seorang pemimpin (yang disebut *waliy al-'amr*) yang menjunjung kebijakan intervensi dan kesejahteraan rakyat dengan memadukan dua alat untuk mewujudkan keseimbangan sosial, yaitu pertama adalah panduan prinsip hukum kepemilikan yang menguatkan kepemilikan tanah dan sarana produksi dengan buruh. Alat kedua adalah kebutuhan, dan menurut Muhammad Bāqir Ṣadr, Negara bebas mengisi bidang-bidang kosong dengan tindakan yang memadai untuk meredam "eksploitasi manusia oleh manusia". Inilah bahasa yang digunakan oleh Muhammad Bāqir Ṣadr menjelang revolusi Iran 20 tahun kemudian.²⁷

Di luar prinsip umum ini, Muhammad Bāqir Ṣadr mengembangkan secara terperinci aturan panduan kepemilikan dalam kerangka yang dia sebut dengan distribusi yang mendahului produksi. Dalam fase ini, maupun dalam proses

²⁶ *Ibid*

produksinya sendiri, dimensi *Iqtisādunā* yang paling orisinal muncul dalam metode penemuan ekonomi Islam. Dengan mengutip tradisi *fiqh* dari *fuqahā* klasik, Muhammad Bāqir Ṣadr menangani bidang ini dengan penyelidikan yang paling serius dibanding dengan seluruh penulis muslim abad 20 dengan mendasarkannya pada kitab hukum dari tradisi hukum yang berusia satu millennium.²⁸

Hukum klasik juga merupakan jalan Muhammad Bāqir Ṣadr menuju pembahasan panjang mengenai perbankan Islam. Disini dia menjadi perintis dalam bidang yang telah menjadi satu dekade setelah *al-bank al-lā ribawiy fī al-Islām* (bank tanpa bunga) diterbitkan pada tahun 1969 bergaya dan kontroversial. Keuangan Islam dipremiskan dengan interpretasi tentang larangan riba (kata yang berarti "bunga" bagi Muhammad Bāqir Ṣadr), yang menyebabkan bank-bank Islam menciptakan operasi yang membolehkan deposan mengakses dana bank, sebagai balasan dari bank setelah mengumpulkan sumber-sumber daya ini untuk operasi investasi yang tidak memiliki tingkat perolehan yang tetap atau ditentukan sebelumnya.²⁹

Masih sangat banyak karya pemikiran Muhammad Bāqir Ṣadr, antara lain sumbangannya kepada surat-surat kabar dan jurnal-jurnal serta buku-buku yang penulis belum kemukakan sebelumnya, yakni *al-Fatāwa al-Wadīhah* (fatwa-fatawa yang jelas), *Manhaj al-Sālihīn* (jalan orang-orang saleh), buku ini

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

mencerminkan pandangan modern tentang *masā'il, al-madrasah al-Islāmiyyah* (Mazhab Islam), *Gāyah al-Fikr al-Usūl* (Pemikiran puncak dalam Usul), *Ta'liqat 'ala al-Asfar* (ulasan tentang empat kitab perjalanan Mulla sadra), *Manābi' al-Qudrah fi Daulah al-Islām* (sumber-sumber kekuasaan dalam Negara Islam), penulis menyatakan bahwa dalam buku ini suatu Negara Islam harus didirikan menurut *syari'ah*, sebab hal ini adalah satu-satunya jalan untuk menjamin hukum Allah di bumi, *al-Insān al-Mu'āsir wa al-Musykilah al-Ijtimā'iyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial), *Durūs fi 'Ilm al-Usūl* (Kuliah tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam), *al-Mursil wa al-Rasūl wa al-Risālah* (Yang mengutus, Rasul dan Risalah), *Ahkām al-Hāj* (Hukum-Hukum Haji) *al-Usūl al-Mantiqiyyah li al-Istiqrā'* (Asas-Asas Logika dalam Induksi) dan *Falāsafatunā* (Filsafat kita).³⁰



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁰ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Falsafatunā*, hal. 14

BAB III

TINJAUAN UMUM ATAS EKONOMI KAPITALISME, SOSIALISME, DAN ISLAM

Sebelum penulis mengemukakan tentang bagaimana kritik Muhammad Bāqir Sadr terhadap ekonomi kapitalisme dan sosialisme, serta bagaimana pemikirannya tentang ekonomi Islam, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang bagaimana ekonomi kapitalisme, sosialisme dan Islam itu sendiri dengan tujuan agar kita mengetahui terlebih dahulu atau paling tidak memperoleh gambaran secara umum tentang ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang menjadi obyek kritikan dari tokoh yang menjadi titik sentral analisis pada penelitian ini, yakni Muhammad Bāqir Sadr. Kita tidak akan mengetahui secara jelas apa ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Islam, jika konsep tentang hal itu secara umum tidak diketahui.

I. *Ekonomi Kapitalisme*

A. Lahirnya Kapitalisme

'Kapitalisme dapat dipandang sebagai konsep pemikiran, sebagai tahapan sejarah, dan sebagai suatu paham yang secara terang-terangan diperjuangkan dan ditentang'.¹

Dalam *Encyclopedia Britannica*, kapital diartikan dengan kekayaan yang digunakan dalam memproduksi lebih banyak kekayaan dan kapitalisme itu sendiri adalah sistem yang mengarahkan "proses itu".²

¹ M. Dawan Raharjo, "Kapitalisme Dulu dan Sekarang", kata pengantar dalam *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. X

Sebagai suatu pemikiran, kapitalisme digagas pertama kali oleh Adam Smith dan David Ricardo. Mereka inilah yang pertama kali mempermasalahkan dan merumuskan sistem masyarakat kapitalis, dengan menteorisasikan apa yang kemudian dikenal dengan teori nilai kerja (*theory of labour value*). Rumusan ini kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan Friederich Engels, dengan elaborasinya mengenai teori nilai lebih (*theory of surplus value*), dan konsep cara produksi (*mode of production*).³

Sebagai fenomena sejarah (*historical phenomenon*), Berger mengatakan bahwa kapitalisme adalah sebuah konsep, karena fenomena tersebut tumbuh dalam jangka waktu yang lama dan para sejarawan masih berbeda pendapat tentang kapan fenomena tersebut dapat dikatakan ada.⁴

Sesungguhnya secara historis, perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme, dimana gerakan ini menimbulkan dampak dalam bidang lain, seperti dalam bidang keagamaan yang menimbulkan reformasi, dalam bidang penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam, dan dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial, serta dalam ilmu ekonomi melahirkan kapitalisme itu sendiri.⁵

² Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam*, (Comparative Study), edisi. I, (Lahore-Pakistan: Asraf Press, 1947), hal. 1

³ Bonni Setiawan, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 17.

⁴ Peter I Berger, *Revolusi Kapitalis*, alih bahasa Muh. Oemar, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 18-19

⁵ William Eberstein dkk, *Isme-Isme Dewasa Ini*, alih bahasa Alex Jemadu, edisi. IX, (Jakarta: Erlangga Press, 1994), hal. 148

Werner Sombart dalam bukunya *Des Moderne Kapitalismus*,⁶ yang versi pertamanya telah diterbitkan pada tahun 1902, mengatakan bahwa kapitalisme mempunyai tiga aspek yaitu : semangat, bentuk dan teknologi. Semangat itu diimplementasikan pada hasrat memiliki, persaingan dan rasionalitas. Bagi Weber, semangat "keserakahan tidak terbatas" tidak ada sama sekali kaitannya dengan Kapitalisme, bahkan Kapitalisme sering identik dengan sikap menahan diri dan sikap atau tempramen yang terkendali. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kapitalisme identik dengan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan usaha kapitalis yang rasional dan berkelanjutan. Lebih lanjut dia mendefinisikan "tindakan kapitalistis" sebagai usaha yang bertumpu pada harapan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan pertukaran atau perdagangan.⁷ Menurut Weber keadaannya haruslah demikian, sebab dalam suatu tata masyarakat yang sama sekali kapitalistis, perusahaan kapitalistis individual yang tidak dapat memanfaatkan kesempatannya untuk menciptakan keuntungan, akan membentur kematian.⁸

Adanya keyakinan kita akan eksistensi Kapitalisme seperti itu diarahkan tidak hanya oleh keabsahannya tetapi juga oleh kepentingan historis. Maka dimanapun tidak ada kenyataan sejarah dan kultural diungkapkan dengan lebih jelas, dibandingkan konsep lompatan Barat tentang sejarah kapitalisme. Adapun

⁶ Robert W. Green, *Protestantism and Capitalism*, The Weber Thesis and His Critics (D.C Heat And Company, New York) hal. VII.

⁷ Werner Sombart, "Capitalism", dimuat dalam *Encyclopedia of the Sosial Sciences*, vol. 3-4. hal 196.

⁸ Max Weber, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, (Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York; 1958), hal 17.

konsep Fanfani mengenai ciri-ciri pokok Kapitalisme berasal dari sejarah Eropa, dan ini muncul dikota-kota Italia ada abad ke 14, jika tidak lebih awal, dan tempat-tempat lain di Eropa. Maka G. Well berkata bahwa Kapitalisme adalah "sesuatu yang tidak dapat didefinisikan (selanjutnya mengalami dinamisasi tersendiri dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan sejarah dan perdebatan dalam memahami dan menginterpretasikannya terus berlangsung hingga sekarang) tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem kapitalisme yang berarti suatu kompleks kebiasaan tradisional, perolehan energi yang tidak terkendalkan dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup.⁹ Pernyataan ini diperkuat oleh Sayed Nawab Haidar Naqvi yang penulis kutip dari bukunya *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*¹⁰ menjelaskan bahwa Kapitalisme diartikan "suatu pencarian kekayaan yang ngotot dan tidak terbatas melalui industrialisasi yang tak kenal lelah, pembatasan yang kaku atas pembelanjaan untuk konsumsi pribadi atau sosial, pemusatan waktu untuk mengurus usaha pribadi, eksploitasi yang sistematis dan tanpa ampun terhadap buruh. Namun dalam memberikan batasan tentang kapitalisme, para sosiolog dan sejarawan mengatakan: "Pada hakikatnya semua orang sepakat (dari sekian banyak definisi tentang kapitalisme) bahwa Kapitalisme adalah suatu sistem yang menganggap modal adalah utama, tenaga kerja bebas, disertai dengan persaingan yang tidak

⁹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 310

¹⁰ Sayed Nawab Baqir Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, Alih Bahasa Husin Anis, (Bandung; Mizan, 1985) hal. 13.

Perjanjian tersebut mengakhiri perang tiga puluh tahun (antara Katholik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan negara mereka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan gereja Katholik Roma. Inilah awal munculnya *sekularisme*, sejak itu aturan main kehidupan dipisahkan dari gereja (yang menurut mereka wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan rakyatnya sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupan, sementara Tuhan (agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja (hubungan manusia dengan Tuhan). Sehingga prinsip dasar sekuler tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat peraturan/hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa/apa wewenang pembuat aturan yang menjamin terciptanya kehidupan yang damai, tentram, dan stabil. Kenyataannya Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai pada masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara prinsip patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat oleh raja, tanpa melibatkan diri dalam proses politik (*decision making*), dan ternyata raja selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya secara adil dan menyeluruh.

Sedangkan An-Nabhani dalam bukunya *Nizom Al-Islam* menerangkan bahwa penamaan idiologi ini dengan nama kapitalisme, berawal dari kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia yang menjadikan agama sebagai alat pemeras, penganiaya dan penghisap darah rakyat. Sementara para pemuka agama pada

¹³ *Ibid.* hal.18

waktu itu dijadikan sebagai perisai untuk memenuhi keinginan mereka. Dari kondisi seperti itu, maka selanjutnya menimbulkan pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan yang mana sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak sedangkan sebagian lagi mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar agama dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan lebih cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang selanjutnya menghasilkan usaha pemisahan agama dan dunia. Disepakati juga pendapat untuk tidak mempersoalkan agama, dilihat dari apakah diakui/ditolak, sebab yang menjadi masalah adalah agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia.¹⁴

Walaupun demikian, kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hanya sebuah "isme" biasa atau sebuah pemikiran filsafat belaka, bahkan tidak bisa juga hanya dikatakan sebuah teori ekonomi, akan tetapi kapitalisme telah menjadi sebuah ideologi dunia yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh dan sistemik.¹⁵ Lebih lanjut Lester C. Thurow dalam bukunya :¹⁶

¹⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Nizām Al-Islām*, Cet. V, (Beirut; Libanon: Daarul Ummah, 1953), hal. 25.

¹⁵ Para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme merupakan sebuah "revolusi" yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini Kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi; Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada bagaiinterakhir abad pertengahan dan kemudian mencerminkan suatu "gaya hidup". Selanjutnya baca dalam Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme, Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung; Remaja Karya, 1986), hal. 33.

¹⁶ Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, (London: Nicholas Brearley Publishing, 1996), hal. 17

"Since the omzet of industrial revolution, when succes come to be difined as rising material standards of living, no economic system other than capitalism has been made to work any where. No one know how to run successful economics on any other principles. The market, and the market alone, rules and no one doubts it. Capitalism alone taps into modern beliefs about individuality and exploits what some would consider the basic human motives, greed and self-interest, to produce rising standards of liveng. When it comes to creating to the wants, and desires of every individual, no matter".

Pada dasarnya memperoleh ilustrasi tentang manifestasi kapitalisme sangatlah diperlukan menurut interpretasi berbagai pengamat, walaupun mereka berbeda dalam teori. Seperti : Mandel yang melihat kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Hal ini berbeda dengan pandangan lain yang membagi tahapan kapitalisme dari "kapitalisme kompetitif" menuju "kapitalisme monopoli", maka Mandel melihat perubahan-perubahan dari sistem kapitalisme dari gerak kapital dan perwujudan akumulasi kapital yang kini, pada tahap kapitalisme mutahir, menurutnya dikendalikan melalui sistem perusahaan multinasional.¹⁷

Namun pada dasarnya sejarah kapitalisme itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Michel Beand, tidak hanya mengandung kapasitas destruktif tetapi juga sebagaimana yang terjadi di Indonesia selama lima belas tahun terakhir, di Eropa dan Amerika Utara, di Jepang dan Korea Selatan atau Singapura telah mendemonstrasikan kapasitas kreatifnya, tidak saja dalam menyediakan kebutuhan material dan kenyamanan, tetapi juga dalam mendinamisasikan kondisi kebudayaan dan spiritual.

Sebagai contoh di Indonesia, setelah diterapkan kebijakan pemerintah dengan paket regulasi perbankan yang telah berlangsung sejak tahun 1983 dan

¹⁷ M. Dawan Raharjo (Ed.), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (Jakarta; LP3ES, 1987), hal. XI

dilanjutkan dengan lebih intens lagi dari tahun 1988 sampai 1991, telah menghasilkan apa yang disebut pendalaman finansial. Pendalaman finansial ini biasanya dihitung secara kuantitatif dengan membagi uang yang beredar dalam arti luas dengan PDB dari tahun 1978-1991 telah terjadi peningkatan pendalaman finansial yaitu dari tahun 1978 rasio antara uang beredar (dalam arti luas) terhadap PDB hanya 15,7%, sedangkan pada tahun 1991 meningkat menjadi 43,6%.¹⁸

Gambaran besarnya peningkatan jumlah uang yang beredar di Indonesia akibat deregulasi tersebut, pada tahun 1983 yaitu sebanyak Rp 7.569 Milyar, tahun 1995 meningkat menjadi Rp 52.677 Milyar, sehingga rata-rata tiap tahun dalam periode tersebut telah terjadi peningkatan uang yang beredar sebesar Rp. 17,55%. Adapun pengaruh kebijakan deregulasi di sektor perbankan yang paling dominan terhadap jumlah uang yang beredar pada tahun 1989, meningkat sebesar 39,52%, pada tahun 1992 sebanyak 28,779 Milyar, sehingga dalam tiga tahun terakhir sejak 1992-1995 telah terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar sebesar 23,848 Milyar atau 83,04%. Maka secara institusional lembaga perbankan tersebut juga meningkat menjadi 5.739 kantor bank pada pertengahan tahun 1993.¹⁹

Andre Gunder Frank dalam *Journal of International Study* mendiskripsikan bahwa 30 negara maju di Barat yang berpenduduk kurang dari 20% penduduk dunia pada tahun 2000 akan menguasai 90 pendapatan dunia,

¹⁸ Sjahrir, *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*,), cet. V, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hal. 95.

¹⁹ *Ibid*, hal. 96-97.

sumber keuangan, produksi baja, produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan 8 negara diantaranya menguasai 80% produk manufaktur dunia. Rinciannya adalah Jerman 21%, AS 17%, Jepang 14%, Inggris, Perancis, Italy masing-masing 80% dan Kanada 40%. Menurut prediksi Bank Dunia, total pendapatan dunia tahun 2002 mencapai 45 triliun US Dollar, dengan kenaikan rata-rata 213 Milyar US Dollar. Dari jumlah itu 66% diraih oleh negara maju Blok Utara, sementara Blok Selatan malah akan merugi 1,9 Milyar US Dollar.²⁰

Sesungguhnya jika suatu paham ingin dikatakan memiliki ciri kapitalisme adalah²¹ : a) menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan "keinginan" individu sebagai sesuatu yang penting untuk kesejahteraan manusia; b) menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi, memiliki dan mengatur kepemilikan pribadi sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu;²² c) mengasumsikan inisiatif individu bersama dengan *tace decesion* (pengambilan keputusan) yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum pengalokasian sumber daya; d) tidak mengakui perlunya

²⁰ Ismail Yusnanto, *Islam Ideologi – Refleksi Cendekiawan Muda*, cet. I, (Alizzah, Bangil, 1998), hal.175

²¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), hal. 18.

²² Oleh sebab itu kapitalisme menjadi sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Ini diakibatkan karena "hukum-hukum" ekonomi pasar seperti hukum-hukum fisika yang absah secara obyektif, maka keberhasilan atau kegagalannya tidak seyogyanya dinilai dengan kekurangan dan kemiskinan bagi mereka yang ketinggalan dalam perjuangan demi kelangsungan hidup. Lebih jauh setiap orang adalah hakim yang terbaik untuk kepentingannya sendiri dan jika dibiarkan sendirian, tidak hanya akan menjadikan dirinya baik tetapi juga dalam jangka panjang akan menjadikan baik semua

peranan penting pemerintah atau pertimbangan-pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi dan e) mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis memenuhi kepentingan sosial.

Hal ini berarti pencarian keuntungan sendiri tersebut secara alamiah, akan selalu mendorongnya untuk lebih memilih lapangan kerja yang paling "menguntungkan bagi masyarakat", tetapi dengan mengarahkan industri seperti ini mungkin hasilnya memiliki nilai terbesar, seperti dalam banyak hal lain sistem ini dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat untuk mendorong tujuan yang bukan merupakan bagian dari maksudnya, namun tidak juga selalu merupakan keburukan bagi masyarakat karena masyarakat bukan bagian dari maksudnya itu. Jadi dengan memburu kepentingannya sendiri berarti mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan bila sungguh-sungguh bermaksud mendorongnya.

Walupun kemudian istilah itu oleh para ahli teori sosial dianggap sebagai isme atau sistem pemikiran, namun kapitalisme²³ bukanlah suatu paham yang dipropagandakan oleh orang-orang yang dianggap pendukungnya. Bahkan pada awal abad XX, ketika kapitalisme sebagai suatu tahapan perkembangan, namun ekonom terkemuka seperti: Charles Gide, Canwas, Marshall, Seligman atau

orang. Untuk lebih jelasnya baca dalam Umer Chapra, dalam *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hal.37.

²³ Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, dimana kapitalisme mempunyai kegagalannya pada masa lampau dan kita harus mencegah hal tersebut terulang kembali, namun terlepas dari kekurangan-kekurangan itu bahwa kapitalisme talh menjadi sistem perekonomian "unggulan". Untuk lebih jelasnya baca bukunya Rich Devos, dalam *Compassionate Capitalism*, (Kapitalisme Dengan Kepedulian Sosial), (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 6.

Cassel – boleh dikatakan mengutuk/menganggapnya sebagai istilah terlarang yang tidak boleh dipakai dalam istilah ekonomi.²⁴ Sebab istilah "kapitalisme" mengandung arti yang berbeda dan bersumber dari berbagai teori, antara lain diartikan sebagai sistem pemikiran yang berprestasi netral; sebagai tahapan sejarah yang di alami oleh masyarakat; juga sebagai suatu paham yang diperjuangkan atau ditentang.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap keberadaan kapitalisme sebagai sistem ekonomi, maka penulis ingin mengkaji langsung aplikasi praktis tentang penerapan kapitalisme dengan mencontohkan penerapan di Amerika. Banyak ekonom menyebutkan bahwa puncak sentral pelaksanaan kapitalisme ada di Amerika, hal itu nampak pada perusahaan yang bebas, persaingan dalam bisnis, menganggap gelar/derajat kebebasan adalah hak azazi dan meminimalisir campur tangan pemerintah dalam bisnis pribadi, kemajuan mereka dalam hal ini karena mengacu pada teori dan kebijakan *laissez faire/laissez passer*.²⁵

Adam Smith sebagai pelopor/tokoh aliran kapitalisme ini, dalam bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nation*" beranggapan bahwa segala sesuatu merupakan perintah alam, kaitannya dengan konsep *laissez faire* kapitalisme, dimana pemerintah seharusnya menerapkan hukum yang netral yaitu dengan memiliki rasa hormat terhadap alam dalam menjalankan produksi

²⁴ M. Dawam Raharjo, (Ed), *Kapitalisme*, hal. IX.

²⁵ James Harvei Dodd, C. W. Hasek, *Economic Principles and Applikation*, South Western, (New York; Publishing Company, 1948), hal. 41. menurut J. Barkley Rosser, Jr., Marina V. Rosser, dalam bukunya *Comparative Economic In A Transforming World Economy*, pada hal.14, mengatakan yang dimaksud dengan terminologi *laissez faire* adalah pandangan yang menyatakan minimnya intervensi pemerintah dan dalam istilah Francis diartikan dengan "biarkanlah mereka melakukan itu"

dan bisnis. Bisnis seharusnya diikuti dengan aturan itu sendiri; menurut hukum alam.²⁶ Walaupun telah begitu banyak mengalami perubahan, ternyata teori Smith-lah yang sampai kini mendasari perkembangan ilmu ekonomi liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya kapitalisme yang telah mulai berjangkit sejak revolusi industri dan makin berkembang dengan pertemuan-pertemuan Smith pada suatu masa dalam sejarahnya telah melahirkan "anak haram"-nya yang kemudian memberontak. Meskipun benih nilai-nilai filsafatnya berasal dari masa pemunculan yang sezaman, "anak haram" yang memberontak dalam wujud komunisme itu dapat muncul setelah kapitalisme merajalela di mana-mana menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada masyarakat buruh yang diperas dan dihisap. Sementara Karl Marx, si bidan yang di "nabi"-kan oleh pengikutnya pada masa selanjutnya menulis tentang kapitalisme, mengupas dan meramal keruntuhan sistem tersebut dalam bukunya "*Das Kapital*". Namun kapitalisme tidak segera mati seperti yang diramalkan Marx, tetapi justru

²⁶ *Ibid.* selanjutnya tulis Adam Smith "Setiap individu", secara kontinyu mendorong dirinya untuk mencari lapangan kerja yang paling menguntungkan untuk mendapatkan berapapun kapital yang dapat ia kuasai, yang dicari adalah keuntungan untuk diri sendiri bukan keuntungan masyarakat. Tetapi pencarian keuntungan sendiri tersebut secara alamiah atau selalu menggiringnya untuk memilih lapangan kerja yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Dan hal ini dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat yang mendorong suatu tujuan yang bukan bagian dari maksudnya. Tetapi tidak juga selalu merupakan keburukan bagi masyarakat bahwa masyarakat bukan bagian dari maksudnya itu. Dengan memburu kepentingannya sendiri ia seringkali mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif ketimbang bila ia sungguh-sungguh bermaksud mendorongnya". Lebih jauh lagi baca buku Shaikh Mahmud Ahmad dalam *Economics Of Islam*, hal. 4. Lebih lanjut Adam Smith dalam bukunya tersebut mengatakan bahwa: "bukan berkat kemurahan hati tukang daging, tukang pembuat bir atau tukang roti kita dapat makan siang, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa kemanusiaan mereka melainkan cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan jangankah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka" (baca: dalam Robert L. Heilbroner, *Tokoh-tokoh besar Pemikir Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 1982).

pemikiran Marx sendiri tentang komunisme memunculkan kekuatan baru yang tidak kalah besarnya dari kapitalisme.²⁷

Tetapi sikap pemerintah Amerika terhadap bisnis tidak pernah pasif, yang mana selama kurang lebih tiga kwartal/abad setelah pembuatan konstitusi (undang-undang) pemerintah harus aktif dalam mempromosikan perusahaan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi bantuan finansial yang bertujuan untuk membangun barak-barak, jalan kereta api, sambungan komunikasi dan mendirikan bank-bank; bantuan untuk pertanian dalam berbagai bentuk serta meningkatkan tarap industri maju, mereka mendorong penciptaan keuntungan dan itu juga berarti kemajuan bagi kesejahteraan umum.

Walaupun demikian, Amerika, Swedia, Perancis dan Jepang mungkin belum dapat dikatakan sebagai penganut kapitalisme murni, sebab masih ada bagian-bagian yang kebijakannya diambil dengan ketentuan pemerintah, misalnya dalam hal pendapatan dari produksi dan distribusi, namun paling tidak Amerika bisa dikatakan negara yang paling dekat dan paling dominan dalam menerapkan ekonomi kapitalisme murni, tetapi tetap saja jauh dari model yang asli karena sangat besar tuntutan pemerintah terhadap barang dan jasa. Ekonomi Amerika juga memiliki kontrol melalui perusahaan raksasa yang ironisnya lebih banyak mengadakan kolusi dan koordinasi daripada berkompetisi.²⁸

²⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, alih bahasa A.M. Saefuddin, (Jakarta, Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986), hal. xii.

²⁸ Zimbalist, Andrew, Howard j. Sherm; Stuart Brown, *Comparing Economics System A Political-Economic Approach*, 2 Edition, (Harcourt Brace Jovanovindi Sandiago, 1989), hal. 3.

Lebih jauh lagi Amerika yang merupakan pendekar utama negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini, telah menjadi korban dari sistem ekonominya sendiri. Hal itu bisa dibuktikan, bahwa separo dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki/dikuasai oleh hanya sebanyak 102 unit perusahaan industri raksasa saja (di mana kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dollar US).²⁹

Kenyataan itu barangkali menggambarkan ketidaknyamanan masyarakat Amerika, yang kaya, diusik ketentramannya. Mereka mengkhawatirkan derasnya investasi asing yang menjadikannya dijajah secara ekonomis. Awal dari itu semua bisa dilihat dari kebijakan Reagan sebagai penganut paham "*supply-side economics*", dia berpendapat bahwa cara yang paling tepat menggairahkan ekonomi adalah merangsang sisi produksi dan agar rakyat tergerak untuk memproduksi, maka pajak dikurangi. Tarif pajak tertinggi untuk orang-orang kaya diturunkan dari 70% menjadi 28%. Tetapi tragisnya, sisi pengeluaran ternyata gagal dilaksanakan/disesuaikan dengan penurunan sisi pendapatan (akibat penurunan pajak). Anggaran militer membengkak dan – sebagai akibatnya – AS mengalami defisit terbesar sepanjang sejarah.³⁰

Dan pada saat yang bersamaan, AS mengalami defisit perdagangan yang cukup parah, maka terjadilah kelangkaan dana dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Padahal, tabungan yang berhasil dihimpun tidak mencukupi

²⁹ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), hal.2.

³⁰ Hendro Basuki, Ekonomi Amerika dalam Pembinaan., *Suara Merdeka*, (No.XLI/14/VI/24 Februari 1993), hal. 4-9

akibat gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Pada saat itulah, modal dari luar masuk secara tiba-tiba akibatnya selama 10 tahun (1978-1988) arus masuk modal internasional berlipat hingga mencapai total 1,8 triliun dollar. Sedangkan total investasi AS dalam periode yang sama hanya 1,3 triliun dollar.

Dalam mengantisipasi persoalan ini, maka Clinton mencoba untuk menawarkan beberapa program ekonominya seperti:³¹ (1) peningkatan investasi, (2) disiplin dalam bidang moneter dan fiskal, (3) menciptakan daya saing yang tinggi dan liberalisasi, (4) kerja sama yang erat antara karyawan dan perusahaan serta (5) keterbukaan pasar dunia. Lebih lanjut Clinton mengimplementasikannya dalam 4 paket yaitu: *Pertama*, kebijakan jangka pendek yang memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar setengah juta orang dalam dua tahun berikutnya. *Kedua*, kebijakan pemotongan anggaran termasuk didalamnya anggaran militer, subsidi pertanian, proyek ruang angkasa dan sejumlah program lainnya. *Ketiga*, kenaikan pajak sebesar 70 % sebagai suatu kenaikan luar biasa yang ditujukan untuk kaum menengah dan atas yang berpendapatan Rp 60 juta ke atas. Sedangkan paket kebijakan *keempat*, investasi baru yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Dan program ini dinilai strategis untuk mempersiapkan AS menghadapi masa depan.³²

Dari keempat paket tersebut, memang ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan naik, paling tidak bergerak sekitar 3 persen. GDP akan bergerak

³¹ *Ibid.*, hal 4-9

³² *Ibid*

dari angka 2 persen (1992) menuju 3,1 persen (1993). Tetapi yang agak bisa dipastikan, pengangguran hanya mampu turun pada sekitar angka 1,5 persen menjadi 6,7 persen dari angka 2,5 juta penganggur. Selanjutnya dua masalah yang pasti akan muncul adalah inflasi, yang bisa mencapai 3,5 persen karena dorongan investasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Dan Fortune memprediksikan edisi Januari 1993, tingkat konsumsi masyarakat akan naik menjadi 3,2 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 3 persen.

Adapun yang terjadi sekarang, perekonomian AS terus berkinerja dengan baik, walaupun sangatlah penting bahwa kita terus membuat rencana dengan hati-hati; khususnya dengan menyisihkan pangsa terbesar dari surplus-surplus anggaran terproyeksikan untuk membayar hutang nasional. Dan untuk mengetahui gambaran tentang peranan perusahaan dalam perekonomian AS, kita dapat melihat bahwa 50 perusahaan industri terbesar mempunyai andil 80 % dari total penjualan sektor industri, 75 % penyediaan lapangan pekerjaan di antara semua perusahaan industri. Dalam dasawarsa terakhir kecenderungan ke arah skala yang besar ini telah meningkat. Dalam sektor ekonomi non industri yang penting seperti perbankan, asuransi jiwa, dan pelayanan jasa kepada masyarakat umum untuk konsentrasi pemilikan saham dan kontrol bahkan lebih besar daripada dalam bidang industri.³³

Dan klimaksnya yang nampak sekarang adalah peranan negara industri maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Belanda telah mencapai 63,37% terhadap GWP (Gross World Product) tahun 1984, sebesar

³³ William Eberstein dkk, *Isme-Isme Dewasa Ini*, alih bahasa Alex Jemadu, Edisi IX, (Jakarta, Erlangga, 1994), hal. 154.

68,03 % pada tahun 1990 dan sebesar 66,33 % pada tahun 1992, di mana yang sebesar 56, 44 %, sebesar 61,39 % dan sebesar 64, 88 % pada ketiga tahun tersebut dari GWP.³⁴ Ironisnya perkembangan ekonomi ketujuh Negara Industri Maju tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Untuk lebih sistematisnya penulis akan menjelaskan kronologis/urutan lahirnya istilah Kapitalisme dan sistem Kapitalisme itu sendiri sebagai berikut:³⁵

a. Kapitalisme awal

Di Inggris industri sandang pedesaan terus tumbuh pesat selama abad ke-16, 17 dan 18. jadi industri wool memelopori kapitalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi serta untuk pertama kali membuatnya berakar di tanah Inggris. Sehingga pencayagunaan “surplus sosial” secara produktif merupakan prestasi istimewa yang membuat kapitalisme mampu mengungguli semua sistem ekonomi sebelumnya. Diantara berbagai kejadian dan lingkungan yang secara pasti mempengaruhi pembentukan modal di Eropa Barat pada tahap awal berkembang kapitalisme, ada tiga hal yang patut diberi perhatian khusus yaitu: *Pertama;* dukungan agama bagi kerja keras dan sikap hemat. *Kedua;* pengaruh logam-logam mulia dari Dunia Baru terhadap pembagian relatif atas upah, laba dan sewa dan *Ketiga;* peranan negara-negara dalam membantu dan secara langsung melakukan pembentukan modal dalam bentuk modal yang multifungsi.

b. Kapitalisme Klasik

³⁴ Suroso Imam Dzajuli, *Indonesian International Currency System*, (Surabaya;Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1998), hal. 3.

³⁵ M. Dawam Rahardjo, *Kapitalisme*, hal. 17

Di Inggris, mulai abad ke-18 fokus pembangunan kapitalis bergeser dari perdagangan ke industri. Revolusi industri dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi modal perdagangan atas modal industri ke dominasi modal industri atas modal perdagangan. Sehingga akumulasi modal yang terus menerus selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil baik pada abad ke-18. dan kapitalisme sebagai penggerak kuat bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan upaya penemuan-penemuan baru yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat miskin. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa karya besarnya Adam Smith yaitu : *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealt of Nation (1776)* mencerminkan ideologi kapitalisme klasik. Smith menganjurkan untuk membongkar birokrasi negara dan menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi kepada kekuatan pasar yang mengatur dirinya sendiri secara bebas. Dalam pandangan Smith, keuntungan pribadi dan kesejahteraan umum dapat diserasikan oleh kekuatan-kekuatan impersonal kompetisi pasar, sebab kebijaksanaan-kebijaksanaan *laissez faire* sebagai realisme politis abad ke-19 mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat (dengan standar emas), anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum-singkatnya, prinsip yang mengembalikan individu-individu kepada diri mereka sendiri dan percaya bahwa interaksi-interaksi yang tidak diatur akan menghasilkan akibat-akibat sosial yang diinginkan. Sehingga sistem ini biarpun didefinisikan secara baik dan ditandai koherensi-logis, harus dipahami semata-mata sebagai sistem dari berbagai kecenderungan. Sebab secara lebih definitif dibanding dengan semua kurun historis lainnya, (maksudnya perkembangan yang

terjadi pada fase sebelumnya dimana kaum bisnis tidak berkuasa secara politis) perkembangan ini dapat diterangkan semata-mata secara ekonomis. Ia merupakan sukses dari usaha kapitalis mengangkat kaum borjuis ke posisi yang untuk sementara sangat berpengaruh, sukses ekonomis menghasilkan kekuatan politis, yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan proses kapitalis. Jadi para industrialis Inggris memperoleh perdagangan bebas merupakan faktor utama dalam suatu periode ekspansi ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

c. Fase Lanjut (Sejak 1914)

Perang Dunia I (pertama) menandai titik balik perkembangan kapitalisme pada umumnya dan kapitalisme Eropa khususnya. Sejak tahun 1914 menyaksikan adanya pembalikan minat publik kepada kapitalisme dan terbaliknya hampir pada semua aspek yang dimulai dari kurun liberal sebelum perang, dimana kapitalisme Eropa menjalankan kepemimpinan kuat dalam masyarakat ekonomi internasional. Pasar dunia saat itu berkembang pesat, standar emas hampir menjadi universal, Eropa bertindak selaku bank dunia, Afrika menjadi jajahan Eropa, sementara Asia dibagi-bagi menjadi berbagai wilayah dan pengaruh yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan Eropa dan Eropa tetap menjadi pusat peningkatan volume perdagangan internasional.

Namun sesudah Perang Dunia I, keberpihakan-keberpihakan itu berbalik arah, dimana pasar internasional surut, standar emas ditinggalkan dan alat pembayaran nasional yang terkendali lebih disukai, hegemoni perbankan berpindah dari Eropa ke Amerika Serikat dan rakyat Asia dan Afrika berhasil

bangkit melawan kolonialisme Eropa dan berbagai hambatan perdagangan bertambah banyak. Puncaknya Revolusi Rusia sebagai akibat perang, tidak hanya membongkar lembaga pokok kapitalis yang berupa kepemilikan pribadi atas sarana produksi di wilayah yang luas tetapi lebih jauh lagi membongkar struktur kelas dan agama yang sudah mapan. Di atas segala-galanya *laissez faire*, kebijakan yang menjadi kesepakatan abad ke-19 telah dipermalukan oleh perang dan pengalaman sesudah perang.

Terlepas dari adanya keberhasilan yang dimiliki oleh ekonomi kapitalisme, namun tidak semua orang/negara yang bisa menerima atau setuju model kebijakan ekonomi kapitalisme, maka muncul berbagai kritikan walaupun pada hakikatnya kapitalisme hanyalah “hasil sampingan” dari filsafat politik yang bernama “*liberalisme*”, yang berkembang di zaman pencerahan (*Enlightenment*) pada abad ke-18. Semangat liberalisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat, dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai kemajuan (*progress*) yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tuntutan spiritual dari lembaga agama apapun tidak lagi diperlukan.³⁶

Perkembangan selanjutnya menunjukkan ternyata kapitalisme tersebut justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian dan menciptakan kesengsaraan bagi rakyat banyak, disamping munculnya keserakahan pendukung kapitalisme serta individualisme yang menyebabkan alienasi. Meskipun dalam

³⁶ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), hal 91.

dunia empiris tidak mungkin kita temukan kapitalisme murni, dimana barang-barang ekonomi yang tersedia dalam masyarakat didistribusikan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, tetapi setiap sistem ekonomi yang pada dasarnya bersifat kapitalistis mempunyai beberapa kelemahan yaitu :³⁷

Pertama, kapitalisme melahirkan ketidaksamaan (*inequality*), atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Umumnya orang mengakui bahwa kapitalisme memang dapat mendorong produktifitas yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melipatgandakan kekayaan, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan ketimpangan. *Kedua*, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bersifat internasional, jadi tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu negara tertentu. Kapitalisme internasional dapat mempertahankan hidupnya lewat eksploitasi yang dilakukan atas dunia ketiga. *Ketiga*, demi kepentingan ekonominya, kekuatan kapitalis selalu bersikap “*double-standard*”. Kapitalisme langsung atau tidak, berkaitan dengan sistem operasi internasional demi kelangsungan kepentingan ekonominya. Sebagai contoh : Amerika Serikat yang sering menamakan dirinya benteng demokrasi lebih sering membantu kelangsungan rezim-rezim di dunia ketiga yang *opresif* terhadap rakyatnya. Jadi, disatu pihak Amerika sangat menghargai hak asasi manusia dan etika politik yang cukup tinggi (kasus jatuhnya Presiden Nixon karena skandal Watergate), tetapi di pihak lain prinsip-prinsip penting itu sama sekali tidak menjadi problem jika menyangkut negara lain. *Keempat*, kapitalisme yang secara teoritis memberikan kesempatan sama (*equality of opportunity*) kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis. *Kelima*, Semboyan kapitalisme yang berupa :

³⁷ *Ibid*, hal. 92-93

berproduksi untuk dapat berproduksi lebih besar” menyebabkan keserakahan dan berkembangnya kehidupan yang materialistis. Jadi melimpahnya produksi tidak lagi menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan yang luhur, karena ia telah menjadi tujuan itu sendiri. *Keenam*, sebagai konsekuensi logis dari cara produksi seperti di atas, lahirnya pola kehidupan konsumerisme. Dan kegagalan ekonomi kapitalisme yang paling mencolok seperti yang dikatakan dan diakui oleh Hillary Clinton yaitu munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara industri maju (kapitalisme) dengan Negara-negara miskin (selatan). Kesenjangan ekonomi telah menggejala sejak perang Dunia II, saat itu Amerika Serikat memiliki 40 % dari seluruh kekayaan dunia, padahal hanya berpenduduk 6 % dari seluruh penduduk bumi.³⁸ Menurut World Bank Report pada tahun 1979, penduduk Amerika dan Eropa Barat hanya 16,5 % dari penduduk dunia dan menguasai dua pertiga kekayaan dunia. Sedangkan menurut laporan PBB, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai *negative transfer* atau *revising financial flows*. Artinya fenomena ini menggambarkan sesungguhnya bukan dunia industri maju yang mengalirkan dana mereka ke dunia berkembang tapi sebaliknya, yaitu

³⁸ Hillary Clinton, *It Takes a Village*, alih bahasa Widodo, cet. I, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hal 269. lebih lanjut lagi sesungguhnya proses kegiatan ekonomi dengan menyandarkan pada suatu *liberalisasi* akan mengakibatkan adanya suatu kompetisi atau persaingan. Dalam bahasa ekstrim kegiatan ekonomi ini seperti hukum rimba yang memberikan peluang kepada orang yang tidak memiliki kekuatan modal untuk mendapatkan hasil serupa seperti yang didapatkan pemilik modal besar. Dia melanjutkan dengan mengkritisi bahwa pandangan Adam Smith tentang persaingan dan pertentangan tersebut dimana dia percaya jika kontradiksi ini akan dapat diselesaikan oleh *invisible hand* (tangan pengendali yang tak terlihat), sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan tetap terwujud. Dan inilah barangkali satu titik kelemahan kapitalisme yang tidak segera diselesaikan atau bahkan kalau menurut pandangan Karl Marx bahwa sistem ini akan tetap menyisakan yang namanya kontradiksi dan tidak dapat terdamaikan serta akan menghancurkan dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya baca juga Sopwan Ismail, "WTO dan Gerakan Anti Kapitalis", *Kabar Kampus*, (9 Desember 1999), hal. 6, kolom 2.

dunia berkembang yang membantu dunia maju. Jumlah *negative transfer* pada tahun 1984-1990 diperkirakan US\$180 milyar.³⁹

Lebih jauh lagi adanya sistem kapitalis yang ditopang oleh perkawinan ilmu dan teknologi canggih, memang telah memberikan ketamakan/ keseronokan kepada segelintir manusia. Tapi Herbert Marcuse lebih jelas lagi mengatakan bahwa buah dari sistem ini ialah “memudarnya dimensi bagian dalam dari pikiran, pupusnya kekuatan kritis dari rasio, ketertundukan kepada fakta-fakta kehidupan. “ Dan demi pemenuhan dorongan *hedonistik*, alam semesta telah dilukai melalui cara-cara yang tidak beradab, bumi menjadi terluka parah.⁴⁰

Mungkin kita masih biasa menemukan kelemahan-kelemahan kapitalisme yang lain, jika kita menggunakan etika al-Quran tentunya akan nampak jelas sekali kelemahan tersebut, sebagai contoh dalam konsumsi, al Qur'an mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kebutuhan (prinsip moderasi) atau tidak boros, sementara dalam ekonomi kapitalisme seseorang dianjurkan untuk memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu dengan sepuas-puasnya. Dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan antara konsep al-Qur'an yang penuh dengan muatan etika/moral dalam berekonomi.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada teori ekonomi tersebut, namun akseptabilitas dari teori ini sudah sangat tinggi di dunia. Paham kapitalis

³⁹ Ruslan Abdul Gani, *Harian Merdeka*, (28 Februari 1997), hal 4

⁴⁰ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, Upaya Membingkai Peradaban Cirebon*, (t.tp, Pustaka Dinamika, 1999), hal. 194, sementara Faisal Basri mengatakan bahwa dengan mulai goyahnya tatanan ekonomi dunia, akhirnya banyak ahli ekonomi yang mempertanyakan sistem ekonomi sehingga kapitalisme yang diterapkan di negara-negara besar itu. Uniknyanya yang mulai banyak mengkritik sistem ekonomi kapitalisme adalah para pakar dan pendukung utama ekonomi kapitalisme itu sendiri. Selanjutnya baca dalam Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, cet. II, (Jakarta, Erlangga, 1987), hal. 23.

saat ini sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan negara-negara yang dulunya menganut paham komunis seperti Rusia dan beberapa Negara ex Uni Soiet dan RRC, saat ini tatanan kehidupan ekonominya juga sudah tidak menunjukkan lagi penolakan terhadap paham ekonomi tersebut. Uniknya perluasan ini telah menjangkau dunia Islam, terbukti dengan banyaknya ekonom di negara-negara itu secara terang-terangan menganut paham tersebut. Hal ini tentu saja sedikit banyak telah memberi warna terhadap analisis-analisis ekonomi Islam.⁴¹

Kenyataan ini diperkuat lagi (dan menurut penulis memang harus diakui) bahwa ekonomi Islam belum memiliki alat analisis yang orisinal dari khasanah ekonomi Islam sendiri, yang implikasinya menyebabkan ekonom Islam “ meminjam” alat analisis ekonomi Barat. Walaupun adanya asumsi bahwa alat analisis yang dimiliki ekonomi Barat bersifat matematis-analitis saja, sehingga dipandang bebas nilai. Asumsi inilah yang sebenarnya merupakan ekspresi amoralitas dari ekonomi kapitalisme. Jika penggunaan alat ini akan terus dilakukan maka dikhawatirkan hasil postulasi ekonomi Islam “sama” (tidak jauh berbeda) dengan ekonomi kapitalisme. Atau jika tidak hanya memberi label “moral” terhadap ekonomi kapitalisme.⁴² Oleh sebab itu kita harus menemukan formasi yang tepat untuk membangun ekonomi Islam secara integral.

⁴¹ Munrokhim Misanam, “*Pendekatan Akademik Dalam Paradigma Ekonomi Islam*”, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta, 17 Mei 1998), hal. 2.

⁴² *Ibid*, hal. 3.

II. Ekonomi Sosialisme

Munculnya sistem sosialisme tidak bisa dilepaskan dengan sistem kapitalisme. Sosialisme adalah respons yang berbalik arah dengan kapitalisme, bahkan ada yang menganggap bahwa sosialisme adalah warisan kapitalisme dalam bentuk bertolak belakang, dalam arti kapitalisme tidak akan bertahan dan akan digantikan oleh sosialisme. Joseph Schumpeter memprediksi bahwa kapitalisme tidak akan dapat bertahan. Ia berpendapat bahwa sosialisme akan menggantikan kedudukan kapitalisme, karena ia sebagai pewaris kapitalisme. Dengan mengutip dari Stalinisme, Heilbroner menyatakan bahwa akhir dari kapitalisme akan mengantarkan masyarakat dari masa transisi ke arah satu masyarakat baru tanpa kelas.⁴³

Karl Marx, yang mengklaim dirinya sebagai sosialis, menyatakan bahwa bila kapitalisme lumpuh, maka akan ada satu alternatif historis, yaitu kembali ke barbarisme atau revolusi sosial. Transisi ke sosialisme akan berawal dari intervensi aktif kelompok proletar dalam proses historis dan bukan berasal dari semata-mata bekerjanya hukum ekonomi tertentu.⁴⁴ Oleh karena itu, meskipun membenci kapitalisme, Marx menganggap bahwa suatu revolusi sosial adalah hal yang logis datang dari perkembangan kapitalisme itu sendiri.⁴⁵

⁴³ Mengenai Joseph Schumpeter dan Stalinisme ini, lihat Robert Heilbroner, *Runtuhnya*, hal. 33

⁴⁴ Michael A. Riff (ed.), *Kamus Ideologi Politik Modern*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 288.

⁴⁵ Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Marx*, alih bahasa Joebaar Ajoeb, cet I (Jakarta: Teplok Press, 1999), hal. 8.

Menurut pandangan Marx, sosialisme mempunyai kecenderungan untuk mengubah “produksi demi keuntungan” menjadi “produksi demi kemaslahatan manusia”, yang berarti kekuatan teknologi modern yang sama dilaksanakan di bawah lembaga ekonomi yang berbeda. Demi kemaslahatan manusia itu maka kepemilikan pribadi (swasta) digantikan oleh kepemilikan negara (pemerintah), dan mekanisme pasar digantikan oleh mekanisme-mekanisme alokasi politik.⁴⁶

Pandangan tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan swasta (pribadi) atas alat-alat produksi telah menyebabkan terbatasnya kebebasan memilih tujuan, sebab ada keterpaksaan untuk mencari untung dan cenderung untuk memandang segala sesuatu secara sempit dan egoistis. Dalam pandangan sosialisme, kepemilikan negara memberikan kebebasan yang lengkap dalam memilih tujuan apa pun yang dipilih. Kepemilikan swasta adalah alat yang pada umumnya menentukan sendiri tujuan apa yang hendak dicapai dengan alat itu. Sementara itu, kepemilikan negara adalah alat untuk mencapai tujuan yang masih kabur dan masih harus dipilih.⁴⁷

Jika sistem kapitalisme hanya berorientasi keuntungan, yang cocok dengan ide pasar, sehingga muncul “palembagaan individualisme dan tidak adanya tanggung jawab,”⁴⁸ maka kaum sosialis mengusahakan industri negara bukan semata-mata digunakan untuk mencari keuntungan yang melebihi keuntungan kaum kapitalisme, melainkan untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan industri yang lebih demokratis dan lebih bermartabat kemanusiaan. Kaum sosialis

⁴⁶ Peter L. Berger, *Revolusi*, hal. 24.

⁴⁷ E.F. Schumacer, *Kecil itu Indah*, alih bahasa S. Spomo, cet I (Jakarta; LP3ES, 1987) hal. 245.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 241

berusaha menggunakan mesin dengan lebih memperhatikan manusia dan menggunakan hasil usaha dari kecerdasan manusia tersebut dengan lebih bijaksana. Jika operasionalisasi sistem ini dapat dilakukan, maka masa depan ada di tangan mereka.⁴⁹

Kontra produktif dengan hal di atas, ada sebuah oposisi yang menyatakan bahwa sosialisme industri ditandai dengan berlakunya interaksi dua bentuk stratifikasi yang terpisah, yakni sistem kelas.⁵⁰ Interaksi antara dua kelas tersebut menghasilkan sebuah kenyataan sosial yaitu *privilege* kekuasaan maupun *prestise* terikat pada lebaran politik. Oleh Weber gejala ini disebut sebagai *patrimonia*, seiring dengan jabatan politik yang dilimpahkan kepada elite politik. Hal inilah yang kemudian disebut oleh Berger sebagai keterputusan secara konseptual, tetapi pengujian empiris atas kebenarannya dapat dipercaya.⁵¹

Secara historis, cita-cita yang kemudian disebut sebagai sosialisme sebenarnya sudah ditemukan dalam budaya Yunani Kuno, misalnya, mengenai kasta para filosof yang harus memimpin negara adalah mereka yang tidak boleh mempunyai milik pribadi dan tidak berkeluarga. Mereka harus memiliki segalanya bersama dan hidup menurut aturan yang sama. Sosialisme ini terbatas pada kasta calon pemimpin. masyarakat tertata secara hierarkis dan tentu saja mempunyai hak milik.⁵²

⁴⁹ *Ibid*, hal. 246

⁵⁰ Peter L. Berger, *Revolusi*, hal. 271

⁵¹ *Ibid*, hal. 270-271

⁵² Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, cet I (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 14

Pada abad pertengahan, motif-motif sosialisme berkaitan erat dengan paham religius, yakni berkaitan dengan kekuasaan Tuhan dan orang harus bebas dari segala keterikatan. Namun, sejak zaman *renaissance*, sosialisme mulai mengalami pergeseran terutama sejak munculnya sejenis tulisan baru yang disebut *Utopia* atau *Utopis*. Motivasi dasar di belakang cita-cita *utopis* ini bersifat sosial dan tidak lagi religius. Ini terjadi karena adanya kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah. Keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan, dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia, disebabkan oleh akibat hak milik pribadi yang membuat manusia egois, sehingga menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil menjadi cita-cita utama sosialisme modern.⁵³

Pandangan-pandangan sosialis modern terbentuk antara tahun 1789 (permulaan revolusi Perancis) dan tahun 1848. Ada dua peristiwa yang menjadi konteks kelahiran cita-cita sosialisme modern; Revolusi Perancis (1789-1795) dan Revolusi Industri (abad XVIII). Revolusi Perancis menuntut kesamaan di atas bendera etiknya, sedangkan revolusi industri menciptakan kaum proletariat yang secara tajam memperlihatkan bahwa masyarakat tidak sama, tetapi terpecah antara yang kaya dan yang melarat. Secara prinsipil, keyakinan dasar para pemikir sosialis modern adalah produk pekerjaan tetap merupakan milik si pekerja. Milik

⁵³ *Ibid*, hal. 15-16

bersama dianggap tuntutan akal budi. Mereka meyakini bahwa masyarakat akan berjalan tidak berdasarkan milik pribadi.⁵⁴

Anthony Brewer memaknai sosialisme bertentangan dengan kapitalisme.⁵⁵ Pemaknaan ini secara teoretik mempunyai tujuan untuk membangun suatu sistem bagi perikehidupan di atas dasar kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu.

Sosialisme, seperti yang dirumuskan dalam *Encyclopedia Britanica* adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan.⁵⁶

Begitupun menurut Joad, berbagai tindakan yang dianjurkan sosialisme untuk sosialisasi kehidupan masyarakat adalah:

- (1) Penghapusan milik pribadi atas alat produksi. Hal ini akan digantikan oleh milik pemerintah serta pengawasan atas industri dan pelayanan utama.
- (2) Sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdikan kepada kebutuhan sosial dan bukan kepada motif laba.
- (3) Dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh motif pelayanan sosial.⁵⁷

1. Kecenderungan sistem ekonomi sosialisme

Ada beberapa kecenderungan yang ada dalam sistem ekonomi sosialisme, yakni :

⁵⁴ *Ibid*, hal. 18-19

⁵⁵ Lihat Anthony Brewer, *Kajian*, hal. 7.

⁵⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.317

a. Kepemilikan harta oleh negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara dan dipergunakan untuk seluruh rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki harta, kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.

Motivasi masyarakat untuk bekerja tidak didasarkan atas nilai kepemilikan yang ia akan dapatkan kelak setelah bekerja, tetapi lebih disebabkan oleh adanya aturan yang ketat atas apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi, bukan berarti rakyat tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Rakyat mendapatkan hasilnya melalui pembagian yang merata oleh negara.

Pada bidang-bidang tertentu, negara sangat memperlihatkan perhatiannya, sehingga menimbulkan kecenderungan lebih banyak mengalokasikan hasil produksi pada sektor yang diprioritaskan, misalnya ketika masa perang, negara sosialis cenderung memperhatikan bagaimana sektor ekonomi dialihkan untuk mengakomodir kebutuhan perang dibanding masalah kesejahteraan rakyat. Akibatnya kapasitas kerja rakyat dikondisikan pada target produksi negara yang sedang perang. Dorongan masyarakat untuk bekerja sebagai hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak atas kepemilikannya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, edisi I, cet I, (Yogyakarta: PT. Ekonisia, 2002), hal. 89

b. Kesamaan dalam ekonomi

Dalam sistem ekonomi sosialisme, walaupun sulit ditemui pada semua negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan.⁵⁹ Hal ini didasarkan pada kebutuhan minimal setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Kesamaan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya didasarkan atas asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, sehingga potensi yang berkembang oleh karena latar belakang kemampuan alami kurang mendapatkan perhatian oleh negara. Keadaan ini menjurumuskan pada kehidupan masyarakat yang tidak memiliki dinamika, karena apresiasi hidup manusia terbelenggu oleh berbagai aturan negara yang lebih dipengaruhi oleh perspektif baku tentang masalah kemanusiaan.

"Bentuk negara dalam mendinamisasikan masyarakatpun ada, tetapi dengan cara mengkonsentrasikan pada bidangnya secara penuh, misalnya dalam bidang pendidikan dan olahraga."⁶⁰

1. Kebaikan-kebaikan pada sistem ekonomi sosialisme

a. Disediaknya kebutuhan pokok

'Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, baik makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudian fasilitas kesehatan serta tempat tinggal dan lain-lain".⁶¹Setiap orang telah disediakan oleh negara pekerjaannya, sedangkan

⁵⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 6

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Konsep*, hal. 89

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin*, hal. 6

orang tua dan orang-orang cacat fisik dan mental berada dalam perawatan dan pengawasan negara.

b. Yang merencanakan adalah negara

Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan atau kekurangan produksi sebagaimana yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalisme tidak akan terjadi.⁶²

Karena perencanaan diatur oleh negara, maka kebijakan ini lebih terfokus pada penanganan ekonomi pada tingkat nasional. Semua masalah yang ada di daerah/lokal direduksi menjadi masalah nasional, sehingga kadang spesifikasi masalah daerah disamaratakan dengan masalah daerah lain. Kebijakan terpusat mempunyai kelebihan, antara lain cepat menangani masalah daerah dan lebih hemat dalam aspek pembiayaan.

c. Produksi dikelola oleh negara

Semua bentuk produksi dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara, misalnya, untuk memenuhi sarana dan prasarana ekonomi rakyat, seperti makanan, pendidikan, kesehatan. Demikian juga negara mengatur proses perdagangan luar negeri yang berupa penyediaan valuta asing, menyediakan dan merawat alat-alat perang dan

⁶² Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart, *Comparative economic System*, (Boston: Houghmton Mifflin Company, 1981), hal. 123

sebagainya.⁶³ Akan tetapi, bukan berarti semua sarana masyarakat tersebut dikelola melalui distribusi yang adil oleh pemerintah.⁶⁴ Pemerintah sosialis lebih memfokuskan pada penyediaan sarana produksi yang berhubungan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu penyediaan sarana produksi tidak akan pernah adil, karena lebih memprioritaskan kepentingan-kepentingan negara yang belum pasti sesuai dengan kepentingan rakyat.

2. Kelemahan sistem ekonomi sosialisme

a. Sulit melakukan transaksi

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan.⁶⁵ Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya dikelola oleh negara. Proses dari keberadaan output produksi juga diatur oleh negara, maka transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat melanggar hukum. Dalam sistem tersebut harga ditentukan oleh negara, oleh karena itu stabilitas perekonomian negara sosialis ini lebih disebabkan oleh tingkat harga yang ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.⁶⁶

b. Kebebasan terbatas

Sistem sosialisme menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri (individualisme). Sistem ini membelenggu kehidupan masyarakat pada kegiatan

⁶³ Heri Sudarsono, *Konsep*, hal. 91

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin*, hal. 7

yang lebih mekanistik, karena masyarakat dikondisikan untuk berhadapan dengan pola kerja yang sama. Kondisi ini kurang memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya.

d. Pendidikan moral terabaikan

Dalam sistem ini, semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan telah menjadi tujuan utama, maka faktor moral atau nilai tidak diperhatikan lagi.

III. Ekonomi Islam

Dalam wacana perekonomian, setidaknya-tidaknya ada dua sistem ekonomi besar yang dominan dalam literatur ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada filosofi *individualis* atau *selfishness* serta bekerjanya *invisible hand* sehingga memunculkan persaingan di pasar yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi, serta kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kompetisi tersebut didukung pula dengan adanya kebebasan pemilikan atau penguasaan aset secara individu. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme di mana faktor produksi dikuasai negara, sehingga eksploitasi sesama individu dapat dihindari, akan tetapi karena mengabaikan sistem pasar, maka telah membunuh gairah untuk berkompetisi yang selanjutnya berpengaruh negatif terhadap efisiensi.

⁶⁶ Heri Sudarsono, *Konsep*, hal. 92

Sistem ekonomi Islam⁶⁷ memiliki perbedaan yang sangat jauh dan fundamental terhadap kedua sistem ekonomi di atas. Adapun dasar dari ekonomi Islam diturunkan dari kerja sama (bukan kompetisi), serta adanya keseimbangan antara individu dengan kepentingan masyarakat yang semuanya dibangun atas dasar syari'ah. Prilaku manusia (seperti produsen atau konsumen) dalam ekonomi Islam adalah jujur, adil, tidak tamak karena mereka adalah makhluk yang beriman.⁶⁸ Sistem pasar tetap berperan, akan tetapi tidak seluruh persoalan ekonomi umat harus dan mampu diselesaikan melalui mekanisme pasar seperti keadilan, pemerataan, moral dan sebagainya. Sehingga dengan dasar keimanan tersebut mereka percaya bahwa segala perbuatan termasuk di dalamnya perbuatan ekonomi yang dilakukan didunia, akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Maka sebagai orang beriman, mereka percaya bahwa ada dua tahapan kehidupan manusia (baca : dunia dan akhirat) di mana segala perbuatan manusia di bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di akhirat nanti (*accountability*).

⁶⁷ Islam tidak saja berarti selamat, sejahtera dan tunduk serta penyerahan diri secara total untuk mendapat keselamatan, namun bukanlah sebuah agama yang hanya memuat dogma, kumpulan ritus semata, tetapi lebih luas lagi dalam makna yang lebih utuh Islam adalah sebuah doktrin, world view, sebuah sistem ekonomi, sosial, politik dan juga budaya, yang berlandaskan pada paradigma tauhid, selanjutnya baca dalam Nouruzzaman Shiddiqi yang berjudul *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, pada hal. 290. Muhammadiyah Baqir Sadr (seorang pakar dalam ekonomi Islam kontemporer) menjelaskan bahwa Islam bersifat komprehensif dan menyeluruh yang menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia, selanjutnya baca dalam Farhad Nomani dan Ali rehnema, *Islamic Economic System*, (Malaysia: Business Information Press, 1995), pada hal. 44

⁶⁸ M. Husein Sawit, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Perluakah Berbeda? Dalam Seminar Nasional, yang diadakan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1997) hal. 2 sebab kontribusi yang utama dari Islam terletak pada usaha untuk membuat kehidupan manusia dan usaha yang mempunyai tujuan yaitu *value oriented*. Transformasi-transformasi yang dibawanya dalam sikap manusia dan pari passu dalam sikap keilmuan sosial adalah untuk menghilangkannya dari *pseudo-value-neutrality* kearah *value-commitment* terbuka dan jelas serta *value-fulfilment*. Premis pertama yang penulis maksudkan untuk ditegaskan adalah bahwa pembangunan ekonomi dalam framework Islam dan pembangunan ekonomi Islam yang berakar pada *value-pattern* yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya baca dalam, Khurshid Ahmad, *Studies In Islamic Economics*, (Jeddah & Inggris: International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz & The Islamic Foundation, 1976), hal. 175

Oleh karena itu fondasi *self interest dan invisible hand*-nya Adam Smith yang dipakai sebagai dasar dalam mengembangkan teori-teori ekonomi konvensional yang dikenal sekarang ini harus dihilangkan atau paling tidak “diminimalisasikan” dalam rangka membentuk sistem yang berbeda dari ekonomi konvensional, salah satunya dengan menghilangkan paradigma bunga.⁶⁹

Sedangkan gagasan mengenai konsep ekonomi Islam sebenarnya baru muncul secara internasional pada sekitar belahan kedua dasawarsa 70-an, ketika untuk pertama kali diselenggarakan konprensi Internasional tentang ekonomi Islam di Makkah, pada tahun 1976 yang ditandai oleh pertumbuhan fantastis lembaga perbankan Islam di berbagai belahan dunia. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam tersebut belum pernah dibahas sebelumnya. Dan pembahasan secara modern tentang ekonomi Islam yang bersifat filosofis sudah ada sejak permulaan dasawarsa 50-an dan meningkat pada dasawarsa selanjutnya mengenai sistem ekonomi, pembangunan ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi dan analisis ekonomi yang sifatnya empiris. Pada dasawarsa 70-an, tulisan-tulisan serupa terus berkembang, baru sekitar belahan kedua dasawarsa itu, mulai muncul teori-teori ekonomi yang memakai model-model ekonometri, setelah munculnya

⁶⁹ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, Int. Islamic Pub. House, and the intern. Institute Of Islamic Though: Herndom VA, 1992, hal. 6. dan M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 312.⁴⁷ dalam ekonomi Konvensional (model ekonomi kapitalis dan sosialis), bertentangan dengan *sistem nilai*; karena keduanya bersifat ekspolitatif dan tidak adil serta gagal untuk memperlakukan manusia sebagai manusia, Khalifah Tuhan di bumi. Keduanya juga tidak dapat ditemui dalam lingkungan mereka sendiri tantangan ekonomi, sosial, politik dan moral yang mendasar dari masa kita dan kebutuhan masyarakat manusia yang riil dan adil. Lebih lengkapnya lihat dalam Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (Jeddah & Inggris: International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz & The Islamic Foundation, 1976), hal. 175

sarjana-sarjana ekonomi angkatan baru, terutama lulusan universitas universitas Amerika.⁷⁰

Jika kita melihat kronologi sejarahnya, Islam sudah memiliki pemikir-pemikir ekonomi kaliber dunia sejak abad kedelapan tahun Masehi. Di sana tercatat beberapa nama besar seperti Abu Yusuf (731-798) yang banyak menitikberatkan pada masalah keuangan (*public finance*), perpajakan dan sektor pertanian. Beliau mengajukan pemikiran tentang kelebihan sistem pajak yang proporsional dengan sistem yang dikenakan secara tetap (*hampsum taxation*). Kemudian Ibn Taimiyyah (1262-1328) yang walaupun beliau seorang ahli dalam dunia pengobatan, sementara dalam ekonomi bisa dilihat dari tesis singkatnya yang tertuang dalam *Tadbir al-Manzil*, beliau mengemukakan pentingnya elemen dari masyarakat politik, organisasi sosial dan manajemen pendapatan dan pengeluaran. Menurutnya pengeluaran harus tunduk pada keadilan yang mensyaratkan perlunya jalan *iqtisad* (pemenuhan kebutuhan dalam keadaan terbatas). Jelas di sini bahwa segala pengeluaran harus didasarkan pada prinsip optimalisasi. Selanjutnya Ibn Khaldun disebut sebagai pelopor pemikiran ekonomi Islam, seperti teori nilai, hukum penawaran dan permintaan, produksi dan distribusi, keuangan negara dan sebagainya.⁷¹

Lebih lanjut menurut Boulakia (1971), beberapa konsep ekonomi yang diajukan oleh beberapa pemikir ekonomi Barat seperti Adam Smith, David

⁷⁰ M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah*; Menuju Ekonomi Islam, (Bandung; Penerbit Mizan, 1987) hal. 15

⁷¹ Muhammad Akhyar Adnan, "*Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Islam*", makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta, 17 Mei 1998), hal. 1

Ricardo dan Robert Malthus, sudah ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang empat abad sebelum bukunya Adam Smith yang terkenal itu terbit. Dengan demikian adalah keliru kiranya, klaim kebanyakan atau sementara orang yang berpendapat bahwa Adam Smith adalah “nabi” ekonomi modern.⁷²

Sementara di Indonesia terhadap pengembangan teori ekonomi yang bertolak dari ke-Islaman (saat itu) boleh dikatakan tidak ada, kecuali sifatnya pribadi seperti Dr. A. M. Saefuddin, Dr. Halide dan Dr. Murasa Sarkaniputra. Sebelumnya Syafruddin Prawiranegara, seorang teknokrat terkemuka sejak tahun 1946 hingga sekitas 1958 pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sistem ekonomi Islam” dalam kesempatan lahirnya HUSAMI (Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia). Penjelasan tersebut menurut Dawam Rahardjo sebagai penjelasan lebih lanjut dari apa yang dituliskannya pada tahun 1951 yang berjudul “Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum Islam”, dan penjelasan itu sebenarnya belum menjelaskan mengenai “sistem” melainkan moral ekonomi menurut pandangan Islam.⁷³

Namun kita melihat saat ini minat terhadap ekonomi Islam baik di dunia internasional (contohnya di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Sudan, Yordania, Pakistan, Malaysia, yang mana negara-negara ini termasuk negara yang benar-benar melaksanakan zakat dan sebagai salah satu alternatif dalam memberantas kemiskinan)⁷⁴ maupun di Indonesia sudah sangat besar, misalnya di

⁷² *Ibid.*, hal. 1.

⁷³ *Ibid.*, hal. 16

⁷⁴ J. Barkley Rosser, Jr, Marina V. Rosser, *Comparative Economics In A Transforming World Economy*, (USA: Penerbit Times Mirror Higher Education Group, 1996), hal 115

Indonesia (secara resmi/operasional baru diakui keberadaannya pada tahun 1991) dan pada tataran praktis misalnya, sudah ada Bank Syari'ah, Asuransi Takaful, BMT, Bank Muamalat Indonesia lembaga BAZIS dan baru-baru ini ada Bursa Efek yang Islami yang mempunyai signifikansi besar terhadap pengembangan ekonomi umat.

Lebih lanjut pengembangan ekonomi Islam dilakukan dalam berbagai bentuk, dan yang paling menonjol adalah usaha pembangunan teori pada tingkat abstrak yaitu perumusan etika ekonomi dan model-model ekonometri. Di berbagai universitas telah dibentuk departemen ekonomi, secara khusus mengajarkan teori-teori ekonomi Islam seperti *Islamic University*, Makkah dan *Islamic University of Omm Durman*, sudan serta kegiatan riset dan pelatihan telah diselenggarakan di lembaga-lembaga yang khusus dibentuk seperti *international Centre for Research in Islamic Economics*, King Abdul Aziz University, Jeddah, *the Training Institute for Islamic banking and Economics*, yang dibentuk oleh *International Association of Islamic Banks* di Lefkosa, Cyprus-Turki dan *School of Economics* pada *Islamic University* Islamabad.⁷⁵ Dan berntuk pengembangan secara empirik nampaknya masih terbatas tapi operasionalisasi beberapa konsep telah dilaksanakan, yang terkenal paling maju adalah pendirian bank-bank komersial Islam, lembaga-lembaga keuangan dan investasi serta bank pembangunan yang membantu membiayai berbagai proyek pembangunan negara Islam, melalui IDB. Sementara konsep lain yang mulai dilaksanakan adalah pengumpulan dana zakat untuk pembangunan dan bantuan sosial, baik untuk masyarakat setempat maupun masyarakat Islam di luar negeri.

⁷⁵ M. Dawam Rahardjo. *Perspektif*, hal. 64.

Demikian juga di Indonesia sudah banyak universitas-universitas yang khusus membuka konsentrasi ekonomi Islam seperti Magister Studi Islam, UII, Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, UNAIR di Surabaya, IAIN Sunan Kalijaga dan lain-lainnya, maupun pengembangan melalui seminar-seminar dalam rangka mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat luas.

A. Pengertian ekonomi Islam

Menurut Hasanuzzaman,⁷⁶ ekonomi Islam yaitu “Islamic Economics is the knowledge and application of injunction and rules of the Syari’ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligation to Allah and the society.”

Didalam definisi tersebut terungkap aktivitas ekonomi yaitu dari kata-kata “perolehan” dan “pembagian”. Aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syari’ah yang di dalamnya mengandung perintah (*injunction*) dan peraturan (*rules*) tentang anjuran/perintah dan larangan. Pengertian “memberikan kepuasan terhadap manusia” merupakan sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat” dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi tapi juga mengakomodasikan peran

⁷⁶ S.M. hasanuzzaman, dalam karangannya "*Definition of Islamic Economics*" Journal of Research in Islamic Economics, (Vol. I, No. 2/1984) hal. 50

pemerintah dalam mengatur dan merencanakan semua aktifitas ekonomi termasuk didalamnya pajak dan zakat.⁷⁷

Jadi paradigma ekonomi yang dikembangkan dalam Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama mencapai kemenangan dan kebahagiaan (*falah*) di akhirat yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual-material, aspek jasmani-rohani dan kepentingan individu-kolektif. Namun demikian peranan mekanisme harga dan pasar tetap merupakan suatu instrumen yang berperan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien sebagai upaya menyejahterakan masyarakat.⁷⁸

Selanjutnya M. Dawam Rahardjo menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan di atas ditarik pengertian yaitu, *pertama*; pengertian tentang ekonomi itu sendiri, yakni “pengetahuan tentang penggalan dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia.” *Kedua*; mengenai “penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari’at” dengan kegiatan ekonomi, dalam rangka “melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.” *Ketiga*; keterangan mengenai predikat “Islam” dalam ilmu ekonomi.⁷⁹ Selanjutnya jika telah diketahui masalah ilmu ekonomi, maka tugas kita dalam melakukan penelitian terhadap ekonom Islam adalah menggali ajaran

⁷⁷ Hesein Sawit, *Metodologi*, hal. 3

⁷⁸ Imamudin Yuliadi, "*Metodologi Ekonomi Islam*", Utilitas, (No. 9/Tahun Ke 7/1999). Hal. 84.

⁷⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan transformasi sosial – Ekonomi*, cet. I, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal 20

Islam atau pengetahuan syari'ah pada umumnya dan bidang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya bidang *mu'amalah*.

Dan Dr. Munawar Iqbal, Direktur institut *Internasional Islamic University*, Islamabad, Pakistan mengatakan :

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.⁸⁰

Sementara Mohamed Aslam Mohamed Haneef mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah "An approach to interpreting and solving man's economic problems based on the values, norm, laws and indtitutions found in, and derived from, the sources of knwoledge in Islam."⁸¹

Berdasarkan definisi di atas, ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran dan kebijakan yang merupakan interpretasi terhadap sumber pengetahuan dalam Islam. Dan dalam mengembangkan pemikiran dan kebijakan ekonomi, metodologinya harus dibentuk sebagaimana aturan dalam melakukan interpretasi dan mengembangkan disiplinnya. Adapun metodologi Islam tersebut meliputi "prinsip-prinsip pengetahuan dan metode pengajaran yang didasarkan pada

⁸⁰ Tulisan ini dikemukakan dalam kajian tentang Islamic Economics di Islamabad, Pakistan, buku tersebut berjudul *Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi : Kumpulan Hadis-Hadis Pilihan tentang Ekonomi (Economic Teachings of Prophet Muhammad)*, karya Muhammad Akram dan penulis kutip dari buku M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, hal. 22.

⁸¹ Mohamed Aslam Mohamed Haneef Aslam, *The Islamic Worldview, And Islamic Economics*, Malaysia, IIUM (Journal of Economics & Management 5, NO. 1), (International Islamic University Malaysia Press, 1997), hal. 50.

hukum-hukum syari'ah” (dan kami menambahkan nilai, norma dan institusi) dari bagian yang mendukung pembuktian.⁸² Bukti-bukti ini terdiri dari bukti pokok dan kedua berdasarkan sumber-sumber hukum dan nilai-nilai Islam. Sumber ini bisa dikategorikan ke dalam “wahyu, akal dan alam”.

Lebih jauh lagi Dr. Akhyar Adnan, MBA menjelaskan setidaknya ada landasan filosofinya, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri yaitu : *tauhid, rububiyah, hilafah, tazkiyah, mas'uliyah dan uhuwah*. Dan pada tataran yang sedikit lebih teknis, secara prinsip sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada, misalnya menyangkut pemilikan secara umum, pemilikan pribadi, distribusi kekayaan, moneter, larangan atas riba, zakat, larangan atas beberapa kegiatan ekonomi, nilai-nilai positif yang harus dipatuhi dan nilai-nilai negatif yang harus ditinggalkan. Beliau melanjutkan bahwa .⁸³

“Pemahaman yang mendalam membuktikan jika sesungguhnya sistem yang ditawarkan Islam jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sistem yang lain; baik sosialisme dan Kapitalisme. Tidak sedikit yang mengistilahkan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berkeadilan”.

Selanjutnya Suroso Imam Zadjuli mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam

⁸² Mohamed Aslam Mohamed Haneef, *The Islamic*, hal. 50.

⁸³ Muhammad Akhyar Adnan, "Sistem Ekonomi Islam Memiliki Beberapa Ciri", *Kabar Kampus*, (29 Desember 1999), hal. 3.

(*sunnatullah*). Sumber terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah al-qur'an, al-Hadist dan suri tauladan perilaku ekonomi Islam pada zaman khalifah. Namun lanjutnya hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan sistem ekonomi Islam secara totalitas/menyeluruh, yang ada baru merupakan pembahasan secara parsial saja seperti halnya Zakat, Bank Islam, Riba dan sebagainya. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa SEI (Sistem Ekonomi Islam) merupakan sistem yang mandiri dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem-sistem yang lain. Adapun yang membedakan SEI dengan sistem ekonomi yang lain adalah.⁸⁴

- a. Asumsi Dasar/Norma Pokok ataupun aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang di berlakukan. Dalam SEI asumsi dasarnya adalah "syari'ah Islam yang berlaku secara komprehensif dan universal.
- b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- c. Motif ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan di akherat selaku Khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis dengan menggunakan *aksioma etika*

⁸⁴ Suroso Imam Zadjuli, *Indonesian*, hal. 8-9. Namun setidaknya, ketika kita akan merumuskan sistem/model ekonomi Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, sorotan utama dalam ekonomi Islam adalah persoalan akhlaq manusianya. *Kedua*, rumusan tentang tujuan hidup manusia hendaknya bukan semata-mata kesenangan belaka; melainkan harus ada tujuan paling mulia dan lebih jauh yaitu kebahagiaan di akhirat. *Ketiga*, kebebasan manusia atas hak-hak kebendaan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus mengacu pada kepentingan sosial. Lebih jauh baca dalam *Mencari Sistem Ekonomi Islam*, Djauhari Muchsin dalam tulisannya yang berjudul : *Studi Perbandingan Tentang Sistem Ekonomi* (sebuah rangkuman), (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, 1985), hal. 40.

Islam.⁸⁵ *Pertama*, kapitalisme gagal mengejawantahkan kesatuan kehidupan (maka hidup yang sesungguhnya) dengan penekanan yang berlebihan pada nilai material manusia dengan mengorbankan aspirasi ruhaninya. Padahal sesungguhnya penghambaan terhadap perolehan material akan membekukan sifat kreatif manusia dan mengeringkan sumber kebahagiaan yang mengalir dari karya-karya kreatif tersebut. Menurut sudut pandang Islami, sikap seperti itu mengaburkan usaha manusia dengan cara yang membahayakan, malah harus dipalingkan untuk mewujudkan sifat teomorfisnya. Dalam ayat al Qur'an disebutkan:

'Yang mengumpulkan kekayaan (di dunia ini) dan menumpuk-numpuknya ; ia mengira bahwa kekayaannya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan kedalam api yang menganga.'⁸⁶

Karena itu, perolehan uang sangat disusutkan posisinya dalam skala nilai manusia menurut etika Islam. *Kedua*, kapitalisme merusak keseimbangan alam, sebab kekayaan terpusat pada segelintir orang; dengan alasan bahwa kaum kayalah yang berhak melakukan investasi. Sementara dalam Islam, kehidupan adalah saling bekerja sama, walaupun sama sekali tidak menafikan persaingan, namun Islam tidak mengakuinya sebagai cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan manusia,

⁸⁵ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Eetika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, (Bandung: Mizan, 1985), hal. 116. Karena dalam frame Islam pembangunan ekonomi merupakan aktifitas *goal-oriented* dan *value-realising*, yang melibatkan keyakinan dan partisipasi yang menyerap manusia dan diarahkan untuk maksimalisasi manusia dalam semua aspeknya dan membangun kekuatan umat untuk menyalurkan perannya sebagai khalifah Allah di bumi dan sebagai *the mid-most people*. Sebab pembangunan ekonomi berarti pembangunan *moral, spiritual* dan *material individu* dan *sosial* yang membawa kepada kesejahteraan sosial-ekonomi maksimum dan kebaikan yang mendasar dari manusia.

⁸⁶ Al-Humazah (104): 2-4

sebab di bawah panji kapitalisme, persaingan bebas sangat memperparah ketidakadilan sosial.. Memang benar, bahwa tanggung jawab dipaksakan atas individu melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti pajak pendapatan progresif. Padahal sesungguhnya menghindar dari kewajiban membayar pajak akan mengakibatkan ketidakpekaan individu terhadap tanggung jawab sosial dan Islam menolak perilaku sosial yang tidak bertanggung jawab.

Maka sesungguhnya lahirnya “ilmu ekonomi Islam” sebagai kebenaran, perlu diupayakan untuk menuntun kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka regenerasi kebudayaan dari *homo-economicus* menjadi *homo-Islamicus*. Lebih jauh lagi berhasilnya proses regenerasi alam dalam artian Islamisasi ekonomi bergantung pada ketepatan strategi untuk memulai perjalanan panjang dalam mengubah struktur sosial ekonomi yang opresif dan tidak adil yang selama ini ada.⁸⁷

Walaupun demikian, keberadaan ekonomi Islam tersebut tidak berarti kita harus menghapuskan model-model ekonomi yang sudah ada saat ini, tetapi seharusnya ekonomi Islam dapat memberikan kentribusinya dengan melengkapi dan mengoreksi apa yang sudah ada dengan teori ekonomi Islam.

Dan untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan diantara menetapkan sistem ekonomi Islam, dibutuhkan bangunan teori ekonomi yang mendukungnya, sejauh mana teori-teori ini bisa berjalan, maka perlu pengujian. Pengujian teori ini dapat dilakukan kalau konsep-konsep ini menuntut adanya lembaga-lembaga yang

⁸⁷ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hal. 223.

mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu. Sejauh ini lembaga tersebut masih sangat terbatas namun perkembangan positif ada.⁸⁸

Jadi ekonomi Islam tersebut, memang ada dan bisa dibulatkan secara *normatif* namun *empirik*, seperti yang dikatakan oleh Islahi dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, walaupun menurut Ibn Khaldun pada kenyataannya pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah lebih bersifat *normatif* dibandingkan nuansa *positif*.

Adapun yang dikatakan *ekonomi positif* adalah suatu pembahasan mengenai kondisi riil dalam hubungan ekonomi atau "What Is". Sedangkan *ekonomi normatif* adalah suatu pembahasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tertentu atau "What ought to be". Sumber nilai ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah tidak saja berbicara persoalan pada dataran normatif tapi juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi riil dalam masyarakat. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini, Contohnya :

'Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup'.⁸⁹ Ayat ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan/kekayaan akan menimbulkan berbagai macam perilaku yang *eksesif* atau melampaui batas. Sementara dalam ayat lain dijelaskan :

⁸⁸Edi Suandi Hamid, *Kurikulum Dan Silabi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LP3EI-UII, 1998), hal. 5. Menurut penulis ini merupakan tugas/perkara yang *mudah* dikatakan tetapi *sulit* dikerjakan, sebab ini tidak kurang hampir membangun teori baru. Namun sebagai Muslim, kita harus melakukannya jika kita ingin berkontribusi solusi-solusi Islam yang orisinal bagi masalah-masalah manusia dan jika kita ingin berhenti bersikap 'free-loader' dalam ilmu-ilmu social

⁸⁹ Al-'Alaq (96): 6-7

'Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang telah diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga)'.⁹⁰

Dari ayat tersebut di atas menerangkan kecenderungan umum masyarakat atau seseorang yang mengasumsikan perilaku masyarakat terhadap harta yang tak terbatas. Namun diingatkan dalam ayat tersebut bahwa balasan diakhirat (surga) jauh lebih tinggi nilainya daripada yang ada di dunia. Berangkat dari sini kita dapat mengambil suatu benang merah bahwa kecenderungan masyarakat akan harta merupakan sesuatu yang alami namun perilaku tersebut harus dikendalikan dengan adanya ganjaran yang lebih besar di akhirat. Maka sesungguhnya dalam perspektif Islam aspek normatif dan positif saling berkaitan sebab setiap upaya memisahkan kedua aspek itu akan berakibat timbulnya distorsi dalam kehidupan masyarakat.⁹¹

Namun demikian penulis masih ragu jika keberadaan ekonomi Islam tersebut kita mendasarkan diri/ mengacu pada praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebab menurut hemat penulis apa yang dilakukan Nabi bukanlah model/ilmu ekonomi Islam seperti yang ada selama ini dan jika ada hanyalah secara makro ekonomi, namun belum tersusun secara sistematis tentunya belum bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan yang dilakukan Nabi hanyalah praktek ekonomi yang memang sudah "taken for granted" dalam bahasa agama (baca: Islam). Tetapi paling tidak, kita berusaha untuk menggantikan *value judgement* ekonomi non-Islam (dalam hal ini

⁹⁰ Ali Imran (3): 140

ekonomi kapitalisme) dengan *value judgement* Islam dan menambah stock ekonom mengenai ketegasan positif dengan ketentuan Islam, selanjutnya menjalankan konsekwensi-konsekwensinya, lebih jauh lagi kita mempunyai semangat dan memang “harus” untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikannya sedini mungkin.

Selanjutnya jika keberadaannya (ekonomi Islam) benar-benar diakui sebagai sebuah sistem ekonomi yang mandiri, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi, tentunya hal ini akan mudah dilakukan kalau teori ekonomi Islam itu sudah memiliki bentuk standar dan isi yang jelas serta teruji dalam pelaksanaannya, dan mampu memecahkan problem ekonomi yang ada di tengah-tengah kemapanan teori-teori ekonomi konvensional yang sudah ada. Tetapi pada dasarnya kita harus memulai dari sekarang untuk terus mengedepankan semangat untuk menerapkan ekonomi Islam (dengan memulainya dari diri kita sendiri, sebab menurut hemat penulis sistem ekonomi Islam ini akan terus berkembang(dinamis) seiring dengan perubahan waktu dan munculnya kesadaran masyarakat bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang jauh dari norma-norma yang dianjurkan agama.

⁹¹Imamudin Yuliadi, *Metodologi*, hal. 85.

BAB IV KRITIK MUHAMMAD BĀQIR ṢADR TERHADAP EKONOMI KAPITALISME DAN SOSIALISME

I. Kritik terhadap Ekonomi Kapitalisme

A. Kritik terhadap sistem ekonomi

Sistem ekonomi Barat yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis sebagaimana dipersepsikan oleh Muhammad Bāqir Ṣadr, yaitu penjelasannya sebagai berikut :

Umat Islam diseluruh dunia telah melakukan usaha-usaha terbaik untuk mengatasi keterbelakangan dan telah berjuang keras untuk perubahan sosial dan politik yang dapat membawa pada arah kehidupan yang lebih baik dan perekonomian yang lebih makmur. Pengalaman kita pada hal ini telah menunjukkan bahwa dunia Islam tidak dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan dan keterbelakangan ekonomi, kecuali dengan sistem ekonomi Islam.

Sekarang manusia di seluruh dunia sedang melewati momen-momen yang sangat mencemaskan di bawah penindasan dua sistem politik dan ekonomi yang berbeda, yang saling terjalin dan dilengkapi persenjataan nuklir, peluruh antara benua, serta alat-alat pemusnah lainnya. Dalam keadaan demikian, Islam merupakan satu-satunya jalan penyelamat bagi umat manusia. Hanya aqidah Ilahiah ini yang telah bertahan hidup melewati perubahan-perubahan zaman.²

Umat Islam diperkenalkan kepada budaya Barat, mereka terkesan oleh kemampuan Negara-negara Barat memimpin dalam dunia ekonomi, sosial, dan budaya, walaupun mereka sendiri mempunyai misi yang suci untuk memandu nasib umat manusia. Mereka menganggap lumrah pembagian

¹ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet.I, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hal. 15

² *Ibid*

dunia pada basis potensi industri dan ekonomi menjadi Negara "*Developed*" dan "*Underdeveloped*"³

Disini nampak bahwa Negara Islam masuk pada golongan atau kategori yang kedua. Dalam pandangan Negara-negara Barat, Negara-negara terbelakang perlu menerima kepemimpinan Negara-negara maju, demi tujuan kemajuan mereka, dan harus mempersiapkan diri untuk menapaki jejak mereka.⁴

Dunia Islam yang terdiri dari kelompok Negara-negara yang terbelakang secara ekonomi, diyakinkan oleh Negara-negara Barat yang maju secara ekonomi bahwa permasalahan yang ada disebabkan oleh kemunduran ekonomi. Dan dengan demikian Negara-negara Barat yang maju secara ekonomi itu berhak memimpin bagian dunia lainnya. Negara-negara Islam diyakinkan bahwa satu-satunya jalan bagi mereka untuk mengatasi permasalahan dan mencapai taraf yang setingkat dengan Negara-negara maju, adalah dengan obat mujarab berupa menganut cara hidup Barat dan sistem ekonomi mereka sebagai eksperimen yang telah berhasil dan maju.

Jadi pandangan Muhammad Bāqir Ṣadr tersebut menyatakan bahwa Negara-negara barat yang notabeneanya menganut sistem kapitalis dan sosialis telah mengklaim dirinya dengan Negara super power dalam hal ekonomi, sehingga Negara-negara berkembang yang notabeneanya adalah Negara Islam harus tunduk dan mengikuti sistem atau cara yang mereka anut. Akan tetapi beliau merspon klaim tersebut dengan mengatakan bahwa Islam telah memiliki sistem tersendiri dalam ekonominya. Islam telah berusaha mengatasi masalah

³ *Ibid*, hal. 16

ekonominya dengan sistem yang dianutnya, yakni sistem yang lebih membawa kepada maslahat umat manusia, bukan seperti sistem yang ditawarkan oleh Barat yang mengeksploitir hak-hak kolektif dan individu. Islam sangat menghargai dan mengangkat hak-hak keduanya berdasarkan porsi kewajaran.

B. Kritik terhadap paham liberal/kebebasan

1. Tanggung jawab

Sistem kapitalisme inilah yang bertanggung jawab memperkenalkan semua bentuk kezaliman dalam kehidupan ekonomi masyarakat sekarang. Sistem ini telah menghapus bentuk pemerintah zalim dan mencampakkan gereja. Untuk memberikan suatu bentuk baru bagi situasi sosial yang ada, ia telah mengangkat satu kelas baru manusia ke tahta kekuasaan.

Individu adalah suatu fondasi nyata bagi sistem kapitalisme. Kapitalisme demokrat membela individu sepenuhnya dan mempercayai bahwa kepentingan semua orang akan terjamin secara otomatis apabila setiap pribadi /individu dalam berbagai bidang berusaha untuk dirinya masing-masing.⁶

Ada empat bentuk kebebasan dalam sistem kapitalisme demokrat tersebut, yakni :

1. Kebebasan politik
2. Kebebasan ekonomi
3. Kebebasan berpikir
4. Kebebasan pribadi

⁴ *Ibid*

⁵ Idem, *Keunggulan*, hal. 57

⁶ *Ibid*

Kebebasan politik dalam sistem kapitalis, yakni seorang individu memiliki kebebasan politik dan pendapatnya dihormati. Dia dapat mengungkapkan pendapatnya mengenai kehidupan sosial dan sistem pemerintahan dan dapat mempengaruhi perundang-undangan. Dia memilih pemerintah untuk berkuasa melindungi kebebasannya. Sistem ini percaya bahwa sistem sosial dilaksanakan demi keuntungan bangsa, dan organisasi pemerintahan berhubungan langsung dengan kehidupan setiap individu dalam masyarakat, dan banyak mempengaruhi kebahagiaannya. Itulah sebabnya maka setiap individu memiliki hak bersuara dan berpartisipasi dalam pengaturan dan pembentukan pemerintahan.⁷

Dalam konteks di atas berarti semua penduduk memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dan eksekutif, sehingga mereka merasa sama bertanggungjawab atas semua undang-undang yang akan disusun. Inilah prinsip-prinsip dasar pemilihan umum dan kedaulatan mayoritas.

Kebebasan ekonomi, dalam sistem kapitalis adalah setiap orang bebas memproduksi dan mengonsumsi barang-barang dengan sesukanya. Penimbunan barang diperbolehkan. Tidak ada pembatasan dalam pembelanjaan uang. Setiap orang bebas menggunakan cara apapun untuk mendapatkan harta benda serta menimbun kekayaan.⁸

Jika suatu paham ingin dikatakan memiliki ciri kapitalisme adalah⁹ :

a) menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan "keinginan" individu sebagai sesuatu yang penting untuk kesejahteraan

⁷ *Ibid*, hal. 58

⁸ *Ibid*, 59

⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 18.

manusia; b) menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi, memiliki dan mengatur kepemilikan pribadi sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu;¹⁰ c) mengasumsikan inisiatif individu bersama dengan *tace decesion* (pengambilan keputusan) yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum pengalokasian sumberdaya; d) tidak mengakui perlunya peranan penting pemerintah atau pertimbangan-pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi dan e) mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis memenuhi kepentingan sosial.

Para pendukung jenis ekonomi bebas ini mengatakan bahwa politik ekonomi didasarkan pada prinsip universal dan dilaksanakan dalam suatu cara yang alami adalah jaminan yang terbaik bagi kemakmuran masyarakat. Sistem ini melindungi dari terjadinya fluktuasi ekonomi. Kepentingan-kepentingan pribadi yang merupakan rangsangan utama bagi kegiatan ekonomi memberikan perlindungan yang paling baik bagi kepentingan kolektif. Persaingan pada tingkat produsen dan pedagang berdasarkan kebebasan ekonomi dan persamaan hak akan dapat menjamin keadilan dalam berbagai bidang transaksi perdagangan. Hukum alamiah sistem ekonomi bebas secara otomatis mempertahankan harga pada

¹⁰ Oleh sebab itu Kapitalisme menjadi sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Ini diakibatkan karena "hukum-hukum" ekonomi pasar seperti hukum-hukum fisika yang absah secara obyektif, maka keberhasilan atau kegagalannya tidak seyogyanya dinilai dengan kekurangan dan kemiskinan bagi mereka yang ketinggalan dalam perjuangan demi kebelangungan hidup. Lebih jauh setiap orang adalah hakim yang terbaik untuk kepentingannya sendiri dan jika dibiarkan sendirian, tidak hanya akan menjadikan dirinya baik tetapi juga dalam jangka panjang akan menjadikan baik semua orang. Untuk lebih jelasnya baca dalam Umer Chapra, dalam *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hal.37.

tingkatan yang normal dan meningkat, maka sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, ketika penawaran bertambah, sebagai akibatnya adalah harga akan turun. Kenaikan harga akan mengurangi permintaan, sementara berkurangnya permintaan akan menurunkan harga. Dengan demikian di pasar bebas keseimbangan antara harga dan barang dipertahankan secara alami. Kepentingan pribadi akan selalu memaksa orang untuk meningkatkan produksinya dan membuat barang-barang lebih menarik dan lebih bersifat ekonomis sebelum memasukannya ke pasar.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa meskipun seorang individu hanya tertarik pada keuntungan-keuntungan pribadinya, kepentingan kolektif secara otomatis akan terlindungi.

Dengan persaingan di pasar terbuka, harga dan upah ditentukan secara adil sehingga tidak seorangpun dirugikan. Setiap penjual dan produsen akan selalu segan menaikkan harga barangnya, karena takut akan saingan dari rivalnya.

Kapitalisme adalah suatu sistem yang ultra materialisme yang hanya mementingkan keuntungan-keuntungan materil dan mengasingkan manusia dari agama dan kerohanian.

Bila kita melihat kapitalisme dengan mencontohkan penerapannya di Amerika, maka banyak ekonom menyebutkan bahwa puncak sentral pelaksanaan kapitalisme ada di Amerika, hal itu nampak pada perusahaan yang bebas, persaingan dalam bisnis, menganggap gelar/derajat kebebasan adalah hak azazi dan meminimalisir campur tangan pemerintah dalam bisnis pribadi, kemajuan

mereka dalam hal ini karena mengacu pada teori dan kebijakan *laissez faire/laissez passer*.¹¹

Semenjak permulaan revolusi industri yang dipercepat oleh revolusi Perancis, eksperimen-eksperimen ilmiah memperoleh prioritas. Eksperimen ini membawa hasil yang sangat berharga. Penemuan-penemuan yang tidak terduga dalam berbagai bidang memungkinkan manusia menggunakan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-harinya. Keberhasilan ini menarik perhatian orang dan banyak mempengaruhi mereka sehingga kemajuan ini menggoncangkan kepercayaan mereka terhadap setiap hal yang tidak dapat dilihat atau sesuatu yang tidak dapat diperlakukan dengan eksperimen.

2. Ekses Kapitalisme

Dalam bagian ini, Muhammad Baqir Sadr menjelaskan tentang bagaimana akibat buruk dari sistem yang *absurd* ini. Dalam pembahasan ini penulis hanya hendak merujuk secara singkat ciri-ciri keburukan utama yang mengakibatkan malapetaka besar bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya.

Ciri pertama keburukan itu adalah berkuasanya kaum mayoritas atas kaum minoritas yang kepentingan-kepentingannya dikuasai oleh kaum mayoritas. Di bawah kebebasan politik, dilakukan pemilihan para anggota dewan pembuat undang-undang, tetapi selalu hanya hak mayoritas yang dinilai dan dihormati. Anda dapat membayangkan nasib golongan minoritas yang disudutkan dalam situasi di mana kekuasaan pemerintahan kaum kapitalis *egosentris* yang tidak mempercayai nilai-nilai moral dan spiritual. Bagaimana suramnya kehidupan kaum minoritas yang dipaksakan hidup di bawah perundang-undangan yang dibuat oleh kaum mayoritas dengan keuntungannya sendiri belaka. Sedangkan dalam merumuskan undang-undang itu, kaum mayoritas tentulah memusatkan

¹¹ James Harvei Dodd, C. W. Hasek, *Economic Principles and Applikation*, South Wastern, (New York; Publishing Company, 1948), hal. 41. menurut J. Barkley Rosser, Jr., Marina V. Rosser, dalam bukunya *Comparative Economic In A Transforming World Economy*, pada hal.14, mengatakan yang dimaksud dengan terminologi *laissez faire* adalah pandangan yang menyatakan minimnya intervensi pemerintah dan dalam istilah Francis diartikan dengan "biarkanlah mereka melakukan itu"

perhatian pada kepentingan-kepentingannya sendiri dan sama sekali mengabaikan kepentingan kaum minoritas.¹²

Dengan demikian, dalam pandangan Muhammad Bāqir Ṣadr di atas menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang demikian, kemunculan dan kelangsungan kezaliman dan kesewenang-wenangan serta penindasan terhadap hak-hak orang lain, sangatlah wajar. Di zaman kuno, seorang penguasa tunggal yang zalim dapat merampok hak-hak setiap anggota masyarakat, tetapi dalam sistem kapitalis, sebagai ganti seorang penguasa zalim, kaum mayoritas menindas kaum minoritas.

Ini bukan akhir penderitaan yang disebabkan oleh sistem. Aspek ekonominya lebih menindas karena tidak menentukan kendali atas eksploitasi ekonomi. Ia memperbolehkan investasi yang tidak terbatas dalam setiap proyek yang sah ataupun tidak.

Kebebasan ekonomi dimaklumkan dalam masa revolusi industri. Ilmu pengetahuan telah menemukan alat-alat produksi baru, dan semua peralatan yang dijalankan dengan tangan dan angin pun terlupakan. Sejumlah kecil orang memanfaatkan kesempatan yang mendadak ini dan mencapai perubahan besar dalam kehidupan sosial, dan sambil mengambil keuntungan dari kebebasan ekonomi ini mereka menambah produksinya secara besar-besaran dengan penggunaan alat-alat baru. Dengan demikian, mereka berhasil memperoleh keuntungan sangat besar serta mengeksploitasi rakyat kecil.

Ekonomi bebas mengakibatkan perebutan hak golongan mayoritas yang keterampilannya digantikan oleh mesin-mesin baru. Beribu-ribu pengrajin yang

¹² Idem, *Keunggulan*, hal.67

bekerja dengan menggunakan peralatan yang dioperasikan dengan tangan terlempar keluar dari pekerjaannya, dan tempatnya digantikan oleh peralatan bertenaga uap. Akibatnya, kehidupan banyak orang menjadi kacau. Mereka kehilangan kekuatan, hanya sejumlah kecil pribadi yang mampu memperoleh alat produksi modern dan mengambil keuntungan dari ekonomi bebas.

Kaum minoritas inilah yang dapat mempertahankan kebebasannya. Sebagai akibatnya, lapangan sosial menjadi lahan subur bagi permainan beberapa orang yang memiliki industri modern. Jumlah besar anggota masyarakat terpaksa mengalami kehidupan yang sengsara. Kelas menengah pun, yang hanya merupakan golongan minoritas, mencari bantuan kepada golongan industriawan yang berjumlah kecil di mana pendekatan kehidupannya adalah kapitalis semata-mata. Jelaslah bahwa minoritas yang kaya tidak menaruh simpati kepada mayoritas miskin itu, dan tidak pernah mau membagikan kekayaannya kepada mereka. Paham seperti ini adalah paham *individualisme, sekularistik, dan materialistik*.¹³

Jelaslah bahwa selama keuntungan pribadi terus berlaku sebagai tolok ukur moral masyarakat, dan pemerintah terus mendukung keempat bentuk kebebasan itu, maka mayoritas itu akan selalu tunduk dan bergantung pada kelompok kecil ini.

Suatu kelompok kecil yang memegang kekuatan ekonomi dan selalu berfikir hanya dari sudut motif-motif pribadi dan kebebasan individual,

¹³ Dumairy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, disampaikan pada Kuliah Umum peserta baru Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta, 22 September 1998, hal. 8-9

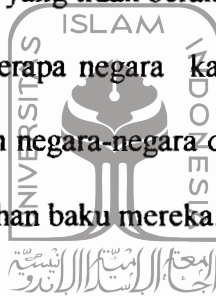
sesungguhnya mengeksploitasi kebutuhan-kebutuhan golongan mayoritas itu. Dalam banyak hal, para pekerja pabrik hanya memperoleh upah yang sedikit, yang tidak lebih dari kebutuhan dasarnya yang minimal.

Mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya adalah logika sistem ini. Ia membagi manusia menjadi dua kelompok: kelompok yang sangat kaya yang bersukaria di atas kemewahan besar, dan kelompok yang hidup dalam kemelaratan yang paling sengsara. Menurut prinsip kebebasan politik, persamaan dalam politik dianggap sebagai hak setiap warga negara. Tetapi jelaslah bahwa kebebasan ini hanya sesuatu yang khayal belaka di tengah kehadiran kebebasan pribadi dan kebebasan ekonomi. Seperti telah kami katakan, hasil tragis kebebasan ekonomi adalah terciptanya dua golongan yang berbeda secara eksterm itu. Kelompok yang paling kaya menguasai setiap aspek kehidupan dan menganggap bahwa kebebasan politik hanyalah hak eksklusifnya semata. Para kapitalis, karena sangat dominan dalam penguasaan ekonomi, membawa media massa ke bawah kekuasaan mereka. Mereka mengeluarkan uang untuk membeli dukungan dan membuat mesin pemerintahan berada di bawah kemauan mereka. Akibatnya, keunggulan sosial dan kekuatan legislatif jatuh ke dalam tangan beberapa kapitalis, yang merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Menurut konsep kebebasan politik seluruh rakyat seharusnya memiliki hak dalam pembuatan undang-undang dan seharusnya mampu mengubah sistem ini, tetapi dalam *kapitalisme demokrat*, minoritas menguasai mayoritas, dan beberapa orang mengeksploitasi sebagian besar orang lainnya.¹⁴

¹⁴Idem, *Al-Madrasah Al-Islāmiyyah* (Berut: t.tp, 1400 H/1980 M), hal. 13

Paham kapitalisme melihat masalah ini dari sudut pandangnya sendiri yang semata-mata materialis. Karena sistem kapitalis itu tidak didasarkan pada nilai-nilai moral atau spiritual dan tidak bertujuan lain kecuali kemakmuran dalam pengertian duniawi dan untuk memenuhi hawa nafsu yang lebih rendah di dunia fana ini, maka dari sudut pandangnya wajar apabila melanggar ketentraman negara-negara lain serta melancarkan agresi dengan maksud untuk merampas sumber-sumber alam dan mengeksploitasi pasar mereka. Dan hal ini tidak dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak beralasan dan tidak manusiawi.¹⁵

"Inilah sebabnya maka beberapa negara kapitalis memilih jalan perang, pertumpahan darah serta penjajahan negara-negara damai untuk merebut sumber-sumber alam dan memanfaatkan bahan baku mereka."¹⁶



II. Kritik terhadap Ekonomi Sosialisme

A. Kritik terhadap prinsip-prinsip Ekonomi

Ternyata ada berbagai macam merk sosialisme, yang paling terkenal dari semuanya adalah *Marxisme* yang didasarkan pada dialektika materialisme. Ia memiliki filsafat khusus untuk menjelaskan dialektikanya.

Menurut materialisme, teori dialektika sama berlaku bagi sejarah, masyarakat maupun ekonomi, dan oleh karena itu penafsirannya tentang alam semesta dan studi sejarah mencerminkan pendekatan filosofis yang sama. Dialektika adalah suatu paham ekonomi maupun strategi politik. Dengan kata

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal. 14

lain, materialisme memberikan suatu bentuk khusus kepada pandangan manusia tentang dunia dan pendekatannya terhadap kehidupan.¹⁷

Tidak bisa diragukan tentang fakta bahwa filsafat materialisme dan metode-metode dialektika¹⁸ bukanlah hasil penemuan *Marxisme*, karena dalam bidang filsafat kecenderungan materialis, kadang-kadang secara terbuka dan kadang-kadang dalam samaran *sufisme*, telah ada ribuan tahun yang lampau. Seperti itu pula, sebagian dari argumen-argumen dialektika sudah ada dalam pemikiran manusia. Sebagian lainnya dikembangkan oleh filosof idealis terkenal, Hegel, dan Karl Marx, yang mencangkokkan logika dialektik pada filsafat materialis serta mencoba menerapkannya pada semua bidang kehidupan.

Untuk tujuan ini dia melakukan dua kajian:

1. Dia menjelaskan sejarah melalui *Dialektikisme*
2. Dia menyingkap kontradiksi-kontradiksi “modal dan laba” dan menegaskan bahwa kapitalis mengecoh para pekerja dalam hal hasil kerja.

Berdasarkan atas kajiannya, dia meramalkan lenyapnya kapitalisme untuk memberi tempat bagi masyarakat komunis. Dia menganggap pembentukan masyarakat sosialis sebagai suatu langkah besar ke arah penerapan komunisme.

Jadi, menurut filsafat ini, skema konflik sosial tentang pertentangan antara kontradiksi-kontradiksi dan setiap hukum kemasyarakatan yang dominan dalam sesuatu masyarakat, adalah fenomena material sosial yang konsisten dengan fenomena yang lain dan kondisi-kondisi material yang ada. Akan tetapi, hukum

¹⁷Idem, *Keunggulan Ekonomi Islam*, hal. 73

¹⁸ Dialektika dalam marxisme dapat dibaca dalam Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 80-88

sosial ini bertahan, sebagai akibat kekuatan-kekuatan yang saling konflik, dan muncul ketika kondisi-kondisi sosial mengalami perubahan yang membuka jalan kepada suatu situasi baru.

Konflik dan perjuangan akan terus berlangsung sehingga terbentuk suatu masyarakat tanpa kelas di dunia, dan kepentingan-kepentingan individu terserap ke dalam kepentingan kolektif. Ketika itu kedamaian dan ketenteraman akan berlangsung dan semua jejak kapitalisme akan terhapus, karena kapitalisme lah yang telah membagi masyarakat menjadi majikan dan buruh, dan penyebab kebencian kelas. Oleh karena itu, perlulah menghilangkan sistem kelas dengan menenyapkan kepemilikan pribadi. Di sini kebijakan ekonomi sosialisme yang mendasar berbeda dengan kebijakan komunisme.

Apabila kita memperhatikan dengan seksama, maka menurut Sadr sistem ekonomi komunisme didasarkan pada tiga prinsip berikut.

Prinsip pertama: Komunisme hendak menghapus semua kepemilikan pribadi, termasuk perdagangan dan perindustrian. Menurut teori ini, negara sebagai wakil masyarakat yang sah, harus mengambil alih semua kekayaan itu dan memanfaatkannya bagi kebaikan umum.

Kepercayaan akan perlunya *nasionalisasi* adalah suatu reflek alamiah dari akibat-akibat buruk kepemilikan pribadi dalam sistem kapitalis. Itulah sebabnya maka tujuan *nasionalisasi* telah dinyatakan sebagai pelenyapan kelas kapitalis dan menyatukan semua kelas masyarakat ke dalam satu kelas, dengan tujuan menghilangkan pertentangan kelas dan akumulasi kekayaan di tangan para individu.

Prinsip kedua: Semua hasil produksi dibagikan sesuai dengan kebutuhan para individu, menurut kaidah, dari masing-masing sesuai kesanggupannya, dan kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap individu memerlukan kebutuhan-kebutuhan khusus, yang mustahil ada kehidupan tanpa itu, maka setiap orang dalam masyarakat harus berusaha sedapat-dapatnya demi kelangsungan hidupnya. Dengan

¹⁹ Idem, *Keunggulan Ekonomi Islam*, hal. 74-75

demikian maka masyarakat akan menjamin kebutuhan-kebutuhan individu.

Prinsip ketiga: Untuk menghindari timbulnya permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang khas bagi kemerdekaan yang tak terbatas dalam sistem kapitalis, pemerintah harus mempersiapkan suatu rencana ekonomi untuk produksi dan distribusi, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyat serta menetapkan jumlah dan bentuk produksi yang sesuai dengan kebutuhan itu.²⁰

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas telah diproklamasikan oleh para pemimpin komunis. Namun ketika mereka berkuasa, ternyata mereka tidak mampu menerapkannya dalam masyarakat. Maka mereka meninggalkan gagasan itu lalu menganggap bahwa sebelum menerapkan prinsip-prinsip komunisme perlulah mengadakan perubahan terhadap pemikiran individu. Mereka mengatakan bahwa akan datang saatnya pandangan-pandangan individu dan motivasi-motivasi perorangan menyerah kepada pembentukan pemikiran dan motivasi-motivasi kolektif. Ketika itulah manusia akan memusatkan perhatian pada kepentingan-kepentingan kolektif dan akan maju ke arah tercapainya kepentingan-kepentingan masyarakat.

Karena alasan ini maka komunis memandang sangat penting untuk melaksanakan sosialisme terlebih dahulu, dan secara berangsur-angsur mendidik rakyat dan merintis jalan bagi penerapan komunisme. Perubahan-perubahan besar telah dikenakan pada sistem komunis untuk menyesuaikan bentuknya dengan sistem sosialis:

1. Prinsip pertama komunisme yang menghendaki penghapusan kekayaan pribadi secara total telah dimodifikasi. Dan jalan perantara telah ditempuh hanya dengan nasionalisasi pabrik-pabrik besar, perusahaan-perusahaan besar serta perdagangan luar negeri. Pabrik-pabrik kecil dan perdagangan eceran dibiarkan dalam tangan para individu.

²⁰ *Ibid*, hal. 75-76

Perubahan ini harus dilakukan karena disadari bahwa prinsip asli *Ekonomi Komunis* menghapuskan kepemilikan pribadi, dan hal ini tidak sesuai dengan tabiat manusia, sebagaimana disadari bahwa dengan penghapusan kepemilikan pribadi tidak tertinggal lagi perangsang untuk bekerja keras. Rakyat tidak akan tertarik pada tugas-tugas kolektif, karena mereka sadar bahwa menurut sistem yang berlaku pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dan oleh karena itu penambahan usaha dianggap sia-sia, karena usaha-usaha ini tidak menghasilkan tambahan upah bagi mereka.

Dalam suatu sistem di mana tak seorangpun mempercayai sesuatu nilai selain nilai material kehidupan, mengapa maka seseorang harus bekerja ekstra keras demi kemakmuran orang lain? Oleh karena itu, para pemimpin komunis terpaksa mengubah teori mereka dan merasa puas dengan sekedar penerapan *nasionalisasi* yang terbatas.

2. Prinsip kedua komunisme juga diubah dengan memberikan rangsangan upah yang layak bagi para pekerja. Berbagai tingkatan upah ditetapkan.

Menyusul modifikasi ini, dikemukakan alasan bahwa perubahan-perubahan itu bersifat sementara dan diciptakan dengan maksud untuk memperoleh kemenangan atas bangsa-bangsa kapitalis serta membangun manusia baru. Jadi, kaum komunis terus-menerus mengubah teori mereka untuk mengimbangi kegagalan-kegagalannya, dengan berbagai cara. Bagaimanapun juga, sejauh ini mereka tidak mampu melenyapkan semua prinsip ekonomi kapitalisme. Sebagai contoh, mereka tidak mampu menghapus semua pinjaman berbunga, meskipun mereka memegang prinsip bahwa bunga adalah salah satu kejahatan ekonomi kapitalis yang mendasar.

Kegagalan ini tidak berarti bahwa para pemimpin komunis tidak bersungguh-sungguh dalam usaha mengangkat teorinya; yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa sementara mereka melaksanakan sistemnya, mereka harus menghadapi realitas tabiat manusia. Mereka menemukan bahwa cara mereka penuh dengan pertentangan. Oleh sebab itu mereka mengambil langkah mundur dengan harapan bahwa lambat laun akan dapat menerapkan sistem mereka yang menakjubkan itu seutuhnya.

3. Prinsip ketiga komunisme menyangkut aspek politik. Tujuannya dalam jangka panjang adalah akan menghapus lembaga pemerintahan dalam masyarakat.²¹

Tetapi selama masyarakat tanpa kelas belum mapan, sangatlah penting bahwa pemerintahan harus dipegang oleh para *proletariat*. Walaupun pemerintahan yang demikian akan bersifat pemerintahan demokrasi dalam

²¹ *Ibid*, hal. 77-78

lingkaran *proletariat* itu sendiri, dia akan bersifat diktator sehubungan dengan rakyat umum. Selama rakyat masih memiliki kecenderungan-kecenderungan perorangan dan pandangan-pandangan pribadi, suatu pemerintahan diktator diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kaum pekerja dan berusaha melenyapkan kekuatan-kekuatan kapitalisme untuk selama-lamanya.

Tidak seperti *demokrasi kapitalisme*, teori komunisme yang dikembangkan oleh Karl Marx memiliki ciri khas bahwa ia didasarkan pada suatu filsafat yang tegas. Oleh karena itu, dari sisi pandang filsafat, teori komunisme patut dipertimbangkan dan dapat diuji atas dasar dalil-dalilnya, sedangkan keaslian konsep-konsep ini menyangkut pandangan tentang kehidupan dan alam semesta.

Dapat dilihat dengan mudah pada pandangan sekilas bahwa kecenderungan umum komunisme, baik yang bermerek sosialis ataupun komunisme murni, adalah untuk meleburkan individu ke dalam masyarakat serta menggunakannya untuk mencapai keseimbangan umum yang diharapkannya. Dengan demikian maka komunisme bertentangan penuh dengan kapitalisme yang mengorbankan masyarakat demi kepentingan individu.

Dengan kata lain, kedua sistem ini terus bertentangan. Di satu sistem yang penting adalah kepribadian individu, sedang pada sistem yang lain kepentingan dilekatkan pada kepribadian kolektif.

Dalam sistem yang berdasarkan individualisme dan keuntungan pribadi, tentu saja si “individu” lah yang menang, namun masyarakat dikonfrontasi dengan berbagai kesukaran dan kesulitan ekonomi, yang karenanya sistem itu dirancang

untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertujuan melindungi kepribadian kolektif, juga gagal dan dalam sistem itu individu dihapuskan sama sekali dan sebagai akibatnya ia harus mengalami penderitaan yang tak tertanggungkan dan bahkan tak diizinkan sekalipun hanya untuk memikirkan hak-hak alamiahnya.

B. Kritik bahwa sosialisme-komunisme-marxisme hanyalah sebuah khayalan

Muhammad Bāqir Ṣadr mengatakan:

Meskipun dengan menghapus kepemilikan pribadi, komunisme mengatasi kesulitan-kesulitan dan penderitaan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme, “obat” ini sendiri pun memunculkan banyak problema baru yang pemecahannya ternyata sangat mahal. Nyatanya, sistem itu begitu sulit diterapkan sehingga tak pantas dilaksanakan kecuali bila semua metode lainnya telah gagal untuk mengatasi permasalahan manusia.

Bagaimanapun juga, komunisme hanyalah suatu pemecahan yang salah satu permasalahan sosial. Ia tidak dapat menjamin penghapusan semua keburukan sosial sebagaimana ia tidak tepat mendiagnosa penyebab utamanya dalam sistem kapitalisme dengan akibat bahwa ia meninggalkannya tanpa tersentuh. Itulah sebabnya mengapa dalam komunisme umat manusia tidak menemukan pemecahan yang positif atas permasalahannya.²²

Bentuk pemecahan yang dilakukan oleh komunisme ini menyebabkan terlalu banyak komplikasi. Komunisme hendak merebut kemerdekaan individu dan mengganti kepemilikan pribadi dengan kepemilikan kolektif. Akan tetapi, pada umumnya, perubahan yang besar ini terbukti bertentangan dengan tabiat manusia, karena orang materialis selalu berpandangan materialistis dan memandang kepentingannya dari sudut pribadi yang terbatas. Para pemimpin komunis yang terkemuka pun mengakui kegagalan mereka dalam hal ini.

²²*Ibid*, hal. 80-81

Dalam keadaan begini, penerapan suatu sistem baru yang menghapus individu dan mencabut motif-motif pribadi mereka, memerlukan suatu kekuatan yang dahsyat untuk meremukkan setiap oposisi dan untuk membuangkam semua ledakan protes. Dalam sistem ini perlu mempekerjakan semua media komunikasi untuk menguasai rakyat dengan tangan besi dan menghukum mereka atas dasar kecurigaan yang paling kecil sekalipun, sehingga tak seorangpun akan berani berpikir untuk berontak atau mengadakan revolusi. Tentu saja hanya inilah cara bagi penerapan suatu sistem yang tidak disukai rakyat.

Memang, hanya apabila seorang materialis dalam masyarakat mulai menaruh pandangan sosial secara eksklusif, bekerja untuk kepentingan kolektifnya dan melepaskan diri dari seluruh motif pribadi dan kepentingan diri sendiri, barulah mungkin untuk menerapkan sistem yang mengorbankan individu demi masyarakat dan tak ada tujuan selain tujuan kolektif. Akan tetapi, diperlukan suatu keajaiban untuk membawa perubahan semacam itu dalam pandangan si materialis yang hanya mempercayai kehidupan dunia yang terbatas ini dan yang baginya kehidupan hanyalah berarti mengejar kesenangan. Barangkali kaum komunis sedang menantikan suatu hari ketika dan akan lahir manusia baru yang pemikiran dan pekerjaannya ideal tanpa mempercayai nilai-nilai moral. Jika keajaiban seperti itu sampai berlaku maka posisinya akan berbeda.

Tetapi, kenyataannya adalah bahwa manusia tidak boleh kehilangan haknya walaupun hanya sebagian kecil, kecuali tentu saja bila dia dipaksa untuk itu. Jika tidak demikian, manusia harus berdiri di persimpangan jalan hasratnya untuk memilih antara hak-hak moral dan kebutuhan-kebutuhan materialnya dalam

menghadapi kenyataan, padahal ada suatu sistem untuk merukunkan aspek-aspek material dan moral.

Bagaimana manusia bisa mengharapkan kemerdekaan bilamana kemerdekaan hak dalam kehidupan pribadinya direbut dan bahkan makannya sehari-hari pun diawasi oleh lembaga khusus? Haruslah diingat bahwa kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan ekonomi adalah fondasi semua kebebasan.

Sebagian orang mengatakan: “Apa gunanya kemerdekaan pribadi atau hak bersuara dan mengkritik, bagi orang yang sedang merintih di bawah tekanan belenggu para kapitalis pengeruk harta?” Kemerdekaan mengeluarkan pendapat tidak akan bernilai selama kehidupan yang layak dan makanan yang sehat tak terjamin.

Orang-orang ini tidak mengenal sistem yang dapat bersaing dengan sistem mereka, kecuali sistem kapitalisme. Itu sebabnya maka untuk menjamin kemudi masyarakat, mereka mengorbankan martabat dan nilai individu.

Seorang manusia yang energinya diperas oleh orang lain, dan tidak menikmati kehidupan yang sehat, menyenangkan dan adil, serta kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, terampas hak kehidupannya yang benar karena dia dihalangi dari semua kesenangan. Demikian pula, orang yang terus-menerus terancam, yang semua gerakannya diawasi, yang selalu merasa dirinya dalam keadaan bahaya ditahan tanpa pengadilan dan yang selalu harus siap untuk dijebloskan ke dalam penjara, diasingkan atau dieksekusi, atas kekeliruan yang terkecil sekalipun, sewajarnya akan ketakutan dan murung. Sehingga kehidupanpun tidak akan memikat hatinya.

Di sisi lain, orang yang semua kebutuhannya terpenuhi dan keselamatan serta martabatnya terjamin, adalah sesungguhnya merupakan impian setiap orang. Tetapi, bagaimana impian ini akan terwujud dan kapan ia akan menjadi suatu kenyataan?

Sudah kami katakan bahwa komunisme telah menciptakan suatu komplikasi baru dan sampai pada penyelesaian yang keliru tentang problema sosial karena ia tidak menyentuh penyebab utama keburukan, dan nyatanya telah pula merusak sesuatu yang lebih dari itu. Itulah sebabnya, walaupun ia mencerminkan beberapa ambisi manusia, ia tidak berhasil.

Dalam kapitalisme, bukan kepemilikan pribadi yang merupakan sumber dari semua kesulitan dan tragedi yang telah menggoncang kedamaian dan ketentraman dunia. Bukan kepemilikan pribadi yang mencampakkan berjuta-juta karyawan dari pekerjaannya, tetapi hal itu merupakan akibat perkembangan dari peralatan-peralatan baru pada permulaan *revolusi industri*. Bukan kepemilikan pribadi yang menyebabkan pemalsuan yang tidak terbatas atas upah dan usaha. Lagi, bukan milik pribadi yang memaksa para kapitalis menghancurkan jumlah besar produk mereka untuk menjaga kestabilan harga dan dengan demikian dibuang sesuka hati daripada membantu fakir miskin dan orang melarat. Bukan kepemilikan pribadi yang memaksa kaum kapitalis menanam modal untuk memperoleh riba, terdorong untuk merampas hasil-hasil kerja buruh miskin dan mengisap darah mereka. Bukan kepemilikan pribadi yang memaksa kapitalis menimbun barang yang diperlukan rakyat dan memperoleh keuntungan besar sekali dengan menjualnya dengan harga yang membumbung tinggi. Akhirnya, bukan kepemilikan pribadi yang memaksa para kapitalis membentuk pasar-pasar

baru bagi mereka sendiri walaupun dengan mengorbankan kedaulatan bangsa-bangsa lain.

Semua praktek yang menyedihkan ini adalah hasil dari pandangan materialis dan untuk mengeruk keuntungan yang berlebihan, bukan karena kepemilikan pribadi. Materialismelah yang telah menjadi tolok ukur kehidupan dalam sistem kapitalisme dan yang membolehkan kaum kapitalis berkubang dalam praktek buruk dan transaksi-transaksi zalim

Kesulitan dan bencana tersebutlah yang patut diharapkan dari masyarakat yang berdasarkan materialisme dan individualisme, penyebab utama seluruh keburukan masyarakat manusia. Permasalahan manusia hanya mungkin dipecahkan apabila standar itu diubah secara menyeluruh dan ditetapkan tujuan-tujuan kehidupan yang baru, yang sesuai dengan fitrah manusia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD BĀQIR ṢADR DALAM *IQTISĀDUNĀ*

I. Elemen Dasar Ekonomi

Dalam pembahasan ini, Ṣadr menjelaskan dua kasus perjumpaan antara konsep-konsep syariat dengan tantangan kontemporer. Islam sebagai sebuah ideologi abadi yang universal berhadapan dengan penawaran-penawaran lainnya, terutama dari pandangan dunia legal Barat.

Menurut Ṣadr, ekonomi Islam merupakan sebuah kombinasi dari tiga elemen dasar, yakni doktrin (العقيدة), konsep-konsep (المفاهيم), rasa (emosi batiniah) (العواطف والأحاسيس).¹

Citra masyarakat Islam yang digambarkan, serupa dengan objek dari historiografi modern,² yaitu ibarat sebuah bangunan: “Hubungan yang ada di antara setiap aspek dalam rancangan masyarakat Islam yang agung (*tasmīm*) sebagai perbandingannya ibarat sebuah bangunan indah yang tergambar di atas sehelai peta (*kharīṭah*) yang disusun oleh arsitek yang paling terampil. Adalah tidak mungkin menggambarkan keindahan dan keanggunan yang diinginkan sang arsitek jika peta ini tidak direalisasikan dalam keseluruhan elemennya, begitulah desain Islam”³

¹ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, (Berut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'ah, 1401 H/1981 M), hal. 309-310

² T. Bottomore dan P. Goode, *Reading and Marxist Sociology*, (Oxford: t.p, 1983), hal. 49-50

³ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 310-311

Bagaimanapun tidaklah mungkin, demikian dinyatakan Şadr, untuk memikirkan seluruh unsur kehidupan sosial dalam sebuah buku tunggal mengenai ekonomi. Cukuplah dengan menyimpan generalisasi-generalisasi ini di dalam benak kita. Pentingnya latar belakang yang kompleks diilustrasikan melalui dua konsep khusus tentang properti pribadi dan profit. Properti pribadi memasukkan sebuah hak perlindungan yang memerintahkan tanggung jawab dan kemutlakan yang terbatas, sedangkan profit/keuntungan lebih daripada sekedar perhitungan sederhana⁴. Juga, “larangan riba, jika dianggap berada dalam isolasi, dapat menjadi sumber masalah yang membahayakan kehidupan ekonomi”, dan hanya dapat diraih dalam suatu totalitas yang memasukkan “aturan-aturan *mudārabah* sebagai tindakan mempercayakan sejumlah materi untuk dijalankan sebagai modal usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang seimbang), dari keseimbangan sosial, solidaritas, dan keuangan Islam”⁵.

Dengan demikian, maka ekonomi Islam dalam pandangan Muhammad Baqir Şadr adalah sebagai bagian dari sistem yang universal, dia adalah bagian dari syari'at Allah yang bersifat universal. Karena ia adalah bagian dari syari'at Allah, maka ia bukanlah sains yang bersifat permanen dan temporal, akan tetapi ia merupakan doktrin agama yang memiliki kebenaran mutlak. Ia adalah *hudūd* atau batasan-batasan/undang-undang yang turun dari Sang Maha Agung yang lebih mengetahui yang terbaik bagi kehidupan manusia.

⁴ *Ibid*, hal. 312

⁵ *Ibid*, hal. 312-316

Ekonomi Islam berada di atas landasan yang menyatu antara aqidah (keyakinan), logika, dan emosi-emosi positif, sehingga dengan demikian ia membawa misi kemanusiaan (logis dan mengakomodir naluri dasarnya yang ada pada manusia). Atau dengan kata lain bahwa ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang sesuai dengan hati nurani manusia yang menurut Muhammad Asad merupakan kelanjutan dari fitrah atau kejadian asal yang suci pada manusia.⁶

II. Prinsip Ekonomi Islam

Sadr mengatakan bahwa ada tiga prinsip dasar atau kerangka umum sistem Islam: “properti multilapisan (*multifold property*)” (مبدأ الملكية المزدوجة), “kebebasan ekonomi yang terbatas” (مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود), dan “keadilan sosial” (مبدأ العدالة الاجتماعية).⁷

A. Properti multilapisan

Prinsip yang pertama adalah properti multi-lapisan (*multifold property*). Perbedaan esensial antara Islam, kapitalisme dan sosialisme, bagi Sadr terletak pada sifat properti yang diadopsi oleh setiap sistem⁸. Apabila “sebuah masyarakat kapitalis adalah suatu masyarakat yang menjadikan properti pribadi sebagai prinsip dasarnya, dan mempertimbangkan (bertindak seakan-akan) nasionalisasi sebagai kekacauan peraturan”, atau sebuah prinsip yang membebaskan individu untuk memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa

⁶ Muhammad Asad, *The Message of The Qur'an*, (Gibraltar: Dār Al-Andalus, 1980), hal. 621

⁷ Chibli Mallat, *Menyegarkan Islam*, alih bahasa Santi Indra Astuti, cet. I, (Bandung: Mizan, 1421 H/2001 M), hal. 171. Lihat juga Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 295

hambatan,⁹ sedangkan “sebuah masyarakat sosialis adalah suatu masyarakat yang menjadikan properti sosialis (*isytirākiyyah*) sebagai prinsipnya, , maka sebuah masyarakat Islam akan berbeda dengan keduanya dengan mengakui secara simultan berbagai tipe properti yang berbeda.¹⁰ Bentuk-bentuk ini terdiri dari tiga jenis: Pribadi, publik (*‘āmm*), dan “milik pemerintah (*milkiyyah al-daulah*). Rangkaian definisi tersebut sangat spesifik, dan berdiri sendiri di dalam sebuah perbedaan yang dsangat mendasar dengan paham sosialis dan kapitalis.

B. Kebebasan ekonomi yang terbatas

Dua batas menghalangi kemutlakan properti pribadi.

Batasan *pertama* bersifat subyektif, dan berasal dari nilai-nilai moral pembagian-kesejahteraan yang diajarkan Islam. Nilai-nilai ini tidak dapat dikuantitatifkan dan bersifat independen dari paksaan/tekanan negara. Setiap (kewajiban) kedermawanan individual dalam berbagai kekayaannya dengan yang lain berbeda-beda, namun unsur ekonomi dari faktor subyektif ini tidak seberapa penting dibandingkan konstribusinya pada penyusunan masyarakat Muslim. Şadr mengatakan bahwa nilai-nilai ini telah membuktikan makna yang paling berharga yang dianugerahkan agama terhadap individu. Dalam arus sejarah Islam, kekuatan dari faktor individual subyektif ini telah menjadikan masyarakat Islam mampu

⁸ *Ibid*, hal. 257

⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam)*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 2

¹⁰ Muhammad Bāqir Şadr, *Iqtisādunā*, hal. 258

bertahan menghadapi berbagai perubahan dunia yang telah menimpa dunia Muslim.

Batas *kedua* bersifat obyektif, dan secara hati-hati didefinisikan oleh hukum. Batas ini berfungsi pada dua level. Pada level yang lebih tinggi, syari'at telah meletakkan dalam sumber-sumber umumnya (al-Qur'an dan Sunnah) larangan sebuah tatanan aktivitas sosial dan ekonomi seperti larangan 'riba' dan monopoli (*ihtikār*).¹¹ Pada level yang lebih rendah, syari'at mengatur "prinsip pengawasan dan campur tangan penguasa dalam kehidupan publik yang diterima oleh seluruh Muslim sesuai dengan perintah-perintah Al-Qur'an.¹² Bisa jadi, terdapat ketidaksepakatan di sini menyangkut metode "perjanjian, dan tentang prerogatif-prerogatif serta kualitas-kualitas) penguasa. Namun, sang penguasa tidak dapat menentang ketentuan-ketentuan legal yang telah diputuskan pada level yang lebih tinggi seperti "larangan riba, penipuan, pembatalan hukum-hukum waris¹³, atau tekanan pada salah satu bentuk properti yang diterima dalam masyarakat".¹⁴

C. Keadilan sosial

Ṣadr menyadari bahaya generalisasi yang tidak efisien adalah tidak memadai untuk mengetahui dalam Islam bahwa ia menyerukan (*munāda*) keadilan sosial, ia juga harus mengetahui perincian penggambaran-penggambaran keadilan,

¹¹ *Ibid*, hal. 262

¹²Sebagaimana dalam Annisā (4) : 58

¹³ Referensi tentang pewarisan ini dapat dilihat dalam konteks Irak

dan signifikansi Islami mereka secara tepat”. Prinsipnya tidaklah terletak secara penuh pada poin ini. Şadr mengemukakan sebuah klasifikasi konsep keadilan sosial dibagi menjadi dua sub-prinsip, “solidaritas publik, (تکافل عام) dan “keseimbangan sosial, (توازن اجتماعي)¹⁵

Perhatian pada perinciannya dikatakan akan disuplai dari “dua karakteristik dasar: realisme dan moralisme (*akhlāqiyah*)”. Realisme memerintahkan bahwa, tidak seperti komunisme yang menikmati angan-angan mengapung di angkasa yang mulia dan ekonomi yang imajinatif, serta berkubang dalam perintah tujuan-tujuan yang digambarkan dari keadaan-keadaan material dan kondisi-kondisi alami yang tidak berhubungan dengan manusia. Islam justru berkeras menentang godaan ilusi-ilusi satu realisme yang memabukkan –yang kendati diperhitungkan sebagai sifat-sifat egoistik manusia namun disadari tidak dapat dihindarkan— dan melawan pelanggaran suatu etika yang mampu mencegah pembatalan keadilan sosial tanpa adanya suatu kerangka pedoman kerja dari pendidikan moral agama.¹⁶

Dari konsep koreksi moral, Şadr menyimpulkan sebuah dimensi ekonomi utilitarian. Unsur psikologis, sebagaimana dalam Marxisme, semestinya tidak diabaikan sebagai sebuah komponen kunci ekonomi karena ia terkandung dalam hukum penawaran dan permintaan. Dimensi moral memainkan sebuah peranan besar dalam bidang ekonomi karena mempengaruhi peristiwa-peristiwa krisis

¹⁴Muhammad Bāqir Şadr, *Iqtisādunā*, hal. 263

¹⁵ *Ibid*, hal. 265

¹⁶ *Ibid*, hal 266

bersiklus ulang yang telah mewabah dalam ekonomi Eropa (semisal kapitalis-industri).

III. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi kapitalisme bagi Şadr adalah kurangnya sumber-sumber alam ¹⁷ (قلة الموارد الطبيعية نسبيا او نظرا إلى أن الطبيعة محدودة) untuk memenuhi tuntutan keinginan manusia.¹⁸ Bagi Sosialisme, masalah ekonomi adalah kepincangan antara pola produksi dengan distribusi.¹⁹ (التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع)

Şadr menolak pernyataan seperti ini, karena menurutnya Islam tidak mengenal adanya sumber daya terbatas. Dalil yang dipakai adalah al-Quran: ²⁰

الله الذى خلق السموت والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرت رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دأعين وسخر لكم الليل والنهار. واتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

Dengan demikian karena segalanya telah terukur dengan sempurna, maka Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia.²¹

Islam tidak menyetujui pandangan kapitalisme, karena Islam mempertimbangkan bahwa alam memiliki sumber-sumber yang berlimpah bagi manusia. Islam juga tidak menyepakati pandangan sosialisme dalam hal bahwa

¹⁷ *Ibid*, hal.346

¹⁸ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 179. Lihat juga Idem, *Iqtisādunā*, hal 346

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ibrāhīm (2): 32-34

²¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi I, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hal.

masalahnya terletak bukan pada kepincangan antara produksi dan distribusi, namun pada faktor manusia itu sendiri. Seiring dengan argument Muhammad Bāqir Ṣadr di atas, maka Taqyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa pandangan kapitalisme dan sosialisme terhadap masalah ekonomi tersebut hanyalah berorientasi semata-mata pada materi dari kehidupan manusia.²²

Ketidakadilan manusia mewujudkan dengan sendirinya dalam bidang ekonomi sebagai distribusi yang buruk, karena manakala ketidakadilan dibasmi dari bentuk-bentuk distribusi sosial, dan kapasitas-kapasitas umat manusia dimobilisasi untuk mengeksploitasi sumber-sumber alami, maka masalah sebenarnya bukan lagi permasalahan ekonomi.

Tekanan Ṣadr sebagaimana dalam *Iqtisādunā* dengan demikian didasarkan pada distribusi, dan pada cara-cara yang Islam telah mengorganisasi distribusi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekayaan ekonomi melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber alam. Konsep distribusi membentuk bundelan ekonomi Islami yang dianalisis oleh Ṣadr dan pembagian utama buku tersebut)memisahkan distribusi sebelum produksi (التوزيع ما قبل الإنتاج dan distribusi sesudah produksi (التوزيع ما بعد الإنتاج)

Sebelum melaju pada deskripsi skema distribusional, Ṣadr menyimpulkan bagian perkenalan batas-batas wilayah ekonomi Islam dengan beberapa penjelasan mengenai dua konsep esensial mengenai doktrin, kebutuhan dan kerja, dari perspektif syari'at.

²² Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nizām Al-Iqtisād fī Al-Islām, (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif-Perspektif Islam)*, alih bahasa Moh Maghfur Wachid, Cet. VII, (Surabaya: Rislaha Gusti, 1996), hal. 5

IV. Distribusi

A. Perangkat Distribusi dan Peran Kerja dan Kebutuhan dalam Distribusi

Pusat dari perspektif legal adalah fakta bahwa distribusi diidentifikasi sebagai wilayah tempat masalah pokok ekonomi masyarakat terjadi.²³ “Perangkat-perangkat” distribusi dengan demikian didiskusikan Muhammad Bāqir Ṣadr melalui dua konsep yang menopangnya, kebutuhan dan kerja. “Perangkat-perangkat distribusi (جهاز التوزيع) dalam Islam dinyatakan oleh dua peranti esensial: yaitu kerja dan kebutuhan²⁴ (جهاز التوزيع في الإسلام يتكون من أدتين رئيسيتين، وهما العمل والحاجة).

“Dari perspektif Islami, kerja adalah alasan bagi kepemilikan pekerja atas hasil dari pekerjaannya.²⁵ (فإن العمل إذن أساس لتملك العامل) Kepemilikan pribadi yang didasarkan pada pekerjaan adalah sebuah dorongan alami manusia untuk mencocokkan hasil pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Konsekuensinya, yakni:

Komunisme berpandangan bahwa pekerjaan merupakan alasan bagi masyarakat dan bukan bagi individu atas kepemilikan²⁶ (إن العمل سبب لتملك المجتمع لا الفرد). Peraturan sosialis adalah pekerjaan merupakan penyebab/penentu nilai komoditas, dan karena itu menjadi alasan bagi kepemilikan pekerja atas komoditas tersebut. Karena ketika seorang pekerja mengekstraksi sebutir mutiara, ia dengan demikian

²³ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 180

²⁴ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 348

²⁵ *Ibid*, hal. 352

²⁶ *Ibid*

tidak memberikan nilai pada mutiara tersebut, namun ia memilikinya melalui pekerjaan ekstraksinya²⁷

Secara singkat dapat dikatakan bahwa peran kerja dalam komunisme adalah sebagai alat produksi, sosialisme menjadikan kerja sebagai penentu nilai tukar suatu barang, sedangkan Islam menjadikan kerja itu sebagai sebab kepemilikan seorang pekerja atas barang yang diperolehnya dari kerja tersebut.

Dalam teori Şadr, konsep kebutuhan berfungsi dalam suatu cara yang spesifik bagi Islam. Ia menerangkan bahwa dalam teori sosialis, kebutuhan dihalangi oleh sentralitas kerja. Setiap masyarakat terdiri dari tiga strata utama – sebuah kelompok yang bekerja dan membelanjakan apa saja yang dibutuhkannya bahkan lebih (فئة قادرة بما تتمتع به من مواهب وطاقات فكرية وعملية علي توفير معيشتها في مستوى مرفه غني), kelompok lain yang bekerja namun hidup di bawah kebutuhan-kebutuhan dasarnya (لا يستطيع أن تعمل ولكنها لا تنتج في عملها إلا ما يثبغ ضروراتها ويوفر لها حاجتها الأساسية), dan sebuah kelompok yang tidak dapat bekerja karena berbagai alasan (لا يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية)²⁸

Dalam logika lurus teori sosialisme, kelompok terakhir ini dikutuk karena pada dirinya tidak terdapat suatu apa pun menjustifikasi penghasilannya sebagai suatu bagian dari pengeluaran umum dalam operasi distribusi. Hal ini sebagaimana juga dikatakan oleh Abdurahmān Al-Maliki adalah sesuai dengan kaidah "Dari masing-masing sesuai kemampuan dan untuk masing-masing sesuai pekerjaannya

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hal. 353

(من كل حسب قوته أى قدرته ولكل بنسبة عمله)²⁹. Ini berdiri sebagai suatu kontrak yang tajam dengan Islam yang kebutuhan adalah sebuah komponen distribusi yang esensial, dan diatur oleh prinsip moral “jaminan umum dan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam”.

B. Properti pribadi

Bersama kebutuhan dan kerja, elemen ketiga bagi Sadr menopang teori distribusi Islam: pandangan orisinal Islam mengenai properti. Ketika Islam mengizinkan bangkitnya kepemilikan pribadi berdasarkan kerja, ia menentang baik Sosialisme maupun Kapitalisme dalam hak-hak yang dianugerahkan bagi sang pemilik.

Dalam hal ini, lagi-lagi Islam berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme-komunisme, karena tidak satupun dari keduanya itu yang berhasil dalam menenmpatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialis.³⁰

Dalam Islam, bekerja adalah konsep mendasar yang menurunkan properti.³¹ (العمل فى نظر الإسلام سبب الملكية العامل لنتيجة عمله). Seluruh bentuk properti karena itu harus dikualifikasikan. Dalam perspektif ini, properti menjadi sebuah elemen sekunder distribusi, dan selalu dibatasi oleh satu tananan nilai moral dan

²⁹ Abdurrahmān Al-Maliki, *As-Siyāsah Al-Iqtisādiyyah Al-Muṣlā*, (*Politik Ekonomi Islam*), alih bahasa Ibnu Sholah, Cet. I, (Jatim: Al-Izzah, 2001), hal. 20

³⁰ M.A. Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice, (Teori dan Praktek Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal.64

³¹ *Ibid*, hal. 351

kepentingan-kepentingan sosial yang dikukuhkan melalui agama. Peraturan umumnya adalah bahwa kepemilikan pribadi muncul hanya dalam barang-barang (*amwāl*) yang telah dilunakkan dalam komposisi-komposisi mereka atau beradaptasi dengan kerja manusia, terkecuali barang-barang dan sumber natural yang tidak bercampur dengan pekerjaan. Tanah sebagai contoh, adalah sebuah komoditas dalam undang-undang yang kerja tidak dapat memasukinya. Ia tidak bisa dimiliki sebagai properti pribadi.

Elemen ketiga yang membentuk basis distribusi perangkat-perangkat Islam diringkas oleh Şadr sebagai berikut:

Kerja adalah alat distribusi paling primer dipandang dari sudut kepemilikan³² (إن العمل هو الأدوات الرئيسية الأولى). Orang yang bekerja di alam memetik buah kerjanya dan memilikinya. Kebutuhan adalah alat distribusi primer sebagai pernyataan sebuah hak manusia yang bersifat esensial dalam kehidupan. Masyarakat Islam mengakui dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial.

Properti adalah alat distribusi sekunder, melalui aktivitas komersial yang diizinkan Islam dalam syarat-syarat istimewa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan sosial.

Prblem sosial yang paling mendasar adalah ketidakadilan, dengan demikian dijelaskan secara ekonomis oleh Şadr dalam konteks distribusi. Kebanyakan isi *Iqtisāduna* diabdikan untuk menjelaskan sebuah sistem distributif Islami yang bersumber dari kewajiban-kewajiban dalam hukum Islam di bidang ekonomi.

³² *Ibid*, hal. 352

C. Sirkulasi

Pertama, dia menjelaskan secara singkat pertanyaan-pertanyaan ringan mengenai perputaran/sirkulasi (*tadāwul*), yang dikemukakannya sebagai sebuah wilayah lain tempat ketidakadilan diciptakan, mengingat uang menjadi sebuah komoditas yang siap untuk ditimbun atau digunakan tidak dimaksudkan guna memfasilitasi sirkulasi sebagai sebuah objek kekayaan. Inilah yang merupakan tipikal dari masyarakat kapitalis. Kapitalisme memisahkan uang dari pemanfaatan sirkulasinya, dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Namun, keseimbangan yang tepat diperbaiki melalui tiga syarat esensial syariat: pembayaran pajak-pajak (*zakat*) yang secara langsung membelokkan kecenderungan menimbun harta, larangan atas riba, dan campur tangan penguasa yang sekehendaknya.³³

Ekonomi Islam adalah sebuah jalan tengah, yaitu membantu dalam menegakkan system yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan satu system pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip utama dari system ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan menuju pada sirkulasi kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya terfokus pada beberapa golongan tertentu.³⁴

³³ *Ibid*, hal 322

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin*, jilid II, hal. 93

Kemudian, ia berargumentasi bagi kebutuhan untuk membangun hubungan erat secara metodologis di antara hukum dan ekonomi, dan peranan syariat yang sesungguhnya dalam penemuan disiplin ekonomi Islam.

Muhammad Bāqir Ṣadr melihat adanya kepincangan antara pandangan komunisme dan sosialisme di atas, dengan mengatakan bahwa antara pekerjaan dan kebutuhan itu ada hubungan positif. Kalau komunisme terlanjur memperhatikan aspek kebutuhan tanpa melihat perbedaan jerihpayah seseorang dalam pekerjaan sehingga menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi, sementara sosialisme terlanjur memperhitungkan aspek keseimbangan antara pekerjaan dan hasil yang harus diperoleh seorang pekerja sehingga lupa pada aspek sosial itu sendiri, yakni adanya kelompok manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, yakni orang-orang cacat, orang tua lanjut usia dan anak-anak.

V. Teori Distribusi Praproduksi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa menurut Ṣadr, substansi ekonomi Islam terpusat pada analisis perangkat-perangkat distributif Islam sebagaimana dapat diterangkan dari naskah-naskah legal.³⁵

Distribusi terbagi dalam dua kelompok, yakni distribusi sebelum produksi (توزيع ما قبل الإنتاج) dan distribusi pascaproduksi (توزيع ما بعد الإنتاج). Di bawah bagian pertama, empat faktor diidentifikasi sebagai sumber-sumber alam untuk produksi (مصادر التبعية للإنتاج): (1) tanah; (2) materi-materi kasar, kebanyakan berupa

³⁵ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 191

sumber-sumber pertambangan; (3) air; dan (4) sisa dari sumber-sumber alam³⁶ (laut, mutiara, binatang-binatang liar, dan lain-lain).

Di zaman modern, akses pada tanah dipertimbangkan sebagai faktor ekonomi yang paling penting. *Iqtisādunā* mendedikasikan bagian terpanjangnya untuk menganalisis hak-hak yang terkait dengan tanah.

Dalam upaya Sadr mempelajari para *fuqahā* klasik, kepemilikan tanah tidak dapat dipisahkan dari cara sebuah tanah tertentu berada di bawah pemerintahan Islam: “Kepemilikan tanah di Irak berbeda dengan kepemilikan tanah di Indonesia karena Irak dan Indonesia berbeda dalam cara mereka menyambut Islam”. Tiga tipe umum tanah dapat diturunkan dari pola historis: (1) tanah yang “menjadi Muslim” melalui penaklukan (*fath*), seperti di Irak, Mesir, Suriah, Iran, dan “berbagai bagian Dunia Islam”; (2) tanah yang menjadi Muslim melalui persuasi (*da'wah*), dan (3) tanah persetujuan (*sulh*).³⁷

A. Tanah

1. Tanah taklukan (الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح)

Tanah taklukan terdiri dari (a) tanah yang dimakmurkan manusia pada waktu penaklukan, (b) tanah mati pada waktu penaklukan, dan (c) tanah yang makmur secara alami.³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 433-440

³⁷ *Ibid*, hal. 473

³⁸ *Ibid*, hal. 442 dan 457

a. Tanah yang dimakmurkan manusia

Baik para fuqaha Sunni maupun Syi'ah, tulis Sadr, setuju bahwa tanah taklukan yang ditanami pada saat kemenangan Islam adalah milik seluruh muslim. Kepemilikan pribadi dengan demikian konsekuensinya adalah dilarang. Buah-buahan dan keuntungan yang dipetik para penggarap tanah ini, secara prinsip, merupakan properti komunitas (*al-milkiyyah ammah*), dan para pekerja yang mengeksploitasi tanah tersebut harus membayar bea pada negara seolah ia hanya menyewanya. Harga sewa itu disebut *kharaj*³⁹, dan konsekuensinya, tanah tersebut diklasifikasikan sebagai tanah *kharaj*. Tidak terdapat kepemilikan pribadi atas tanah *kharaj*. Bagian ini jatuh di bawah kontrol publik. Sadr berhati-hati untuk menspesifikasikan bahwa kontrol dalam kasus ini berbeda dengan nasionalisasi. Kepemilikan negara atas tanah *kharaj* digambarkan sebagai "publik" (*ummah*). Untuk mengklarifikasikan perbedaan antara nasionalisasi dan properti publik, ia menyitir penolakan Khalifah Rasyid kedua 'Umar ibn Khatthab, untuk membagi tanah taklukan kepada para serdadu karena tanah berbeda dengan barang rampasan perang (*ganīmah*). Tidak seperti rampasan perang, yang didistribusikan di antara orang Muslim, tanah taklukan diperuntukkan bagi properti *ummah* untuk selamanya.

Properti publik tanah dalam Islam adalah sesuatu yang orisinal. Ia bukanlah suatu nasionalisasi yang terjadi pada fase sesudahnya, setelah penetapan

³⁹ Hak yang diberikan Allah swt kepada kaum muslimin dari kaum kuffar. *Kharaj* adalah hak yang dikenakan atas tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kuffar baik dengan cara perang maupun damai, Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun*, hal. 260

prinsip kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atas tanah taklukan berkaitan dengannya sebagai suatu karakter orisinal⁴⁰.

Kepemilikan tanah publik yang makmur dan menjadi milik Muslim lewat penaklukan dikenai ketentuan-ketentuan legal berikut ini:

- (1) Tanah tersebut bukanlah subjek aturan-aturan suksesi dan warisan
- (2) Tanah tersebut tidak menjadi subjek pengasingan atau untuk semua bentuk kontrak, kecuali bagi penyewa antara penggarap dan negara yang diwakili oleh imam. Shadr mengutip *faqih* Syi'ah, Muhammad Ibn Hasan Al-Thusi (w. 460/1067): "Tidak ada hak untuk menjual, membeli, menjualkan, mewariskan, atau menyewakan kembali tanah tipe ini."
- (3) Kepala negara (*wali al-amr*) dianggap bertanggung jawab atas kontrol upaya penyuburan tanah, dan atas *kharaj* yang dikenakan pada penyewa.
- (4) *Kharaj* yang dibayar oleh penggarap adalah milik publik.
- (5) Segera setelah penyewaan berakhir waktunya, tanah menjadi bebas dari penyewa sebelumnya.
- (6) Jika suatu tanah yang makmur memburuk keadaannya, tanah itu akan tetap mempertahankan karakter publiknya, dan penyuburannya kembali (pengembalian keadaan yaang buruk menjadi membaik atau *ihyā'*), tetap tidak membolehkan orang yang memperbaiki keadaannya menjadi pemiliknya.

Akhirnya, sebagaimana pula seluruh tipe tanah, tanah makmur menjadi (milik) Muslim melalui penaklukan ditentukan secara historis, dan berdasarkan basis tersebut kita membutuhkan sekumpulan informasi historis mengenai tanah-

⁴⁰ Lihat *Ibid*, hal 442-457

tanah Muslim dan bagaimana keadaan kemakmuran mereka pada saat penaklukan berlangsung guna keperluan praktik hari ini, sehingga kategori yang layak untuk setiap tipe tanah dapat dispesifikasikan. Untuk menemukan apakah suatu kapling tertentu makmur atau tidak, diperlukan suatu investigasi historis yang cermat.

b. Tanah mati pada masa penaklukan

Seperti tanah *kharaj*, tanah ini bukan subyek kepemilikan pribadi. Namun, statusnya berada di bawah kategori properti Negara (*milkiyyah al-daulah*).⁴¹ Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman.⁴² Baik properti negara maupun properti publik tampaknya serupa, dalam hal bahwa mereka memperlihatkan kepemilikan yang serupa, yang bertentangan dengan kepemilikan individual. Namun, properti negara terikat pada posisi tertentu, misalnya pada pemimpin, sementara properti publik terikat pada komunitas (*al-'ummah*). Perbedaan ini penting dalam skema Sadr karena sistem pemerintahan legal yang berbeda-beda diturunkan dari kategori masing-masing. Perbedaan-perbedaan legal utama digambarkan sebagai berikut:

(1) Eksploitasi tanah *kharaj* (properti publik) menguntungkan seluruh komunitas.

Wali al-amr tidak dapat menggunakannya demi kepentingan seseorang atau suatu kelompok tertentu. Ia harus mengeksploitasinya bagi keuntungan komunitas secara keseluruhan, misalnya dengan menggunakan uang *kharaj*

⁴¹ *Ibid*, hal 457

⁴² Semua tanah baik yang tidak didiami maupun tidak dimiliki oleh seorang itu dianggap sebagai tanah Negara dalam Negara Islam, dan demi kepentingan masyarakat umum, Negara Islam senantiasa memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Afzalurrahman, *Doktrin*, jilid II, hal. 237

untuk mendirikan sekolah-sekolah atau rumah-rumah sakit umum. Sebaliknya, *wali* memiliki peluang di tanah mati yang jatuh di bawah kepemilikan negara karena sang *wali* (berhak) memutuskan apakah suatu kepentingan khusus akan mendapat keuntungan dari penyuburan tanah itu kembali.

- (2) Sang penguasa (*imām*) berhak menganugerahkan seorang individu kepemilikan atas sebuah tanah matijika ia menganggapnya suatu kepentingan umum. Tindakan seperti ini sama sekali terlarang dalam kasus properti publik.
- (3) Sebuah kontrak penjualan atau penyewaan dapat mempengaruhi tanah mati.
- (4) Dalam kasus tanah mati yang disuburkan kembali, *imām* dapat menganugerahkan sang penggarap sebuah hak istimewa, kendatikontrol (*raqbah* atau *ruqbah*) tetap menjadi hak prerogatif negara.⁴³

Perbedaan utama antara tanah mati dan tanah makmur pada masa penaklukan muncul dalam konsekuensi-konsekuensi penghidupan mereka kembali. Dalam kasus tanah makmur, perbaikan/penghidupan kembali itu tidak menambah satu hak istimewa bagi sang penggarap, kendati tanah tersebut bisa jadi ditinggalkan dalam keadaan kering kerontang. Penyuburan tanah kembali, sebaiknya, menganugerahkan sang penggarap sebuah hak istimewa. Sebuah hadis dikemukakan guna mendukung perbedaan tersebut: “Siapa pun yang mengembalikan kesuburan tanah yang bukan milik siapa pun, maka orang tersebut memiliki satu hak yang lebih baik atas tanah itu”⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hal. 469

⁴⁴ *Ibid*, hal. 462

Terdapat sebuah kontroversi seperti apakah tanah dalam kasus ini akan berubah statusnya dari milik negara menjadi tanah milik pribadi. Beberapa ulama mempertimbangkan hal tersebut sebagai kasus sesungguhnya, namun Sadr bersandar pada interpretasi Al-Thusi yang lebih ketat, sesuai dengan pada siapa tanah tersebut mempertahankan status inisialnya, kendati sang penggarap yang menyuburkannya kembali dapat memperoleh keuntungan dari usahanya dan mencegah orang lain untuk bersaing dengannya di tanah yang sama selama ia masih menggarap tanah tersebut. Ia, bagaimanapun, menjadi subjek bagi sebuah pajak istimewa, *tasq*, yang dikenakan oleh *imām* sesuai dengan profit yang diperolehnya dari pengeksploitasian tanah itu.

“Dengan demikian, “simpul Sadr,” perbedaan antara petani yang menggarap properti publik dan petani yang menggarap properti negara adalah bahwa yang pertama hanya sekedar seorang penyewa, *musta’jir*. Sang *imām*, selaku tuan tanah, dapat membiarkan tanah tersebut untuk orang lain begitu penyewaan berakhir. Sedangkan yang terakhir yaitu petani yang mengerjakan milik negara memiliki sebuah hak atas tanah tersebut yang konsekuensinya memberinya hak untuk menikmati hasilnya (*intifā’*), dan akan meneruskan pencegahan bagi yang lain untuk menggarap tanah selama ia masih merawat dan memakmurkannya.”⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hal. 422

c. Tanah yang makmur secara alami

Tanah ini didefinisikan sebagai tanah yang telah mengalami kesuburan tanpa campur tangan manusia pada masa penaklukan, seperti hutan-hutan.

Deskripsi Sadr mengenai wilayah pemerintah legal atas tanah yang makmur secara alami cukup membingungkan.⁴⁶ Di satu bagian, ia berpendapat bahwa tanah itu tidak berbeda dengan tanah yang telah disuburkan kembali, dan menambahkan bahwa apakah tanah itu berada dibawah pemerintahan Muslim lewat penaklukan atau tidak, tidaklah mempengaruhi statusnya: “tanah yang subur secara alami adalah milik negara tanpa memperhitungkan apakah ia diperoleh lewat paksaan.”⁴⁷ Tipe tanah taklukan ketiga yang diperoleh lewat penaklukan, tanahnya subur tanpa campur tangan kerja manusia, adalah dan akan tetap menjadi properti negara, nasibnya diputuskan oleh imam, sebagaimana halnya tanah mati.

Di sisi lain, ia berpendapat pula bahwa “hutan dan tanah-tanah yang subur alami yang ditaklukkan melalui paksaan kekuatan dan diambil dari tangan-tangan kaum kafir (*kuffār*) adalah properti publik Muslim. Pemiliknya tidak lain adalah komunitas secara keseluruhan.”⁴⁸

⁴⁶ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 195

⁴⁷ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 421

⁴⁸ *Ibid*, hal. 420

2. Tanah hasil persuasi (الأرض المسلمة بالدعوة)

Sadr menggambarkan kategori ini sebagai tanah yang para pemukimnya membalas seruan Islam dengan sukarela dan tanpa tekanan ancaman atau kekerasan. Ini merupakan kasus yang terjadi di Madinah atau di Indonesia.

Tanah ini, seperti halnya tanah taklukan, terbagidalam tiga tipe:

- (a) Tanah (hasil) persuasi yang dimakmurkan manusia (yaitu yang diberikan pada Islam secara sukarela). Keadaannya tetap seperti sebelum Islam datang. Properti pribadi dengan demikian bersifat mutlak, dan tidak ada *kharaj* yang bisa dipungut dari para pemukimnya.
- (b) Tanah mati hasil persuasi. Tanah ini, sebagai kontras bagi tipe sebelumnya, serupa dengan tanah mati (hasil) taklukan. Tergolong *anfāl*, yang jatuh dalam definisi di bawah properti negara.
- (c) Tanah makmur alami (hasil) persuasi. Ini juga merupakan properti negara berdasarkan aksioma legal: “setiap tanah tanpa pemilik adalah *anfāl*.”⁴⁹ Perbedaan di antara (b) dan (c) dalam konteks wilayah pemerintahan legal adalah bahwa penyuburan kembali tanah mati memberi pelakunya (orang yang menyuburkan tanah itu kembali) sebuah “hak pribadi”.

3. Tanah hasil persetujuan (أرض الصلح)

Pada kategori ini termasuk tanah yang pemukim-pemukimnya tidak pernah memerangi Islam seperti dalam kasus tanah penaklukan, juga tidak pernah

⁴⁹ *Ibid*, hal. 421

menyambutnya sukarela seperti dalam tanah (hasil) persuasi. Tanah tersebut menjadi bagian dari dunia Muslim tanpa membuat pemukimnya berganti agama.⁵⁰

Status tanah yang disuburkan manusia dalam kategori ini bergantung pada persetujuan yang menjadikan pemukim-pemukimnya bagian dari dunia Muslim. Dalam kasus ekspansi tersebut terjadi dalam kondisi bahwa tanah yang bersangkutan masih tetap menjadi milik para pemukim non-Muslim, secara alami mengikuti undang-undang yang mengatur tanah Muslim yang ekwivalen melalui penaklukan. Tanah tersebut tergolong properti negara, kecuali jika di sini terdapat kesepakatan yang menunjukkan sebaliknya.⁵¹ Tanah demikian adalah berstatus *ji'zyah*, dalam artian sebagai hak yang diberikan Allah swt kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam.⁵²

Apa pun kategori spesifik yang menjadi golongan jenis sebidang tanah, ia merupakan subyek bagi sebuah persyaratan penting dimana sang pemilik, jika ada harus terus-menerus mengeksploitasi tanah tersebut. Manakala tanah diabaikan dan menjadi tidak subur, maka secara otomatis tanah itu akan berada di luar jangkauan legal pemiliknya. Lebih jauh lagi, jika orang yang mengurus tanah tersebut meninggal dunia, peraturan waris akan mengatur kelanjutannya, namun keturunan-keturunannya yang mewarisi properti tersebut terikat oleh persyaratan yang sama berkenaan dengan eksploitasi konstan itu. Jika mereka gagal

⁵⁰ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 196

⁵¹ *Ibid*, hal. 423

⁵² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun*, hal. 258

melakukannya, tanah yang telah menjadi tidak produktif karena kelalaian mereka menjadi properti publik.⁵³

Konsep pekerjaan/penggarap tanah, sebagaimana konsep penyuburan tanah kembali bagi teori umum kepemilikan tanah dalam sistem Šadr:

Kami memahami bahwa pemilikan tanah melalui keturunan atau hak orisinal bersifat kondisional bergantung pada keterampilan individu menjalankan fungsi sosialnya (*wazīfah*) atas tanah tersebut. Jika ia mengabaikannya dan membiarkannya memburuk hingga mati sama sekali, hubungannya dengan tanah itu juga memburuk. Tanah akan terbebas dari ikatan apa pun dengan dirinya.”⁵⁴

Dengan demikian, terungkap sudah karakteristik kedua teori tanah Islam dalam sistem Šadr. Selanjutnya mengenai karakteristik historis, yang menentukan status asli sebidang tanah, dalam *Iqtisādunā* Šadr mengembangkan sebuah ikatan pada kepemilikan tanah yang mengindikasikan suatu kecenderungan radikal, yakni urgensi pekerjaan untuk mengekalkan dan melindungi hak kepemilikan.

Šadr memberikan ruang bagi kepemilikan pribadi, sebagaimana dalam kasus tanah hasil persuasi, yakni para pemilik yang ditunjuk untuk mengeksploitasinya dapat mempertahankan hak istimewa mereka sepanjang mereka terus menggarap tanah tersebut, dan sebagaimana dalam kekecualian kasus tanah kesepakatan, kepemilikan pribadi orang-orang non-Muslim dihormati sebagai ganti atas sebuah pajak. Namun, “prinsip umumnya adalah kepemilikan/properti negara atas tanah tersebut. Di samping prinsip ini, terdapat sebuah hak menyuburkan kembali yang menganugerahkan penggarapannya (orang yang menyuburkannya kembali) – atau orang yang menerimanya melalui

⁵³Muhammad Bāqir Šadr, *Iqtisādunā*, hal.428

⁵⁴*Ibid*, hal. 429

pewarisan tanah tersebut dari penggarap pertama/ orisinal – sebuah hak istimewa atas tanah itu. Hak ini tetap dimiliki sepanjang penyuburan tanah tetap dilakukan...⁵⁵

Dalam kasus tanah *kharaj*, perubahan status tidak dimungkinkan sama sekali. Hak umum kepemilikan negara tidak bisa dihapuskan. Tanah *kharaj* dikategorikan sebagai tanah wakaf (*trust/ mauqūfah*). Perbedaan hak negara pada tanah *kharaj* dan hak-haknya dalam kasus properti mutlak terletak pada kemungkinan bagi sang imam untuk menganugerahkan hak guna mengeksploitasi tanah dan membayar *kharaj* sebagai gantinya pada individu atau kelompok tertentu.

Sadr menyimpulkan dengan merekapitulasi dua sumber yang dapat mengizinkan hak relatif individu guna memiliki tanah dan hasil-hasilnya. Keduanya dinyatakan dalam konsep “kerja”: (1) penyuburan kembali, “yang terhitung ekonomis sifatnya”, dan (2) “kerja politis”⁵⁶ yang dipahami sebagai upaya awal para serdadu Muslim, yang, melalui “prestasi” militer mereka, berhasil membuka tanah bagi Islam dan memperluas kendali atasnya.

Penyuburan tanah kembali, sebagai lawan dari kerja politis, tetap relevan sebagai suatu kondisi kepemilikan yang abadi. Ini terhitung penting dalam kasus tanah mati yang direhabilitasi dan dengan demikian dimiliki oleh penggarap yang menyuburkannya kembali. Namun, hal tersebut juga menembus seluruh hak yang mengikutinya karena sang penggarap (yang menyuburkannya kembali) dan

⁵⁵ *Ibid*, hal.430

⁵⁶ *Ibid*, hal. 437

keturunan-keturunannya tetap diberi hak istimewa itu selama mereka tetap menyuburkan tanah tersebut. Jika tanah menjadi milik Muslim melalui proses penaklukan, “kerja politis dianggap sebagai kerja komunitas, bukan kerja seorang individual. Karena itu komunitas menjadi pemilik tanah tersebut.”⁵⁷ Jika tanah menjadi milik Muslim melalui pertalian para pemukimnya pada Islam, maka ruangan tersebut disisakan bagi kepemilikan pribadi. Bagaimanapun, “hak kepemilikan pribadi tidak dianugerahkan dalam suatu cara mutlak, dan Islam telah mengkondisikannya atas pengeksploitasian tanah oleh para pemukimnya. Jika mereka membuang tanah tersebut, sejumlah cendekiawan seperti Ibn Al-Barraj (abad ke-10) dan Ibn Hamzah (wafat setelah 566/1171) mempertimbangkannya menjadi properti komunitas kembali.”⁵⁸

Menggenapkan teori properti tanah, Sadr juga mencoba untuk menghubungkannya dengan skema yang lebih umum dari sistem yang diajukannya.

Kategori properti dalam skema ini jatuh dalam wilayah teori umum distribusi pascaproduksi. Bagi Sadr, adalah penting untuk memisahkan kandungan ekonomi peraturan-peraturan Islam mengenai properti dari kemungkinan-kemungkinan pertimbangan-pertimbangan politik, dan melengkapi deskripsi teori tanah.

Sebuah teori umum kini bisa disketsakan:

⁵⁷ *Ibid*, hal 438

⁵⁸ *Ibid*, hal 439

Tanah, pada dasarnya, adalah properti sang imam. Seorang individu tidak memiliki satu hak kontrol (*ruqbah*). Sebuah kepentingan pribadi (*ikhtisās syahsyī*) tidak berlaku, kecuali berdasarkan basis kerja yang dihabiskan seorang individu pada tanah tersebut guna mempersiapkannya (*i'dad*) dan mengeksploitasinya (*istismār*). Keamanan/ perlindungan ini, atau hak yang diperoleh seorang individu sebagai hasil pekerjaannya tidak menghalangi sang *imām* untuk mengenakan suatu pajak (*tasq*) pada tanah yang telah disuburkan kembali. Dengan demikian, umat manusia dapat mengambil keuntungan darinya. Ini tidak mencegah sang imam untuk meringankan sang penggarap dari kewajiban membayar *tasq* sesekali, pada situasi-situasi tertentu.⁵⁹

Dia juga mengakui bahwa : Sejarah properti pribadi atas tanah penuh dengan ketidakadilan dan eksploitasi, sebagaimana tanah menjadi sulit dijangkau massa karena dibuka untuk beberapa orang yang diberi hak istimewa.

B. Mineral-Mineral dan Sumber Daya Alam

Faktor kedua adalah mineral-mineral dan sumber daya alam. Unsur kemakmuran kedua yang didistribusikan dalam fase praproduktif sistem tersebut ditetapkan oleh mineral-mineral. Pertanyaan legal yang dihadapkan dalam teori tersebut adalah apakah mineral-mineral mengikuti tanahnya, misalnya apakah sebuah mineral mengikuti pula wilayah pemerintahan legal yang sama dengan tanah tempat unsur itu ditemukan.

Jawabannya adalah negatif. Bagi mineral-mineral, “berada di tanah seorang individu bukan alasan cukup, dari sudut pandang yurisprudensi, untuk kepemilikan individu-individu tersebut atas tanah itu.”⁶⁰ Teori kepemilikan tanah

⁵⁹ *Ibid*, hal 433

⁶⁰ *Ibid*. hal. 454

didasarkan, sebagaimana telah dikembangkan sebelumnya, “pada salah satu dari dua alasan berikut: melalui penyuburan kembali, atau melalui masuknya tanah dalam lingkup Islam lewat peralihannya secara sukarela. Penyuburan kembali atau menghidupkan tanah mati (*ihyā al-mawāt*)⁶¹ menciptakan sebuah hak yang dikenakan atas penggarapnya, sedangkan kesukarelaan menyambut Islam membuat seorang yang berpindah agama menjadi seorang pemilik tanah. Tidak ada satu pun di antara dua kasus tersebut diperluas hingga mineral-mineral yang ditemukan di dalam bumi. Mereka terbatas hanya hingga ke permukaan.”⁶²

Semua kawasan yang mengandung mineral seperti danau yang mengandung garam, sumber-sumber minyak dan lain sebagainya yang bukan merupakan hasil kerja seseorang, semuanya diatur oleh khalifah.⁶³

Dalam pembacaan Ṣadr atas bacaan-bacaan para ahli hukum klasik, sebuah teori terpisah mengenai mineral didasarkan pada klasifikasi mereka sebagai yang “kesternal” atau “internal”. Mineral-mineral internal adalah “setiap mineral yang memerlukan, untuk manifestasi kualitas mereka sebagai mineral yang bermanfaat, untuk digarap dan dikembangkan, seperti besi atau emas, dan semacamnya.”⁶⁴ Namun, mineral eksternal seharusnya tidak dipandang, “sebagaimana disiratkan oleh kata-katanya, dalam konteks bahwa mereka tidak

⁶¹ *Ihyā al mawāt* adalah menghidupkan tanah mati dengan jalan mengelolah atau menjadikan tanah tersebut menjadi subur sehingga siap untuk ditanami. Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi milik yang bersangkutan, Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun*, hal. 135

⁶² Muhammad Baqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal 455

⁶³ Afzalur Rahmān, *Doktrin*, Jilid II, hal 253

⁶⁴ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal 444

memerlukan penggalan dan pekerjaan tertentu untuk memperolehnya, namun makna yang dimaksud adalah bahwa mereka menambang benda bersifat mineral yang terwujud, tidak peduli apakah untuk memperolehnya orang memerlukan pekerjaan tertentu atau tidak.”⁶⁵

Pentingnya kerja dalam pembedaan ini tidak terletak dalam kesulitan untuk menambang/mencapai mineral internal atau mineral eksternal, namun lebih dari faktor sekali mineral-mineral itu bisa dicapai, maka diperlukan pekerjaan untuk mengembangkannya guna menjadikannya berkualitas.

Status hukum mineral-mineral eksternal tergolong pada “properti publik”. “Secara publik mereka terbagi di antara masyarakat dan Islam tidak mengakui hak salah seorang di antaranya pada benda-benda tersebut”, hanya negara atau wakil-wakilnya dapat mengeksploitasi mineral-mineral tersebut, tindakan mereka secara mutlak dilarang.”⁶⁶ Maksimal satu-satunya yang dapat dilakukan seseorang untuk mencari keuntungan dengan mineral-mineral eksternal ini terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Mineral-mineral internal terbagi dalam dua kategori: mineral internal yang ditemukan di dekat permukaan tanah, dan mineral internal tersembunyi yang membutuhkan kerja ganda: pertama untuk mencapai dan menggantinya, kemudian untuk mengolah/memrosesnya agar mencapai kualitas internal di dekat permukaan tanah, tutur Şadr, para fuqaha tidak mengizinkan properti pribadi bagi kepemilikan (kontrol, *ruqbah*) mineral tersebut, namun (sebagaimana dalam kasus

⁶⁵ *Ibid*, hal 443

⁶⁶ *Ibid*

mineral-mineral eksternal), mereka mengizinkan individu mengambil sejumlah kuantitas yang cukup beralasan untuk perjanjian kesepakatan di antara para fuqaha.

Kontrasnya, mineral internal tersembunyi telah membuka jalan menuju sebuah perdebatan. Beberapa ulama seperti Al-Khulayni (w. 329/941), Al-Qummi (w. 1231/1816), dan Mufid (w. 413/1022), mempertimbangkan mereka sebagai *anfāl*, dan *anfāl* adalah properti negara. Yang lain, seperti Syafi'i, mempertimbangkan mereka menjadi publik properti, dan terbagi di antara semua orang.⁶⁷

Pertanyaannya adalah apakah individu dapat memiliki tambang emas dan besi sebagai properti pribadi jika ia menemukannya dalam penggaliannya. Beberapa fuqaha memberi jawaban yang menguatkan, mempertimbangkan penggalian sebagai salah satu bentuk menyuburkan tanah kembali, namun meletakkan batas-batas kepemilikan.

Yang termasuk dalam properti adalah "material yang ditemukan melalui penggalian. Itu tidak diperluas pada kedalaman bumi, pada biji-biji mineral dan akar-akarnya. Ini adalah yang dalam fiqih disebut sebagai wilayah berhampiran/bersinggungan mineral (*ḥarīm al-ma'dan*).

Şadr menyimpulkan bahwa sekali batasan ini tersusun, kendati ia mengandung privatisasi potensial, "properti semacam itu sangat jelas berbeda dengan kepemilikan sumber-sumber alam dalam doktrin kapitalis karena merupakan suatu jenis properti yang tidak berbeda dengan eksistensinya menjadi

⁶⁷ *Ibid*, hal 449

sebuah tipe pembagian kerja di antara masyarakat. Ia tidak dapat mengarah pada pendirian perusahaan monopolistik pribadi dalam model perusahaan-perusahaan di masyarakat kapitalis.”⁶⁸

C. Air dan Sumber Alam Lainnya

Faktor-faktor produksi ketiga dan keempat adalah air dan sumber-sumber alami lainnya, yang dijelaskan Şadr secara singkat. Wilayah pemerintahan legal dari air memiliki dua aspek. Air yang mewujud, yaitu sumber-sumber terbuka dipertimbangkan sebagai properti publik. Seseorang akan mengambil darinya setara dengan upaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, misalnya dengan memompanya dengan sebuah mesin, atau menggali sebuah lubang untuk memperolehnya. Air yang tersembunyi, air yang tidak serta-merta tersedia, akan memberi orang yang menemukannya dan mengekstraksinya suatu prioritas untuk memenuhi sejumlah kebutuhannya. Kelebihan yang berlimpah dapat diperoleh pula oleh yang lain.⁶⁹

Sumber-sumber alami lain dipertimbangkan pula sebagai wilayah publik (*mubāhah ‘ammah*). Di antaranya adalah perburuan dan hasil-hasil kehutanan yang “dapat dimiliki sebanyak kerja yang dikeluarkan/dibutuhkan untuk mencapai perolehan benda-benda tersebut”. Seekor burung yang jatuh tak sengaja di

⁶⁸ *Ibid*, hal 452

⁶⁹ *Ibid*, hal. 466

properti milik seorang tidak secara otomatis menjadi miliknya. Hanya kerja positif (dalam hal ini pergi berburu) yang akan mengizinkan pemilik tersebut.⁷⁰

Diskusi mengenai keempat faktor yang membentuk bagian dari tahap praproduktif dalam sistem Şadr, sejauh ini dalam *Iqtisādunā*, terbilang komplet. Dengan menggambarkan karya-karya para fuqaha klasik, Şadr memperkenalkan pandangannya sendiri mengenai wilayah-wilayah pemerintahan legal yang mempengaruhi sistem distribusional yang berhubungan dengan masing-masing dari setiap elemen ini. Di antara pertanyaan-pertanyaan kritis yang dikeluarkan adalah isu minyak, yang diatasi Şadr dalam sebuah model yang “radikal”. Sebagai suatu “mineral eksternal”, minyak bumi dipertimbangkan dalam hukum menjadi subjek “properti publik”, dan orang-orang secara pribadi tidak berhak untuk mengeksploitasi ladang-ladang minyak. Namun, sumber kekayaan yang paling penting dalam analisis Şadr adalah tidak mengejutkan isu kepemilikan tanah. Sebuah pertanyaan kritis pada masa pasca-revolusioner di Irak, ini terbukti juga menjadi suatu titik pertentangan utama di tahun-tahun berikutnya yang segera menyusul sukses Revolusi Iran.

Begitu aturan-aturan legal dalam distribusi faktor-faktor produksi dibentangkan, Şadr bergerak maju pada level abstraksi berikutnya, yang merupakan teori distribusi ini, tulisnya, adalah paroh kedua proses penemuan yang bertitik tolak dari suprastruktur atas basis tersebut, dan dari perincian-perincian legal menuju pada generalisasi-generalisasi teoritis.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.* hal 469

⁷¹ *Ibid.*, hal. 473

Dalam bagian-bagian metodologis awal *Iqtisādunā*, dan dalam upaya-upaya untuk menggambarkan sebuah teori kepemilikan tanah, Ṣadr pada waktu itu telah mencoba untuk menggambarkan beberapa kesimpulan yang lebih umum dari perincian-perincian peraturan-peraturan legal yang ditemukan dalam yurisprudensi klasik. Di sini ia menaruh perhatian dengan memberikan satu gambaran keseluruhan sistem ekonomi yang lebih penuh. Tekanan beralih pada kekomprehensifan.

Individu tidak memiliki hak pribadi yang akan membedakannya secara legal dari individu lainnya kecuali pembedaan ini menjadi suatu refleksi dari sebuah pekerjaan yang spesifik”⁷²

Sisi positif terletak, sebaliknya, dalam unsur kerja. Kerja⁷³ adalah sebuah basis legal bagi akuisisi hak-hak dan penganugerahan hak-hak pribadi dalam sumber-sumber alami. Dari prinsip bahwa hanya kerja yang memberikan hak-hak pribadi, diturunkan tiga kesimpulan. Kesimpulan pertama terhitung mapan, dan terdiri dari sebuah identifikasi kerja dan properti. Dua kesimpulan lain bervariasi. Bangkitnya sebuah hak atau penganugerahan hak akan bergantung pada (a) tipe kerja dan (b) tipe hak-hak pribadi yang diciptakan melalui kerja tersebut.⁷⁴ Kombinasi prinsip dan kesimpulan-kesimpulan itu membentuk

⁷² *Ibid*, hal. 475

⁷³ Segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain (dengan menerima gaji). Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyām wal Akhlāk fil Iqtisād Islāmī*, (*Norma dan Etika Ekonomi Islam*), alih bahasa Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, Cet. IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 104-105

⁷⁴ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 478

keseluruhan sistem yang bagi Šadr, menginformasikan suprastrukturnya. Contoh-contoh yang paling menarik dalam sistem adalah berikut ini :

- (1) Tanah mati yang disuburkan kembali oleh penggarap akan mencegah klaim dari orang lain atas tanah itu.
- (2) Tanah makmur yang ditanami penggarap akan tetap dalam pengawasan sang petani, selama ia tetap mengerjakannya. Perbedaan dengan tanah mati adalah bahwa orang yang menyuburkan kembali tanah yang mati kehilangan haknya atas tanah itu hanya jika ia mengabaikannya cukup lama hingga tanah tersebut menjadi mati kembali. Dalam kasus tanah makmur/subur, hak pribadi akan hilang segera setelah pengeksploitasian tanah berhenti.
- (3) Sebuah tambang yang akan ditemukan memberikan penemuannya prioritas untuk menambangnya, namun jika orang lain mencapai tambang yang sama melalui cara yang berbeda, ia juga akan mendapatkan hak untuk mengeksploitasinya.
- (4) Orang yang menggali sebuah sumur berhak untuk memanfaatkannya sebanyak-banyaknya kebutuhannya. Di luar kebutuhan ini, ia tidak dapat menghalangi orang lain untuk memiliki akses pada air tersebut.

Ini memungkinkan Šadr untuk mengikhtisarkan skema distribusionalnya pada tahap praproduksi. Kerja adalah sebuah sumber primer, namun jenis-jenis kerja yang berbeda memberikan konsekuensi-konsekuensi legal yang juga berbeda. Memang benar, katanya bahwa di sini terdapat sebuah faktor kerja baik dalam proses menyuburkan sepetak tanah mati dan dalam proses menanam sebidang tanah yang sudah makmur sebelumnya. Perbedaannya, bagaimana pun,

adalah bahwa penyuburan tanah kembali menganugerahkan penciptaan sebuah kesempatan ekonomis yang tidak memerlukan kerja pendahuluan dalam kasus tanah yang subur. Penemuan hubungan antara hak-hak penggarap untuk sumber-sumber ini memberikan konsekuensi bahwa hukum individual yang terikat pada sebuah sumber alami berkurang jika kesempatan yang tercipta menghilang.⁷⁵ Konsekuensinya, kriteria umum untuk mengizinkan atau mencegah orang-orang yang bukan pekerja untuk mengambil keuntungan dari sumber-sumber alami yang telah disuburkan kembali oleh penggarap-penggarapnya, atau dalam hal para penggarap telah menciptakan peluang untuk kemakmuran terletak dalam derajat pengaruh atas peluang yang telah diciptakan para penggarap dengan menyuburkan/menghidupkan kembali sumber-sumber alami.

Dalam skema ini Šadr memasukkan ke dalamnya semua tipe kepemilikan kekayaan. Yang benar bagi tanah juga benar untuk perburuan dan pertambangan, dan peraturan-peraturan ini diringkas dalam naskah berikut ini:

Teori umum distribusi produksi diterangkan dengan contoh melalui penggalian kembali sebuah tambang, atau suatu sumber air yang tersembunyi ke dalam bumi, dengan cara yang sama yang itu juga terjadi pada tanah yang disuburkan kembali. Jumlah kerja yang mencapai pelaksanaan upaya penyuburan kembali itu menciptakan peluang untuk mengeksploitasi kekayaan alami yang disuburkan kembali oleh sang penggarap, dan ia memiliki peluang ini sebagai buah usahanya. Tidak diizinkan bagi yang lain untuk menghilangkan peluang ini. Sang penggarap memiliki hak untuk mencegah yang lain merampas sumber (*marfaq*) ini darinya. Ini bisa dipertimbangkan sebagai hak seorang penggarap atas sepetak tanah, sebuah tambang, atau satu sumber air ... Namun, praktik pertanian di atas tanah yang pada dasarnya memang subur, atau pemanfaatan sebidang tanah untuk beternak (tempat hewan merumput) adalah aktivitas-aktivitas yang, kendati dieksploitasi dan disuburkan sumber-sumber alami, tidak menjustifikasi eksistensi sebuah hak bagi petani atau peternak atas tanah tersebut... Yang dibenarkan dalam

⁷⁵ *Ibid*, hal. 487

kasus ini adalah kepemilikan buah yang diproduksi sang petani, atau hewan-hewan yang diurus sang peternak. Adanya hak tersebut tetap tidak membenarkan kepemilikan tanah atau hak mereka atas benda itu.⁷⁶

Šadr kemudian bergerak maju pada sebuah derajat abstraksi dalam teori tersebut lebih jauh lagi. Seiring dengan prinsip kerja sebagai suatu pencipta hak-hak, pemilikan yang berlanjut dihadirkan sebagai kondisi bagi pengekaln hak-hak. Šadr dapat menurunkan dari studi prinsip distribusi praproduksi secara umum, dua dalil dasar teori ini:

- (1) Sang penggarap yang mengusahakan upaya-upayanya pada sumber-sumber alami kasar memiliki buah kerjanya. Ini merupakan peluang umum untuk meraih keuntungan dari kekayaan yang diciptakan seseorang.
- (2) Pengekalan eksploitasi (*mumārasah al-intifa'*) dalam setiap sumber alami menganugerahi individu yang mengeksploitasinya sebuah hak yang mencegah orang lain untuk merampas sumber itu dari dirinya, selama ia masih tetap mengambil manfaat dari sumber khusus ini.

Pada prinsip pertama didasarkan aturan-aturan yang mengorganisasi hak-hak dalam operasi penyuburan kembali dan perburuan. Pada prinsip kedua didasarkan aturan-aturan kepemilikan barang-barang bergerak, yang peluang untuk mengeksploitasinya telah ditawarkan alam pada manusia.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hal. 486

⁷⁷ *Ibid*, hal. 497

VI. Teori Distribusi Pasca Produksi

Teori umum *iqtisādunā* mengenai distribusi praproduksi telah memperkenalkan konsep kebutuhan dan tujuan sentral bekerja, sebagaimana teori umum distribusi tanah dan faktor-faktor produksi lainnya. Setelah menyatakan beberapa pendapat umum pada isu-isu yang sekilas telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, Ṣadr kemudian bergerak menuju teori distribusi pasca produksi.⁷⁸

Baik struktur maupun metode *Iqtisādunā* tampil dengan jelas dalam bagian ini, yang diawali dengan satu peringatan, yakni Ṣadr memperlihatkan kewaspadaannya bahwa kedua studi distribusi pra dan pasca produksi berinteraksi (*tadākhkhala al-battan*)” karena kesulitan membagi tahapan-tahapan ekonomi dalam bagian pra dan pasca produksi. Proses tersebut secara khusus bertalian dengan penetapan Islam mengenai konsep kerja secara sentral.⁷⁹

Kami telah mencoba untuk menspesifikasikan hak-hak yang diperoleh individu dalam sumber-sumber mentah alami dalam teori distribusi pra produksi yang dipandang sebagai salah satu aspek distribusinya. Karena hak-hak ini adalah hasil kerja, analisis lantas difokuskan pada peranan kerja dalam sumber alami tersebut. Sumber-sumber alam yang dikembangkan oleh kerja dalam perspektif ini datang di bawah kekayaan praproduksi.⁸⁰

Sumber-sumber produksi, yaitu tanah, materi-materi mentah, dan alat-alat yang diperlukan untuk produksi yang dianalisis dalam bagian mengenai proses distribusi pra produksi harus ditinjau kembali dari sudut pandang lain. Kali ini

⁷⁸ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 206

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 517

analisis bertujuan menjelaskan aturan-aturan legal tentang distribusi pasca produksi yang menaruh perhatian pada kekayaan produktif yang pada dasarnya dihasilkan lewat kerja yang dilaksanakan pada alam, dan hasil-hasil dari sebuah kombinasi antara sumber-sumber produksi material ini. Inilah turunan kekayaan atau kekayaan sekunder”.⁸¹

Untuk menemukan *the rationale* sistem ekonomi, Ṣadr menempatkan sejumlah aturan dari suprastruktur yang dibacanya dalam naskah-naskah fiqh klasik. Ia kemudian menawarkan teori alternatif dari dua mazhab yang saling bersaing. Kapitalisme dan Sosialisme. Kemudian, melalui jalan deduksi dari naskah-naskah klasik, dan melalui cara yang kontras dengan Sosialisme dan Kapitalisme, ia menggambarkan sikap Islam yang spesifik terhadap permasalahan-permasalahan perekonomian ini.

Dalam hal distribusi pasca produksi, kapitalisme membagi kekayaan produktif dalam empat faktor, yaitu bunga (العائدة), gaji atau upah (الأجور), sewa (الريع), dan profit atau keuntungan (الربح).⁸²

Islam dalam pandangan Muhammad Bāqir Ṣadr melihat bahwa kekayaan produktif yang di dalamnya ada anjuran untuk mendistribusikan kembali adalah, kekayaan yang langsung dimiliki oleh seorang pekerja, yakni profit. Ini adalah pembenaran esensial dalam teori Islam.

⁸¹ *Ibid*, hal. 387

⁸² *Ibid*, hal. 581

VII. Teori Produksi dan Peranan Negara dalam Ekonomi

Bagian terakhir *Iqtisādunā* adalah terdiri dari dua bab, yakni pertama adalah teori produksi yang dipembahasannya dimulai oleh Muhammad Bāqir Ṣadr dengan pembedaan antara doktrin dan sains. Dalam pembahasan ini Muhammad Bāqir Ṣadr juga menjelaskan tentang adanya titik persamaan antara mazhab-mazhab ekonomi, yakni komunisme, sosialisme, kapitalisme, dan Islam bahwa semua mazhab ekonomi tersebut menginginkan adanya maksimalisasi produksi (تتمية الإنتاج والإستفادة من الطبيعة إلى أقصى حد).⁸³ Hanya saja dalam hal cara yang ditempuh masing-masing mazhab ekonomi tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau kapitalisme memandang bahwa maksimalisasi produksi didasarkan atas prinsip kebebasan, sosialisme memandang bahwa maksimalisasi produksi didasarkan atas prinsip kolektif, sedangkan Islam memandang bahwa maksimalisasi produksi didasarkan atas prinsip keadilan.

Dalam hal tujuan maksimalisasi produksi, kapitalisme memandang bahwa maksimalisasi produksi tersebut bertujuan untuk mengakumulasikan harta kekayaan (نمو الثروة)⁸⁴ dan tidak berhubungan dengan dengan distribusi, sedangkan Islam memandang bahwa maksimalisasi produksi tersebut bertujuan untuk kepemilikan kekayaan yang sangat erat hubngannya dengan distribusi.

Bab yang terakhir dalam *Iqtisādunā* adalah peranan Negara dalam ekonomi. Di sini Muhammad Bāqir Ṣadr mengemukakan bagaimana Negara bertanggung jawab atas masalah ekonomi.

⁸³ *Ibid*, hal. 649

⁸⁴ *Ibid*, hal. 669

Negara dalam pandangan Muhammad Bāqir Ṣadr adalah aktor yang sangat berperan dalam mengendalikan proyek-proyek besar ekonomi. Negara akan turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah produksi dan distribusi agar terwujud kesetaraan dan efisiensi serta mengontrol industri-industri ekstraksi.⁸⁵ Disinilah letak kewenangan Negara (منطقة الفراغ)⁸⁶ sebagai wilayah bebas bagi aktivitas pemerintah. Dalam wilayah ini imam selaku *wali al-'amr* akan mengambil langkah-langkah ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi tunjangan sosial (الضمان الإجتماعي) dan keseimbangan sosial (التوازن الإجتماعي).⁸⁷

Tunjangan sosial lebih jauh lagi didefinisikan terdiri dari solidaritas publik (التكافل العام) dan hak-hak kelompok dalam sumber-sumber kekayaan. Keseimbangan sosial diwujudkan oleh Negara dalam bentuk kewajiban bagi kelompok tertentu untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan perbedaan-perbedaan sosial. Dengan demikian perbedaan sosial tidak akan menjadi sedemikian tajam antara *the have* dan *the have not*.

⁸⁵ Chibli Mallat, *Menyegarkan*, hal. 212

⁸⁶ Muhammad Bāqir Ṣadr, *Iqtisādunā*, hal. 725

⁸⁷ *Ibid*, hal. 697 dan 706

BAB VI PENUTUP

I. Kesimpulan

Setelah meneliti pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr dalam *Iqtisādunā* tentang elemen dasar ekonomi, prinsip ekonomi, masalah ekonomi, distribusi, kepemilikan/property, sirkulasi, teori distribusi pra dan pasca produksi, teori produksi dan peranan Negara dalam perekonomian, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pemikiran-pemikirannya tersebut adalah :

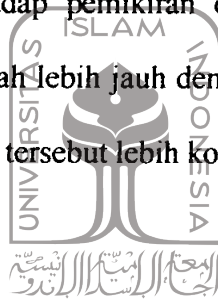
- A. Ekonomi Islam adalah bagian dari sebuah sistem yang universal (syari'ah) yang merupakan kombinasi dari tiga elemen dasar, yakni doktrin (العقيدة) , konsep-konsep/logika (المفاهيم) , emosi/perasaan (العواطف والأحاسيس) .
- B. Ada tiga prinsip dasar ekonomi Islam, yakni property multi lapisan (مبدأ) (مبدأ الملكية المزدوجة), kebebasan ekonomi yang terbatas (مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود), dan keadilan sosial (مبدأ العدالة الاجتماعية) .
- C. Masalah ekonomi adalah faktor manusia itu sendiri, yakni zalim dan kufur (ظلم و كفر). Bukan seperti dalam kapitalis bahwa masalah pokok ekonomi itu adalah keterbatasan sumber daya alam (قلة الموارد الطبيعية), begitupun dalam sosialis bahwa masalah pokok ekonomi adalah kepincangan antara produksi dan distribusi (التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع) .
- D. Perangkat distribusi dalam Islam terdiri dari dua macam, yakni kerja (العمل) dan kebutuhan (الحاجة) . Kerja merupakan dasar kepemilikan atau dengan kata lain, kerja adalah sebab kepemilikan. Sedangkan kebutuhan adalah

- alat distribusi primer sebagai pernyataan sebuah hak manusia yang bersifat esensial dalam kehidupan.
- E. Problem sosial yang sangat esensial adalah ketidakadilan, dan solusi dari ketidakadilan tersebut adalah distribusi.
- F. Dalam hal distribusi, Muhammad Bāqir Ṣadr membagi atas dua bagian, yaitu a. Distribusi sebelum produksi (توزيع ما قبل الإنتاج) b. Distribusi setelah produksi (توزيع ما بعد الإنتاج)
- G. Dalam hal kepemilikan/property, bekerja adalah konsep mendasar yang menurunkan property (الععمل في نظر الإسلام سبب الملكية العامل لنتيجة عمله). Dalam perspektif ini, property menjadi sebuah elemen sekunder distribusi, dan selalu dibatasi oleh satu tananan nilai moral dan kepentingan-kepentingan sosial yang diatur oleh agama.
- H. Sehubungan dengan sirkulasi, ekonomi Islam adalah sebuah jalan tengah, yaitu membantu dalam menegakkan sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dalam hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan menuju pada sirkulasi kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya terfokus pada beberapa golongan tertentu.

- I. Dalam aspek maksimalisasi produksi, kapitalisme memandang bahwa maksimalisasi produksi tersebut bertujuan untuk mengakumulasi harta kekayaan (نمو الثروة) dan tidak berhubungan dengan distribusi, sedangkan Islam memandang bahwa maksimalisasi produksi tersebut bertujuan untuk kepemilikan kekayaan yang sangat erat hubngannya dengan distribusi.
- J. Negara adalah aktor yang sangat berperan dalam mengendalikan proyek-proyek besar ekonomi. Negara akan turut campur dalam perekonomian untuk menjamin arah produksi dan distribusi
- K. Dengan melihat beberapa aspek ekonomi yang dikemukakan oleh Muhammad Bāqir Ṣadr ini, maka dari segi produk pemikiran, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr adalah sebuah produk pemikiran ekonomi yang memadukan aspek normatif dan empirik. Aspek normatif nampak dalam landasan doktrin teologis yang dikemukakannya, sedangkan aspek empirik nampak dalam argumen-argumennya terhadap kondisi sosial masyarakat yang menganut sistem kapitalis dan sosialis.
- L. Dari segi corak pemikiran, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Bāqir Ṣadr adalah sebuah pemikiran yang menggambarkan konteks zamannya, di mana beliau sangat mengharapkan adanya perubahan cara pandang/paradigma ekonomi dari yang sekuler menuju sebuah paradigma yang menghadirkan Tuhan dalam sistem ekonomi.

II. Saran-Saran (Implikasi Penelitian)

- A. Penelitian atau studi terhadap pemikiran seorang tokoh harus benar-benar mengetahui aspek sosial historis tokoh yang bersangkutan. Penelitian tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial historis di mana dan kapan tokoh tersebut berada, sebab aspek tersebut sangat mempengaruhi dan memberikan warna dan karakter pemikiran seorang tokoh yang menjadi obyek penelitian.
- B. Penelitian selanjutnya terhadap pemikiran ekonomi Muhammad Bāqir Ṣadr perlu penelusuran sejarah lebih jauh dengan dukungan literatur yang memadai sehingga penelitian tersebut lebih komprehensif



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar, "*Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Islam*", makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta, 17 Mei 1998)
- _____, "Sistem Ekonomi Islam Memiliki Beberapa Ciri", *Kabar Kampus*, (29 Desember 1999)
- Ahmad, Shaikh Mahmud, *Economic of Islam*, (Comparative Study), edisi. I, (Lahore-Pakistan: Asraf Press, 1947)
- Ahmad, Khurshid, *Studies In Islamic Economics*, (Jeddah & Inggris: International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz & The Islamic Foundation, 1976)
- Andrew, Zimbalist, Howard J. Sherm; Stuart Brown, *Comparing Economics System A Political-Economic Approach*, 2 Edition, (Harcourt Brace Jovanovindi Sandiago, 1989)
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Nizām Al-Islam*, Cet. V, (Beirut; Libanon: Daarul Ummah, 1953)
- Aslam, Mohamed Haneef, *The Islamic Worldview, And Islamic Economics*, Malaysia, IIUM (Journal of Economics & Management 5, NO. 1), (International Islamic University Malaysia Press, 1997)
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, cet. II, (Jakarta, Erlangga, 1987)
- Basuki, Hendro, Ekonomi Amerika dalam Pembinaan, *Suara Merdeka*, (No.XLI/14/VI/24 Februari 1993)
- Berger, Peter I, *Revolusi Kapitalis*, alih bahasa Muh. Oemar, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Bisri, Cik Hasan, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1998),
- Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Marx*, alih bahasa Joebaar Ajoeb, cet I, (Jakarta: Teplok Press, 1999)
- C. W. Hasek, James Harvei Dodd, *Economic Principles and Applikation*, South Western, (New York; Publishing Company, 1948)

- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999)
- _____, *Islam and Economic Challenge*, Int. Islamic Pub. House, and the intern. Institute Of Islamic Thought: Herndon VA, 1992)
- Clinton, Hillary, *It Takes a Village*, alih bahasa Widodo, cet. I, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), Sopwan Ismail, "WTO dan Gerakan Anti Kapitalis", *Kabar Kampus*.(9 Desember 1999)
- Deliamov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Devos, Rich, dalam *Compassionate Capitalism*, (Kapitalisme Dengan Kepedulian Sosial), (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Dodd, James Harvei, C. W. Hasek, *Economic Principles and Applikation*, South Wastern, (New York; Publishing Company, 1948)
- Dumairy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, disampaikan pada Kuliah Umum peserta baru Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta, 22 September 1998, hal. 8-9
- Eberstein, William dkk, *Isme-Isme Dewasa Ini*, alih bahasa Alex Jemadu, edisi. IX, (Jakarta: Erlangga Press, 1994)
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y.N et.al, cet.I, (Bandung: Mizan, 1421/2001)
- Fanfani, Amintore, *Catholicism, Protestantism and Capitalism*, (Sheed and Ward, London; 1938)
- Gani, Ruslan Abdul, *Harian Merdeka*, (28 Februari 1997)
- Green, Robert W., *Protestantism and Capitalism*, The Weber Thesis and His Critics (D.C Heat And Company, New York)
- Gregory, Paul R. dan Robert C. Stuart, *Comparative economic System*, (Boston: Houghmton Mifflin Company, 1981)
- Ha'iri, K., *Tarjamah hayāh al-Sayyid al-Syahid*, dalam Muhammad Baqir Sadr, *Mabāhes al-Ushul*, edisi Ha'iri, (t.t, Qum 1407/1987)
- Hamid, Edi Suandi, *Kurikulum Dan Silabi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LP3EI-UII, 1998)

Hasanuzzaman, S.M. dalam karangannya "*Definition of Islamic Economics*"
Journal of Research in Islamic Economics, (Vol. I, No. 2/1984)

Heilboner, Robert L. *Tokoh-tokoh besar Pemikir Ekonomi*, Jakarta, UI Press, 1982).

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi I, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002)

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik, Upaya Membingkai Peradaban Cirebon*, (t.tp, Pustaka Dinamika, 1999)

Mallat, Chibli, *Menyegarkan Islam*, alih. bahasa Santi Indra Astuti, cet. I, (Bandung: Mizan, 1421 H/2001 M)

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

Misanam, Munrokhim, "*Pendekatan Akademik Dalam Paradigma Ekonomi Islam*", makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta, 17 Mei 1998)

Muchsin, Djauhari, *Studi Perbandingan Tentang Sistem Ekonomi* (sebuah rangkuman), (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, 1985)

Naqvi, Sayed Nawab Baqir, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, Alih Bahasa Husin Anis, (Bandung, Mizan, 1985)

Nomani, Farhad dan Ali rehnema, *Islamic Economic System*, (Malasyia: Business Information Press, 1995)

Rahardjo, M. Dawan, *Islam dan transformasi sosial – Ekonomi*, cet. I, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)

Raharjo, M. Dawan, "Kapitalisme Dulu dan Sekarang", kata pengantar dalam *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1987)

Raharjo, M Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah*; Menuju Ekonomi Islam, (Bandung; Penerbit Mizan, 1987)

Rahmān, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, juld I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

- Rais, M. Amien, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996)
- Riff, Michael A. (ed.), *Kamus Ideologi Politik Modern*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Rosser, J. Barkley Jr, Marina V. Rosser, *Comparative Economics In A Transforming World Economy*, (USA: Penerbit Times Mirror Higher Education Group, 1996)
- Ṣadr, Muhammad Bāqir, *Keunggulan Ekonomi Islam-Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam* (Edisi Terjemahan), cet..I, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002)
- _____, *Sūra . . . Iqtisād Al-Mujtama' Al-Islām*, ed.II, (Berut: Dar Al-ta'aruf li Al-Matbuat, 1399 H/1979M)
- _____, *Falsafatunā –Pandangan Muhammad Bāqir Ṣadr terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, alih bahasa M. Nur Mufid, cet. V, (Bandung: Mizan, 1995)
- _____, *Al-Madrasah Al-Islāmiyyah*, (Berut: ttp, 1400 H/1980 M)
- _____, *Iqtisādunā*, (Berut: Dar al-Ta'aruf li al-Matbu'ah, 1401 H/1981 M)
- _____, *Al-Bank Al-Lā Ribawī fī Al-Islām*, edisi.VIII, (Beirut: t.tp, 1403 H/1983 M)
- _____, *Islam and Schools of Economics*, (Karachi-Pakistan: Islamic Seminary Publications, 1985)
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- Schumacer, E.F., *Kecil itu Indah*, alih bahasa S. Spomo, cet I (Jakarta; LP3ES, 1987)
- Setiawan, Bonni, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, alih bahasa A.M. Saefuddin, (Jakarta, Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986)
- Sjahrir, *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran*,), cet. V, (Jakarta; Sinar Harapan, 1995).

- Sombart, Werner, "Capitalism", dimuat dalam *Encyclopedia of the Sosial Sciences*, vol. 3
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, edisi I, cet I, (Yogyakarta: PT. Ekonisia, 2002)
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, cet. I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Suseno, Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, cet I (Jakarta: Gramedia, 1999)
- T. Bottomore dan P. Goode, *Reading and Marxist Sociology*, (Oxford: t.p, 1983), hal. 49-50
- Thurow, Lester, *The Future of Capitalism*, (London: Nicholas Brearley Publishing, 1996)
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, (Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York, 1958)
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme, Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung: Remaja Karya, 1986)
- Yuliadi, Imamudin, "Metodologi Ekonomi Islam", *Utilitas*, (No. 9/Tahun Ke 7/1999)
- Yusnanto, Ismail, *Islam Ideologi – Refleksi Cendekiawan Muda*, cet. I, (Alizzah, Bangil, 1998)
- Zadjuli, Suroso Imam, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999)
- _____, *Indonesian International Currency System*, (Surabaya;Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1998)

CURRICULUM VITAE

I. Identitas

Nama : Ubay,S.Ag
T T L : Palu, 20 Juli 1970
Pekerjaan : Dosen STAIN Palu
Alamat rumah : Jl. Yos Sudarso, No. 37 Palu Sulawesi Tengah
Telp. (0451)457320
Alamat kantor : Jl. Diponegoro, No. 23 Telp. (0451)422390-455380, Fax 428165
Palu, Kode pos.94221

Ayah : Harun (Almarhum)
Ibu : Hj. Sadida
Isteri : Surtin.A. Tauroa, SH
Anak : 1. Ananda Mumtahanah
2. Faqih Al-Munawwar

II. Pendidikan

- a. Sekolah Dasar (SD) Inpres Talise Palu, tahun 1985
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTsN), tahun 1988
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palu, tahun 1991
- d. IAIN Alauddin Ujung Pandang, tahun 1996
- e. Pascasarjana Program MSI UII Yogyakarta sekarang angkatan 2002-2004



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Lampiran :

**PERBEDAAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD BĀQIR
SADR DENGAN EKONOMI KAPITALISME DAN SOSIALISME
DALAM IQTISĀDUNĀ**

<i>ASPEK EKONOMI</i>	<i>KAPITALISME</i>	<i>SOSIALISME</i>	<i>ISLAM</i>
I. ELEMEN DASAR EKONOMI (التربة أو الأرضية)	INDIVIDUALISME-LIBERALISME	KOLEKTIVISME	1. AQIDAH 2. KONSEP 3. RASA
II. PRINSIP EKONOMI (الهيكل العام للإقتصاد)	KEPEMILIKAN PRIBADI YANG TIDAK TERBATAS	KEPEMILIKAN KOLEKTIF	1. KEPEMILIKAN MULTILAPISAN 2. KEBEBASAN EKONOMI YANG TERBATAS 3. KEADILAN SOSIAL
III. MASALAH EKONOMI (المشكلة الإقتصادية الأساسية)	KELANGKAAN SUMBER ALAM	KEPINCANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	KEKUFURAN DAN KEZALIMAN
IV. DISTRIBUSI (التوزيع)			
A. KERJA (العمل)	SEBAB KEPEMILIKAN INDIVIDU	1. SEBAB KEPEMILIKAN KOLEKTIF 2. SEBAB PENENTUAN NILAI SUATU MATERI	SEBAB KEPEMILIKAN INDIVIDU
B. KEBUTUHAN (الحاجة)	MOTIVASI INDIVIDU UNTUK BEKERJA	TOLAK UKUR DISTRIBUSI	MOTIVASI INDIVIDU UNTUK BEKERJA SEKALIGUS JUGA SEBAGAI PERANGKAT SEKUNDER DISTRIBUSI DITINJAU DARI SEGI HAK
C. KEPEMILIKAN (الملكية)	MENGAKUI KEPEMILIKAN INDIVIDU SECARA MUTLAK	MENGAKUI KEPEMILIKAN KOLEKTIF	TIDAK MENGAKUI KEPEMILIKAN INDIVIDU SECARA MUTLAK